



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Tahunan 2024
Badan Kebijakan Fiskal

Mengawal Fiskal, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

The background features a minimalist design of concentric, curved green lines. These lines form two large, stylized shapes: one in the top right corner and another in the bottom left corner, both resembling a stylized 'S' or a series of nested curves. The lines are thin and evenly spaced, creating a sense of movement and depth.

LAPORAN TAHUNAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Mengawal Fiskal, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

TENTANG TEMA

Mengawal Fiskal, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

Kondisi fiskal dan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang sinergis. Kebijakan-kebijakan fiskal dapat menggerakkan pertumbuhan, meningkatkan kepercayaan investor, menggairahkan daya beli masyarakat yang lesu, dan masih banyak lagi. Untuk itu, Badan Kebijakan Fiskal mengangkat “Mengawal Fiskal, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi” sebagai tema Laporan Tahunan 2024. Hal ini karena setiap langkah yang diambil Badan Kebijakan Fiskal sepanjang 2024, mengusung *mindset* tersebut, yang tercermin melalui isi laporan tahunan ini. Pertumbuhan ekonomi divisualisasikan melalui susunan grafis garis-garis yang menggambarkan berbagai bentuk; seperti tampak pada cover yang membentuk lambang *fast-forward* atau akselerasi. Grafis garis akan terus muncul di laporan tahunan ini sebagai perwujudan aneka gelombang, pola, kontur, serta riak dalam dinamika fiskal Indonesia sepanjang 2024.

DAFTAR ISI

Profil Organisasi	1
Tugas & Fungsi	5
Struktur Organisasi	6
Sumber Daya Manusia	7
Profil Pimpinan	9
 Bab 1 Capaian Utama	 19
Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025	20
Fasilitas Perpajakan Dan Kepabeanan Di Ibu Kota Nusantara	22
Pengenaaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional	23
Peralihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Serta Derivatif Keuangan	24
Kesepakatan Memorandum Saling Pengertian (Memorandum Of Understanding) Antara Indonesia Dan Negara Mitra Bilateral	
Peningkatan Peran Dan Kepemimpinan Indonesia Dalam Tatanan Kerja Sama Internasional	25
Dukungan Persiapan Dan Percepatan Keanggotaan Indonesia Dalam <i>Organization For Economic Cooperation and Development (OECD)</i>	27
 Bab 2 Capaian Umum	 31
Ekonomi Makro & APBN	32
Pendapatan Negara	46
Sektor Keuangan	57
Kerja Sama Internasional	62
Kerja Sama & Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim	88

Bab 3 Dukungan Kesekretariatan 97

Transformasi Organisasi	98
Dukungan Keuangan	102
Pelayanan Informasi Publik	106
Pengelolaan Kearsipan	108

Bab 4 Kegiatan Strategis 111

Bab 5 Publikasi 147

KEM & PPKF 2025	148
Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2023 (Buku 1 Dan Buku 2)	149
Laporan Perkembangan Ekonomi & Keuangan	150
Tinjauan Ekonomi, Keuangan, Dan Fiskal	151
Warta Fiskal	152
Tulisan Pegawai	153

PROFIL ORGANISASI

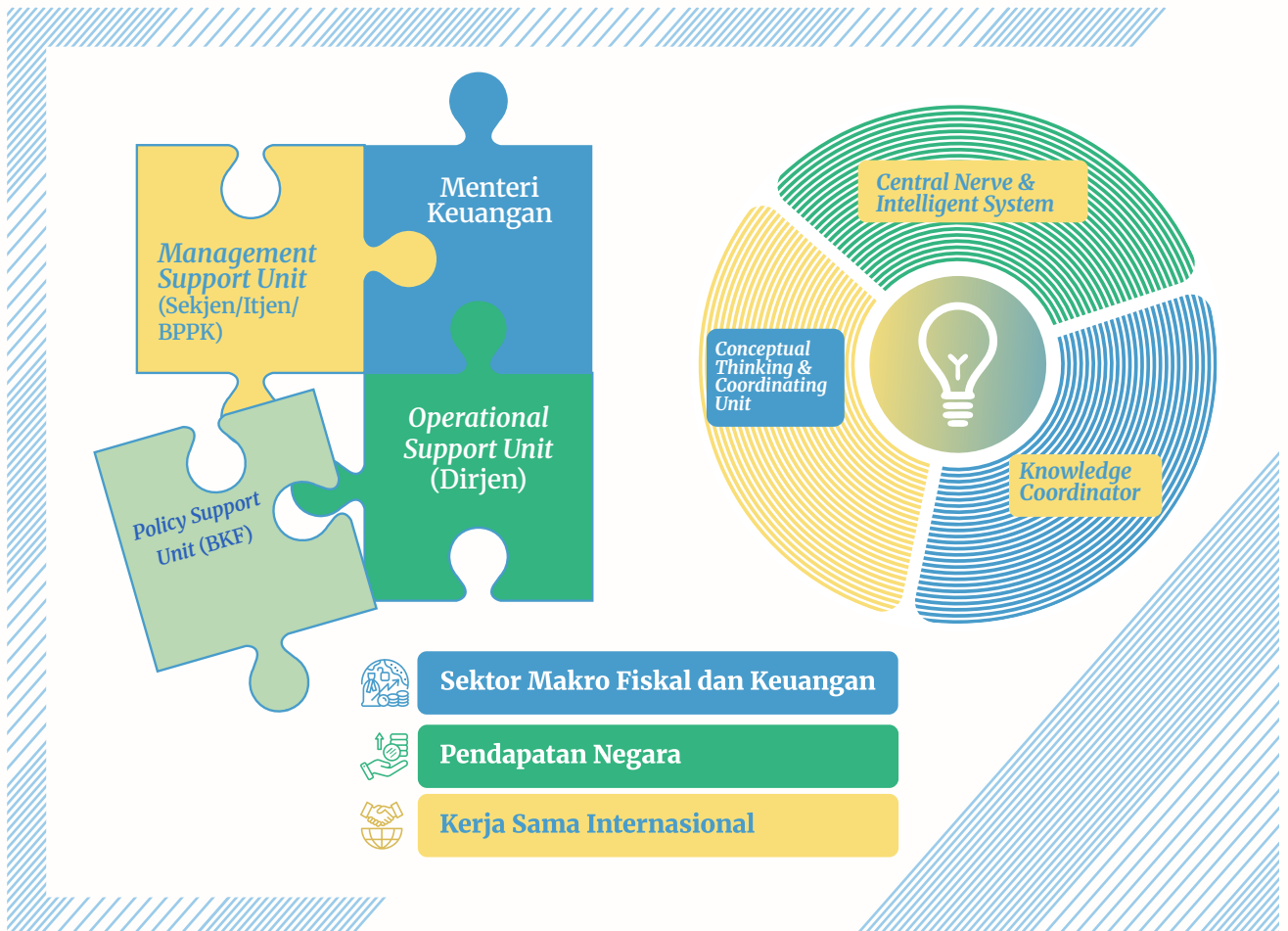
Apa, siapa, bagaimana Badan Kebijakan Fiskal dengan segala peran dan fungsinya sebagai organisasi kunci perumusan kebijakan ekonomi negara.



Badan Kebijakan Fiskal merupakan unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas menyusun rekomendasi kebijakan di bidang fiskal, sektor keuangan, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Penyusunan kebijakan dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan telaah teori yang relevan.

Sejak didirikan pada tahun 2006, Badan Kebijakan Fiskal awalnya memiliki enam unit Eselon II. Namun, seiring meningkatnya beban kerja dan bertambahnya fungsi, termasuk perumusan kebijakan sektor keuangan, struktur organisasi mengalami beberapa penyesuaian (pada tahun 2008, 2009, 2015, dan 2019). Saat ini Badan Kebijakan Fiskal memiliki tujuh unit Eselon II, yaitu:

1. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara,
2. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
3. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro,
4. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan,
5. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral,
6. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, dan
7. Sekretariat Badan.



Badan Kebijakan Fiskal berperan sebagai *Policy Support Unit* di lingkungan Kementerian Keuangan, yang bersifat melengkapi fungsi *Management Support Unit* (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) serta *Operational Support Unit* (Direktorat Jenderal).

Dalam posisi tersebut, peran Badan Kebijakan Fiskal dapat dikelompokkan menjadi area sebagai berikut:

1. *Conceptual Thinking & Coordinating Unit* (Unit Pemikir dan Koordinator Konseptual) Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan;
2. *Central Nerve & intelligent System* (Sistem Saraf Pusat dan Intelijen) Melaksanakan pemantauan (*monitoring*) dan pengawasan (*surveillance*) terhadap kondisi perekonomian terkini;
3. *Knowledge Coordinator* (Koordinator Pengetahuan) Melakukan riset dan diseminasi kebijakan, serta turut mendorong diskusi publik terkait isu fiskal, sektor keuangan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

Adapun area kebijakan yang menjadi domain Badan Kebijakan Fiskal adalah sektor makro fiskal dan keuangan, pendapatan negara, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kebijakan Fiskal didukung oleh tiga komponen utama organisasi, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Madya, Pejabat/Pegawai Struktural, dan Pejabat Fungsional yang berperan sentral dalam pelaksanaan tugas inti Badan Kebijakan Fiskal.

Badan Kebijakan Fiskal memiliki tiga proses bisnis utama sebagaimana berikut:

1. Formulasi Rekomendasi Kebijakan, yaitu seluruh kegiatan perumusan rekomendasi kebijakan yang meliputi kebijakan makro fiskal (ekonomi makro dan APBN), kebijakan sektor keuangan, dan kebijakan pendapatan negara, dan kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
2. Pengelolaan Kerja Sama Internasional, mencakup seluruh aktivitas pengelolaan hubungan kerja sama internasional dan pemberian dukungan teknis dalam kerangka kerja sama tersebut.
3. *Policy Knowledge Center*, Melaksanakan pengelolaan pengetahuan terkait perumusan kebijakan, seperti: pengelolaan *dashboard* dan penyusunan laporan perkembangan perekonomian, maupun edukasi publik, terutama terkait kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan Makro

seperti Kerangka Ekonomi Makro (KEM); Analisis proyeksi dan Pertemuan Rekomendasi terkait neraca pendapatan nasional, neraca pembayaran, ekonomi internasional, dsb.

Kebijakan Sektor Keuangan

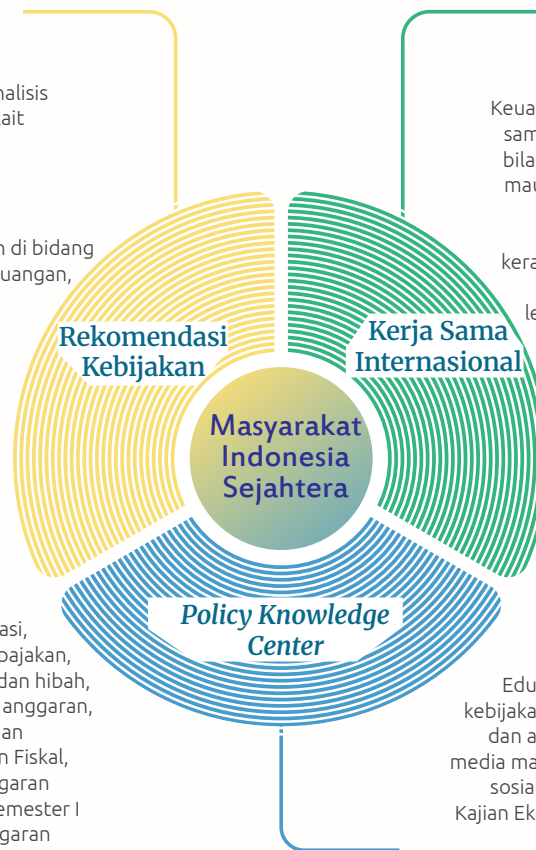
seperti Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang industri perbankan, non perbankan, jasa keuangan, keuangan syariah, keuangan inklusif, dsb.

Kebijakan Pendapatan Negara

seperti kebijakan insentif, tarif dalam rangka optimalisasi pendapatan negara, dan fasilitasi perdagangan internasional di bidang: pajak, kepabeanan dan cukai, serta perpajakan internasional, dsb.

Kebijakan Keuangan Negara (Fiskal)

seperti pelaksanaan analisis dan rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi penerimaan perpajakan, kebijakan penerimaan negara bukan pajak dan hibah, belanja pemerintah pusat dan pembiayaan anggaran, kebijakan belanja subsidi, kebijakan keuangan daerah, penyusunan pokok-pokok Kebijakan Fiskal, bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan.



Kerja Sama Internasional

Kerja sama ekonomi dan Keuangan Internasional baik kerja sama antar negara yang bersifat bilateral, regional, interregional, maupun multilateral, kerja sama internasional pendanaan perubahan iklim baik dalam kerangka PBB maupun non-PBB, serta kerja sama dengan lembaga keuangan/organisasi internasional lain.

Policy Knowledge Center

Edukasi Publik melalui sosialisasi kebijakan, dan diseminasi hasil kajian dan analisis. Publikasi Kebijakan di media massa, media elektronik, media sosial. Penerbitan buku dan jurnal Kajian Ekonomi Keuangan *Policy Brief* kepada pimpinan.

Badan Kebijakan Fiskal telah bertransformasi menjadi organisasi berbasis fungsional, yang lebih sesuai dengan karakteristik tugas di bidang analisis, penelitian, dan pengembangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada kepakaran, serta mendorong peningkatan kecepatan dan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

Tugas & Fungsi

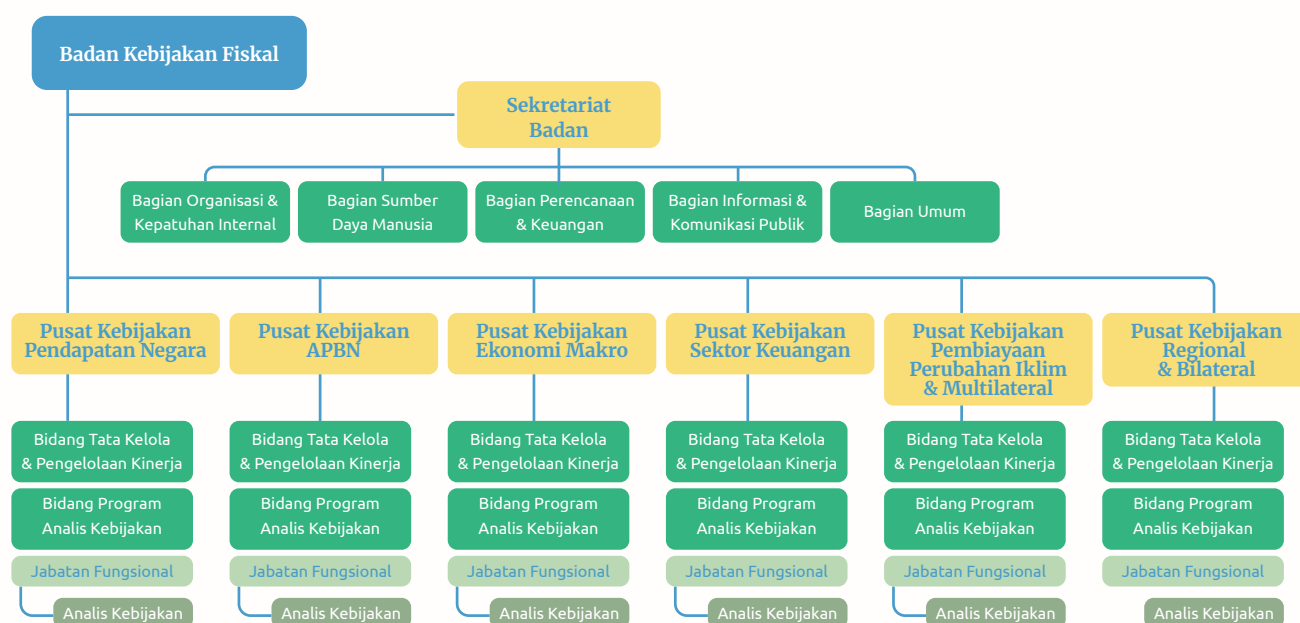
Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Kebijakan Fiskal melaksanakan sejumlah fungsi yang mencakup:

1. Penyusunan kebijakan teknis terkait subjek, objek, dan tarif perpajakan;
2. Penyusunan rencana dan program analisis serta rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan;

3. Penjalinan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang fiskal, sektor keuangan, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional; dan
5. Penyelenggaraan administrasi Badan Kebijakan Fiskal serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK 118/2021) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2023, dalam menjalankan tugas dan fungsi, Badan Kebijakan Fiskal didukung oleh 7 Unit Eselon II, 17 Unit Eselon III, 55 Unit Eselon IV, dan Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional yang melaksanakan proses bisnis inti (Analisis Kebijakan) dan jabatan fungsional yang melaksanakan proses bisnis pendukung (Arsiparis dan Pranata Keuangan APBN).



Sumber Daya Manusia

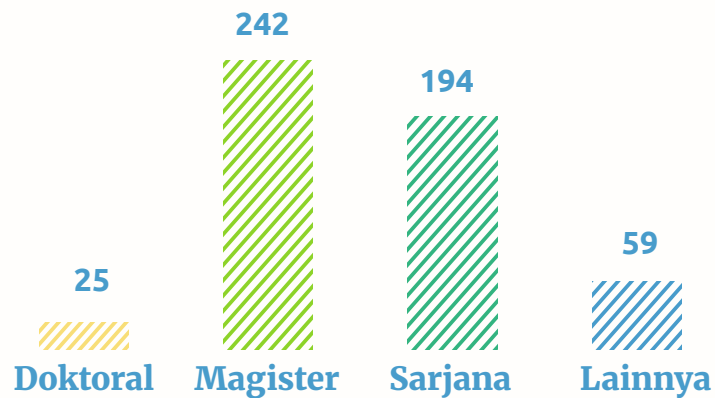
Pada tahun 2024, jumlah pegawai Badan Kebijakan Fiskal menurun dari 544 orang pada 2022 menjadi 520 pegawai, sejalan dengan kebijakan *zero-to-minus growth* yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Meski demikian, komposisi SDM Badan Kebijakan Fiskal tetap mencerminkan keragaman latar belakang, keahlian, dan pengalaman yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pegawai Badan Kebijakan Fiskal tersebar di tujuh unit Eselon II, dengan 56% terlibat langsung dalam proses bisnis utama dan 44% mendukung fungsi administratif.

Badan Kebijakan Fiskal juga terus mendorong kepemimpinan yang inklusif dan setara. Persentase kepemimpinan perempuan di Badan Kebijakan Fiskal telah mencapai 35% dari total pejabat struktural, melampaui target internal Kementerian Keuangan sebesar 30%. Dari sisi usia, mayoritas pegawai merupakan Generasi Milenial (usia 29-47 tahun) sebesar 71% pegawai. Selanjutnya, Generasi X (48-59 tahun) menyumbang 17%, sementara Generasi Z (di bawah 29 tahun) sebesar 12%. Komposisi lintas generasi ini memberikan keberagaman perspektif yang memperkaya proses perumusan kebijakan.

Komposisi Generasi



Komposisi Pendidikan



Latar belakang pendidikan pegawai menjadi salah satu fondasi utama dalam mendorong kualitas *output* organisasi. Saat ini, 46% pegawai Badan Kebijakan Fiskal berlatar belakang magister, 37% sarjana, dan 5% doktorat. Komposisi ini mencerminkan kapasitas sumber daya manusia yang berpengetahuan luas dan siap menghadapi tantangan ekonomi. Selain itu, 63% pegawai memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di bidangnya, yang semakin memperkuat ketangguhan organisasi. Dengan dominasi kelompok usia muda dan tingkat pendidikan yang tinggi, Badan Kebijakan Fiskal memiliki peluang untuk mempercepat pemanfaatan teknologi informasi, mengembangkan ide-ide baru, serta memperkuat budaya kerja kolaboratif. Ketiga aspek ini mendukung program penguatan budaya SATU Kemenkeu dan penerapan *collaboration tools* di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

Profil Pimpinan



Febrio Kacaribu, Ph.D
Kepala Badan

Lahir di Sidikalang, Sumatra Utara tahun 1978. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada 2002 dari Universitas Indonesia, dilanjutkan dengan gelar *Master of International & Development Economics* dari *Australian National University* di tahun 2005. Pada tahun 2014, Beliau memperoleh gelar Ph.D dari University of Kansas.

Menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM sejak tahun 2015 dan dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 3 April 2020. Bidang keahlian Beliau meliputi Ekonomi dan Proyeksi Bisnis, Model Ekonomi, Ekonomi Keuangan, Ekonomi Moneter, serta Analisis Kebijakan Publik.

Penghargaan:

- Top 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan 2021



Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E.
Sekretaris Badan

Lahir di Jakarta pada tahun 1974. Beliau menempuh pendidikan S1 Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan di Universitas Padjadjaran. Gelar sarjananya diraih pada 24 Mei 1997. Beliau melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia, kemudian meraih gelar Doktor dengan melanjutkan S3 Ekonomi Terapan di Universitas Padjadjaran tahun 2004.

Mengawali karir di Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Maret 1999, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Penyaringan di Biro Kepegawaian Bagian Pengembangan Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2004. Kemudian Beliau menjabat sebagai Kepala Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia pada tahun 2007. Pada tahun 2009 dipercaya sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia.

Pada tanggal 27 Maret 2013 dilantik menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan tanggal 23 September 2016 dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Beliau dilantik sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal pada tanggal 30 Desember 2021.

Penghargaan:

- Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
- Satya Lancana Karya Satya XX Tahun



Pande Putu Oka Kusumawardani, S.E.,
M.M., M.P.P., CA

Kepala Pusat Kebijakan
Pendapatan Negara (PKPN)

Lahir di Jakarta pada tahun 1977, Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, dan dilanjutkan dengan Program Magister dari universitas yang sama pada 2004. Selain itu, Beliau juga meraih gelar *Master of Public Policy* dari Universitas Hitotsubashi, Tokyo, pada 2009.

Beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Perpajakan Internasional Badan Kebijakan Fiskal, yang bertanggung jawab terhadap isu-isu perpajakan Internasional.

Diangkat sebagai Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan pada Desember 2019 dan ditunjuk sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada tanggal 13 Maret 2020.

Penghargaan:

- Satya Lancana Karya Satya XX Tahun



Wahyu Utomo, S.Sos, M.Si.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN)

Pria kelahiran 1970 ini mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Magister Ekonomi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006. Beliau juga pernah mengikuti beberapa workshop internasional seperti *Green Economics* (Seoul, Korea Selatan), *Toward Universal Healthcare* (Tokyo, Jepang), *Macroeconomic and Fiscal Policy* (Singapura), dan *Medium Term Budget Framework* (Bali, Indonesia).

Beliau sebelumnya bertugas sebagai Kepala Seksi di Kanwil Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2006-2007, lalu sebagai Kepala Subbidang di Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2008. Pada tahun 2015, Beliau diangkat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan Pusat Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara yang bertanggung jawab merancang strategi fiskal jangka panjang-menengah, perumusan kerangka kebijakan fiskal tahunan, kebijakan pembiayaan serta berbagai isu sektoral seperti perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, serta infrastruktur.

Pada tahun 2019, seiring dengan transformasi organisasi, Beliau diangkat menjadi analis kebijakan ahli madya dan menangani kebijakan makro fiskal. Pada Januari 2022, Beliau diamanatkan peran sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara pada tanggal 5 Mei 2023.

Penghargaan:

- Satya Lancana Karya Satya XXX Tahun



Alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini lahir di Sukabumi pada tahun 1972. Memperoleh gelar doktor di bidang Kebijakan Publik *Flinders University* pada tahun 2012. Sepuluh tahun sebelumnya Beliau meraih gelar *Master Ilmu Ekonomi di University Of Birmingham* pada tahun 2002.

Pria berdarah Sunda ini bergabung di Kementerian Keuangan sejak tahun 1994 pada Badan Akuntansi Keuangan Negara hingga tahun 2004 berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dua puluh tahun meniti karir di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terakhir menjabat sebagai Direktur pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Sejak September 2024 resmi menjadi Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal.

Penghargaan:

- Satya Lancana Karya Satya XXX Tahun
- Inovator Kementerian Keuangan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 Platform Integrasi Belanja Pemerintah melalui Digipay: Pemberdayaan UMKM dan Bangga Produk Indonesia



Dr. Adi Budiarmo, FCPA

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK)

Lahir di Salatiga pada tahun 1970, pria ini meraih gelar Diploma IV STAN pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 2001, Beliau berhasil memperoleh gelar *Master of Accounting* dari *University of Southern California*, dilanjutkan dengan gelar *Doctor of Business Administration* dari *University of Canberra* di tahun 2014.

Mengawali karir sebagai pelaksana di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan pada tahun 1990. Beliau pernah menjabat sebagai *Chief Central Transformation Office (CTO)* Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2014-2018. Beliau juga mengemban amanat sebagai Sekretaris Kerja Panitia Nasional 2018 *Annual Meetings IMF-World Bank Group* 2018. Pada tahun XXX beliau ditunjuk sebagai Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal. Pada tanggal 24 Agustus 2020, Beliau dilantik menjadi Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.

Penghargaan:

- Satya Lancana Karya Satya XX Tahun



Boby Wahyu Hernawan, S.E., M.Com., DBA.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM)

Lahir di Lumajang pada tahun 1975, Beliau merupakan Sarjana Diploma III Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1996 yang melanjutkan pendidikan Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi tahun 2000. Kemudian Beliau meraih gelar *Master of Commerce* dari *University of Queensland* pada tahun 2004 serta gelar *Doctor of Business Administration (DBA)* dari *Victoria University* pada tahun 2017.

Beliau mengawali karier di Kementerian Keuangan sejak tahun 1995 pada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Selanjutnya pada tahun 2015, mengawali karier di Badan Kebijakan Fiskal sebagai Kepala Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan. Pada tahun 2019, Beliau diangkat menjadi Atase Keuangan Perwakilan Republik Indonesia untuk negara Uni Emirat Arab dan berkantor di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. September 2023, dilantik sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral di Badan Kebijakan Fiskal.

Penghargaan:

- Satya Lancana Karya Satya XX Tahun



Yogi Rahmayanti, S.E., S.S.T, Ak., M.P.P., Ph.D.

Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB)

Wanita kelahiran Mojoroto, Kediri pada tahun 1975 ini merupakan sarjana Diploma IV STAN pada tahun 2002, yang melanjutkan S2 di *Hitotsubashi University* tahun 2005 dengan gelar *Master of Public Policy and Management*. Di tahun 2014, Beliau memperoleh gelar *Doctor of International Public Policy* dari *Osaka University*.

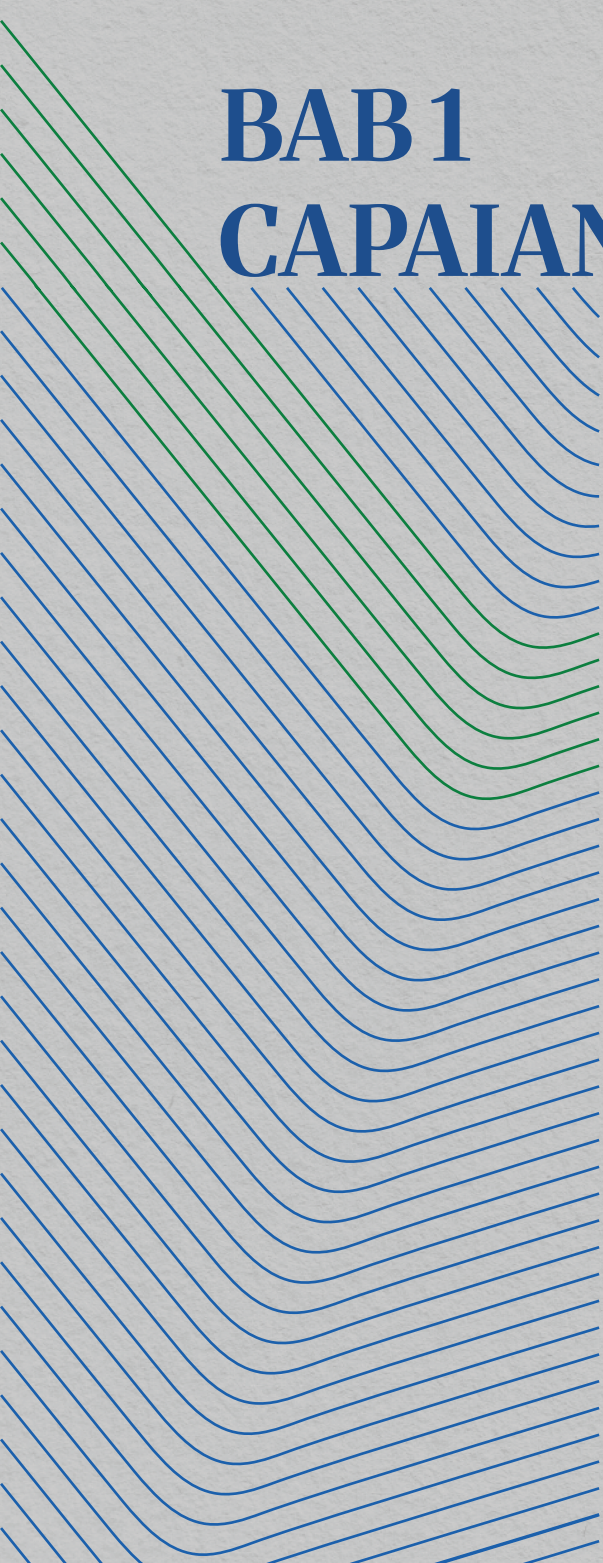
Mengawali karir di Kementerian Keuangan pada 1996 di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Beliau pernah menjabat Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I tahun 2013, dan Kepala Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I tahun 2015.

Beliau kemudian menjabat sebagai Kepala Bidang Analisis dan Harmonisasi Belanja dan Kekayaan Negara, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal tahun 2019. Sejak 16 Juni 2023, dilantik sebagai Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal.

Penghargaan:

- Satya Lancana Karya Satya XX Tahun

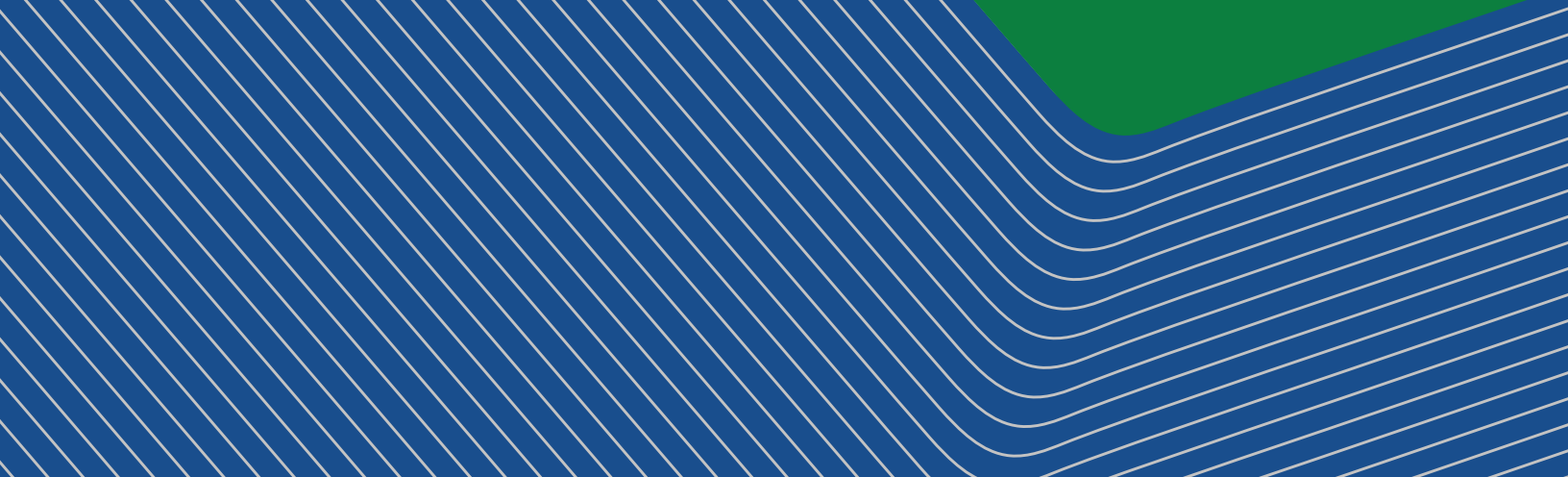




BAB 1

CAPAIAN UTAMA

Torehan membanggakan Badan Kebijakan Fiskal sepanjang 2024, dalam kontribusinya yang memberi dampak signifikan guna mengawal APBN.

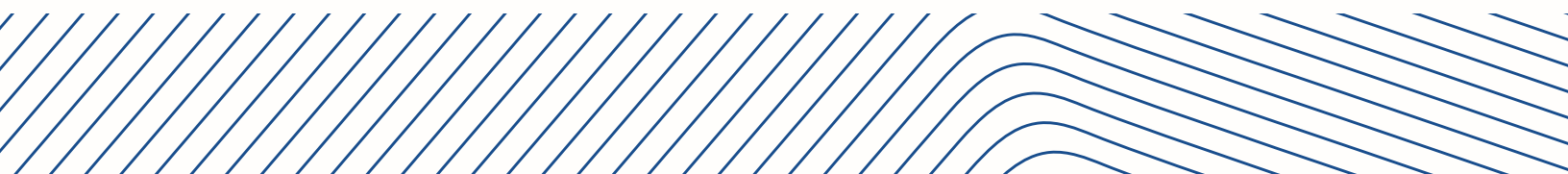


Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

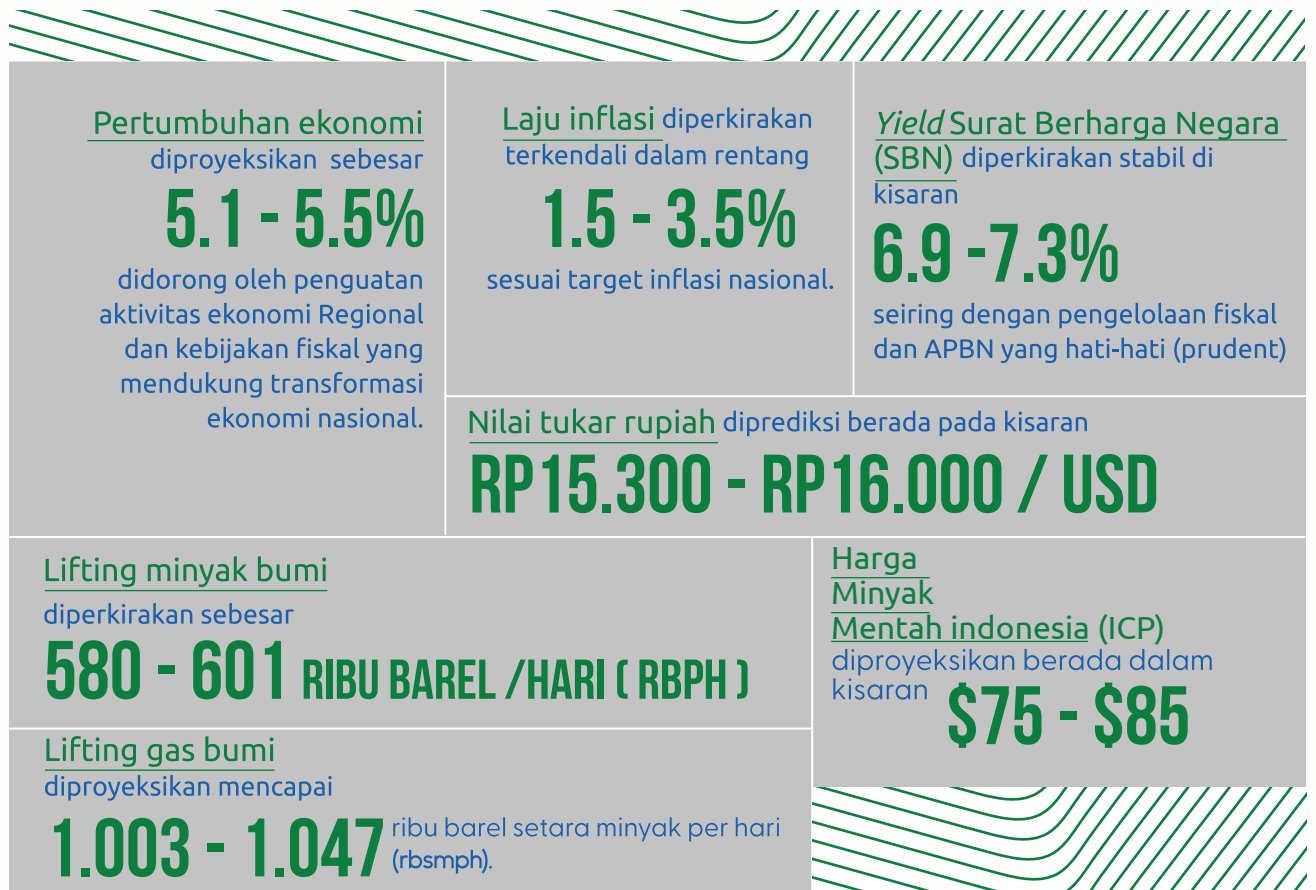
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) merupakan dokumen resmi negara yang disusun oleh Pemerintah sebagai dasar pembicaraan awal dalam penyusunan Rancangan APBN. Setelah dibahas bersama DPR RI, dokumen ini menjadi landasan utama dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN. Penyusunannya diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang MD3 yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

KEM PPKF 2025 tidak hanya berperan sebagai dokumen penganggaran, tetapi juga sebagai arah kebijakan fiskal Pemerintah untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional, khususnya RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan RKP 2025. Dokumen ini mencakup analisis menyeluruh atas kondisi ekonomi, sosial, dan fiskal sebagai landasan penyusunan APBN 2025. Dalam penyusunannya, Pemerintah mempertimbangkan dinamika dan prospek ekonomi global serta domestik, termasuk berbagai tantangan dan peluang ke depan. Dalam menghadapi ketidakpastian global, kebijakan fiskal 2025 diarahkan pada keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menjaga keberlanjutan APBN. Tema KEM PPKF 2025 mencerminkan hal tersebut, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

**“AKSELERASI
PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG
INKLUSIF DAN
BERKELANJUTAN”**



Pemerintah mengusulkan indikator ekonomi makro tahun 2025 sebagai berikut:



Pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah program unggulan, seperti hilirisasi sumber daya alam, peningkatan investasi yang berorientasi ekspor, serta transformasi menuju ekonomi hijau. Untuk mendukung langkah tersebut, kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi pendapatan negara tanpa mengganggu iklim investasi dan keberlangsungan dunia usaha, peningkatan kualitas belanja negara yang lebih efisien dan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan pemerataan, serta pengelolaan pembiayaan secara hati-hati, inovatif, dan berorientasi jangka panjang.

Kebijakan fiskal tahun 2025 memiliki arti strategis karena disusun oleh pemerintahan yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya. Oleh karena itu, substansi kebijakan tersebut menekankan kesinambungan program-program prioritas yang sudah berjalan, sekaligus memperkuat arah kebijakan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju. Dalam situasi global yang masih penuh ketidakpastian, kebijakan fiskal juga diharapkan mampu menjaga peran APBN sebagai instrumen peredam kejutan (*shock absorber*) yang melindungi perekonomian nasional dari dampak eksternal yang tidak terduga.

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

Pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan strategi Pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata menuju Indonesia Emas 2045. Dalam rangka mendukung pengembangan IKN sebagai kota berkelanjutan dan pusat ekonomi masa depan, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 28 Tahun 2024 tentang pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan di IKN. Fasilitas ini menjadi insentif penting untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di IKN sebagai pusat aktivitas nasional yang baru.



Fasilitas yang diatur dalam PMK:

1 *Tax Holiday*

- Untuk penanaman modal di IKN dan Daerah Mitra
- Untuk pemindahan kantor pusat atau kantor regional ke IKN
- Bagi kegiatan sektor keuangan di pusat keuangan (*financial center*) IKN

4 PPh UMKM

- Tarif 0% dan final

2 *Super Deduction*

- Untuk kegiatan vokasi industri
- Untuk kegiatan penelitian dan pengembangani
- Atas sumbangan untuk fasilitas umum dan sosial

5 PPN

- Tidak dipungut atas barang dan jasa strategis

3 PPh Pasal 21

- Ditanggung Pemerintah bagi pegawai yang tinggal dan bekerja di IKN

6 Bea Masuk

- Pembebasan bea masuk untuk barang impor oleh Pemerintah guna kepentingan umum
- Pembebasan bea masuk atas barang impor untuk keperluan penanaman modal

Pengenaan Pajak Minimum Global berdasarkan Kesepakatan Internasional

Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan bagian dari pelaksanaan pajak minimum global yang menjadi komitmen internasional dan telah didukung oleh lebih dari 140 negara di dunia, dengan lebih dari 50 negara yang telah mengumumkan penerapannya. Ketentuan pajak ini tidak berlaku bagi pengusaha kecil dan orang pribadi, sehingga hanya menyasar entitas berskala besar. Subjek pajak yang dikenakan adalah Entitas Konstituen dalam grup perusahaan multinasional yang memiliki omzet global paling sedikit EUR750 juta dalam dua dari empat tahun sebelum tahun pengenaan pajak. Sementara itu, sejumlah entitas dikecualikan dari pengenaan pajak ini, seperti badan pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, entitas dana pensiun, serta entitas dana investasi dan entitas dana investasi *real estate* yang merupakan Entitas Induk Utama. Pajak minimum global ini ditetapkan dengan tarif sebesar 15%.

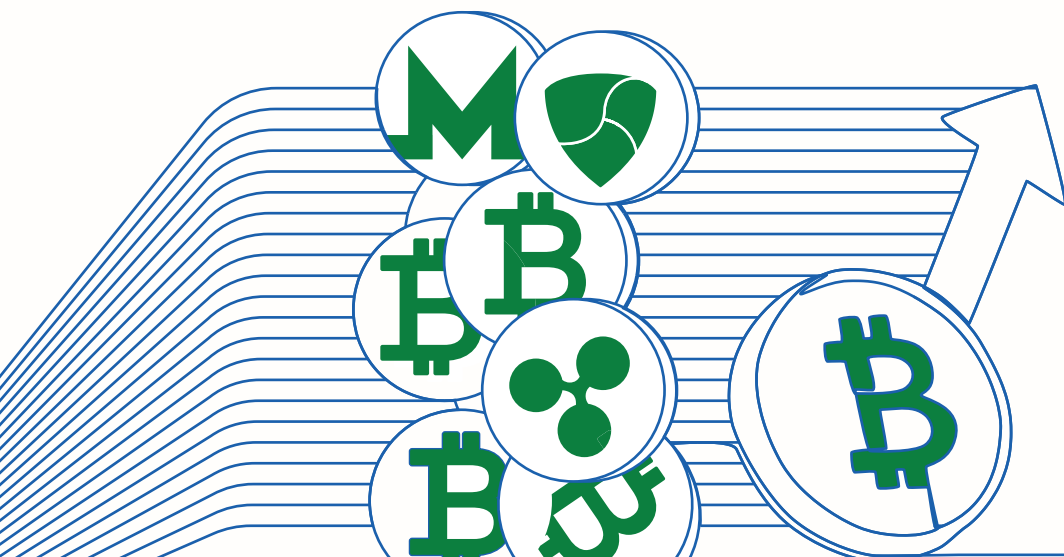


Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), termasuk aset keuangan digital dan aset kripto. Berdasarkan Pasal 312 ayat (1) UU PPSK, kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap aset keuangan digital dan derivatif keuangan akan beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK dan Bank Indonesia paling lambat 12 Januari 2025, dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Sebagai tindak lanjut amanat tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 pada 31 Desember 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital, Termasuk Aset Kripto Dan Derivatif Keuangan. Dalam penyusunan peraturan ini, telah dilakukan *meaningful participation* atau konsultasi publik pada 5 Juni 2023 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pokok-pokok pengaturan dalam PP ini mencakup mekanisme peralihan tugas dari Bappebti kepada OJK dan/atau BI, koordinasi antarlembaga selama dan setelah proses peralihan, serta pengaturan mengenai pembentukan tim transisi.



Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Tatanan Kerja Sama Internasional

Dalam menghadapi perubahan lanskap ekonomi global yang semakin cepat pascapandemi COVID-19, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, dinamika geopolitik, serta transisi menuju ekonomi berkelanjutan, Indonesia menjalankan berbagai strategi kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Langkah ini dilakukan untuk merespons tantangan global secara kolektif dengan semangat multilateralisme. Badan Kebijakan Fiskal turut mendukung strategi tersebut melalui penguatan peran dan posisi Indonesia dalam tatanan global. Sejumlah capaian menunjukkan peningkatan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama internasional, yang mencerminkan komitmen aktif dalam memperkuat kolaborasi ekonomi dan diplomasi keuangan global, antara lain:

Persetujuan bagi Proposal Indonesia untuk Memperoleh Dana Pandemi



Governing Board Pandemic Fund (GB PF) menyelenggarakan pertemuan ke-14 pada 17–18 Oktober 2024 di Washington D.C., Amerika Serikat. Dalam forum tersebut, GB PF menyetujui alokasi hibah putaran kedua (*2nd Call for Proposals/CFP*) sebesar USD418 juta bagi 40 negara berpenghasilan rendah dan menengah di enam kawasan dunia untuk memperkuat sistem pengawasan penyakit, laboratorium, dan tenaga kesehatan dalam mendukung *Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPR)*. Alokasi ini melengkapi hibah sebelumnya senilai USD128,89 juta yang disetujui pada 19 September 2024 untuk

lima proyek di sepuluh negara Afrika terdampak wabah Mpox. Dengan total pendanaan mencapai USD547 juta, dukungan ini diproyeksikan memobilisasi tambahan hingga USD4 miliar sebagai katalis global.

Indonesia menjadi salah satu negara penerima hibah dengan nilai pendanaan sebesar USD24,9 juta—proposal tertinggi skornya di antara seluruh negara pemohon pada putaran kedua. Proyek yang diusulkan berdurasi tiga tahun dan mencakup:

- a. Pembentukan *OneHealth Laboratory Network* untuk meningkatkan efisiensi laboratorium dalam mendeteksi patogen berpotensi epidemi.
- b. Penyusunan peraturan nasional terkait *Security Sensitive Biological Agents* (SSBA) untuk laboratorium kesehatan manusia dan hewan.
- c. Pembentukan *OneHealth Surveillance Network* guna meningkatkan frekuensi pelaporan dari unit kesehatan.
- d. Penguatan kapasitas komunikasi risiko yang efektif.
- e. Penyusunan *Contingency Plan for Health Emergency Management* beserta latihan simulasi multisektoral.
- f. Peningkatan penerapan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kapasitas *International Health Regulation* (IHR) dan pengembangan pengawasan berbasis komunitas dalam kerangka *OneHealth*.

Proyek ini dilaksanakan oleh *Implementing Entities* yaitu *World Bank* (WB), *World Health Organization* (WHO), dan *Food and Agriculture Organization* (FAO), dengan dukungan berbagai kementerian/lembaga nasional seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta BRIN.

Penguatan Komitmen Indonesia menjadi Negara Donor pada *International Development Association 21st Replenishment (IDA21)*

International Development Association (IDA) merupakan salah satu institusi dalam *The World Bank Group (WBG)* yang bertugas membantu negara-negara berpenghasilan rendah melalui pemberian hibah atau pinjaman jangka panjang 30-50 tahun) tanpa bunga (*interest-free loan*) atau dengan bunga sangat rendah. Tujuan utama IDA adalah mendukung proyek atau program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Indonesia telah menjadi anggota IDA sejak 1968, dan berstatus sebagai *graduate country* sejak 2008. Selama menjadi anggota aktif, Indonesia menerima 77 pinjaman dengan nilai total USD2,87 miliar, suku bunga tetap sebesar 0,75%, dan tenor antara 30 hingga 40 tahun tanpa biaya tambahan.

Sejak pengumpulan dana (*replenishment*) IDA ketiga (IDA3), Indonesia menyatakan komitmen sebagai donor. Per 30 Juni 2024 Indonesia memiliki 270.358 suara atau setara dengan 0,85 persen *voting power*, menempatkan Indonesia di posisi ke-23 dalam daftar pemegang saham (*shareholding*) IDA. Komitmen ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam mendukung program-program WBG bagi negara-negara miskin dan memperkuat citra positif Indonesia di panggung global.

Dukungan Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*

Pemerintah Indonesia telah menetapkan aksesi sebagai anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* sebagai salah satu Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2024–2029. Untuk mempersiapkan proses tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Timnas OECD). Dalam struktur Timnas OECD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertindak sebagai Ketua Pelaksana, dengan didukung oleh Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri sebagai Wakil Ketua Pelaksana. Sekretariat Timnas dipimpin oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian sebagai Ketua Sekretariat, didampingi beberapa Wakil Ketua Sekretariat, termasuk Kepala

Badan Kebijakan Fiskal.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Timnas OECD, Menko Perekonomian menerbitkan Keputusan Nomor 232 Tahun 2024 yang menunjuk sejumlah menteri dan pimpinan K/L sebagai penanggung jawab atas 26 bidang kebijakan. Dalam hal ini, Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan ditugaskan untuk mengoordinasikan empat bidang kebijakan, yaitu:

1. Bidang Kebijakan Fiskal (*Fiscal Affairs*), yang mencakup isu perpajakan;
2. Bidang Kebijakan Penganggaran (*Senior Budget Officials*);
3. Bidang Pasar Keuangan (*Financial Market*); dan
4. Bidang Asuransi dan Pensiun (*Insurance and Private Pensions*).



Sebagai bagian dari peran tersebut, Badan Kebijakan Fiskal telah aktif dalam berbagai kegiatan persiapan dan percepatan akses Indonesia ke OECD, antara lain:

Penetapan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 389 Tahun 2024

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Timnas OECD, Menteri Keuangan membentuk tim kerja yang beranggotakan para pegawai/pejabat dari sejumlah unit eselon I dan *Special Mission Vehicle* (SMV) di lingkungan Kementerian Keuangan melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam Mendukung Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia di OECD. Dalam tim ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal ditetapkan sebagai Ketua, sedangkan Sekretaris Jenderal sebagai Wakil Ketua.

Partisipasi pada Pertemuan OECD *Ministerial Council Meeting* (MCM)

Menteri Keuangan menghadiri OECD *Ministerial Council Meeting* (OECD MCM) pada 2–3 Mei 2024 di Paris, Prancis. Pertemuan tahunan ini dihadiri oleh negara anggota dan mitra

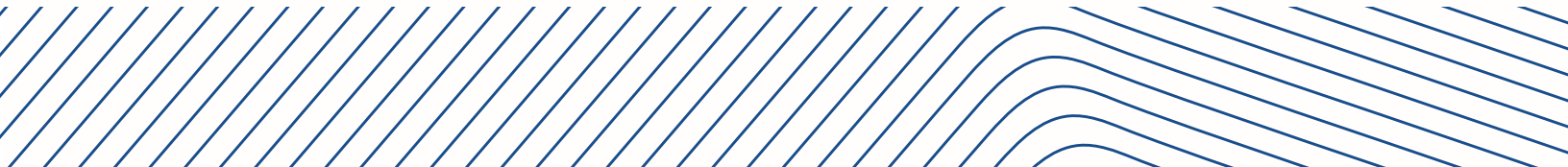
utama OECD untuk membahas agenda global terkini, prioritas kerja OECD ke depan, serta perkembangan proses aksesinya sejumlah negara calon anggota.

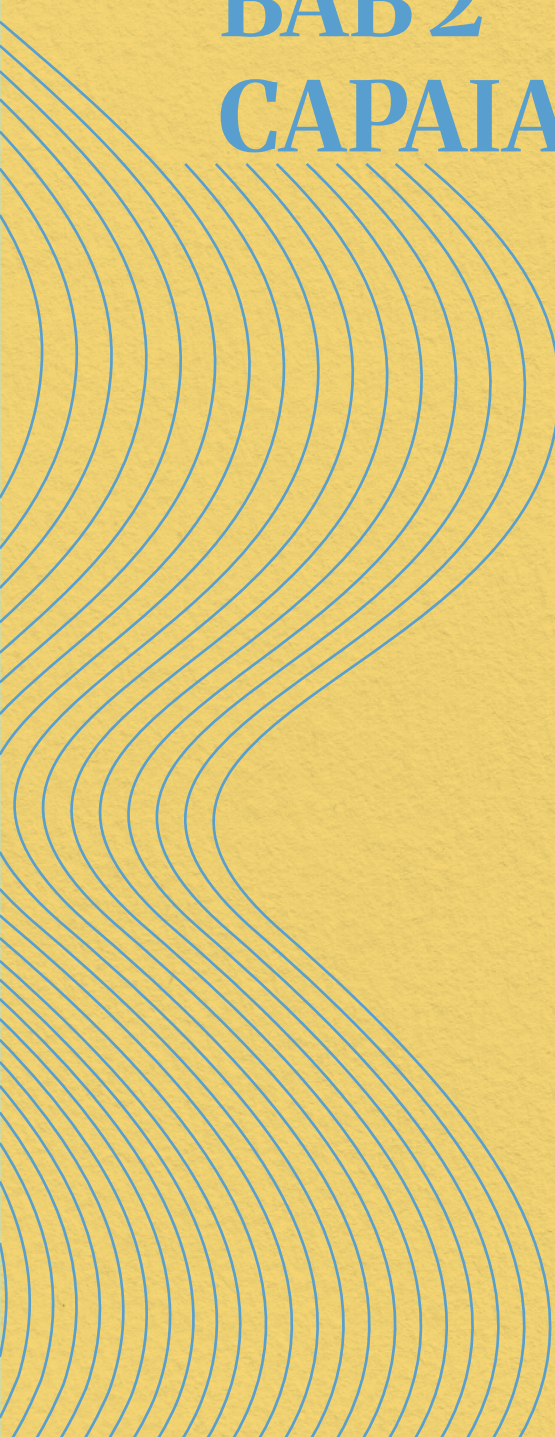
Dalam pertemuan tersebut, OECD secara resmi menyerahkan dokumen *Roadmap for the OECD Accession Process of Indonesia* (Peta Jalan Aksesinya Indonesia), yang sebelumnya telah disetujui secara tertulis oleh Dewan OECD pada 29 Maret 2024. Dokumen ini memuat proses, persyaratan, dan ketentuan yang harus dilalui Indonesia dalam setiap tahapan diskusi aksesinya.

Di sela-sela forum tersebut, Menteri Keuangan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Menteri Perdagangan, dan Duta Besar RI untuk Prancis juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD untuk membahas perkembangan kerja sama Indonesia–OECD dan langkah strategis dalam pelaksanaan Peta Jalan Aksesinya.

***Technical Visit* Delegasi RI ke Kantor Pusat OECD**

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, terdapat sekitar 47 standar OECD yang relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Untuk mendukung peran strategis Kemenkeu dalam proses persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia di OECD, dilakukan kunjungan teknis ke kantor pusat OECD pada 29–31 Oktober 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teknis para pejabat dan pegawai Kemenkeu mengenai persyaratan aksesinya, serta membangun koordinasi dengan mitra kerja di OECD. Selama kunjungan tersebut, Delegasi Republik Indonesia melakukan sejumlah pertemuan penting, antara lain dengan unit-unit teknis OECD yang menangani isu aksesinya, *Committee on Financial Market*, dan *Economic Department* OECD terkait rencana peluncuran OECD *Economic Survey of Indonesia*. Delegasi juga melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan Brasil untuk mempelajari *lesson learnt* dari proses aksesinya negara tersebut, serta dengan perwakilan Australia untuk memperkuat kerja sama dan berbagi pengalaman dalam kerangka keanggotaan OECD.





BAB 2

CAPAIAN UMUM

Bukti nyata Badan Kebijakan Fiskal melalui kiprahnya di berbagai kancan nasional maupun global, mencakup urusan rumah tangga negara hingga pergaulan dunia.

EKONOMI MAKRO & APBN

Sepanjang tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global yang terus berubah. Kinerja makroekonomi tetap solid, didukung oleh konsumsi domestik, ekspor strategis, serta investasi yang berangsur pulih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 menjadi instrumen utama untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat fondasi transformasi ekonomi. Melalui belanja yang terarah dan pengelolaan fiskal yang hati-hati, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara stimulus dan konsolidasi fiskal. Secara keseluruhan, APBN 2024 merefleksikan komitmen Indonesia untuk tumbuh lebih inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

Pemantauan dan Pengendalian Inflasi

Inflasi sepanjang tahun 2024 tercatat terkendali di level 1,57% (yoy), melandai signifikan dibandingkan akhir 2023 yang sebesar 2,61% (yoy), terutama karena normalisasi harga pangan. Inflasi inti menunjukkan penguatan seiring daya beli yang tetap tinggi, mencapai 2,26% (yoy). Sementara itu, inflasi harga bergejolak hanya 0,12% (yoy), dan inflasi harga yang diatur Pemerintah turun menjadi 0,56% (yoy). Kondisi ini mencerminkan efektivitas sinergi kebijakan pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID.

Kementerian Keuangan berperan aktif dalam TPIP–TPID, dengan Badan Kebijakan Fiskal sebagai Ketua Pokja Pusat yang menjalankan strategi pengendalian inflasi melalui empat pilar kebijakan 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Badan Kebijakan Fiskal juga terlibat dalam berbagai agenda strategis, seperti Rakornas TPIP, penilaian TPID *Awards*, dan penyusunan laporan serta *tagging* inflasi dalam APBN dan APBD.

Sebagai bagian dari penguatan kebijakan jangka menengah, Pemerintah menetapkan sasaran inflasi 2025–2027 sebesar $2,5\% \pm 1\%$ melalui PMK No. 31/PMK.010/2024. Sasaran ini menjadi acuan kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas harga guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini mengatur pemberian konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas. Ruang lingkup pengaturan mencakup ketentuan mengenai pemberi dan penerima konsesi, besar dan jenis konsesi, pemberi dan penerima insentif, tata cara pemberian insentif, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

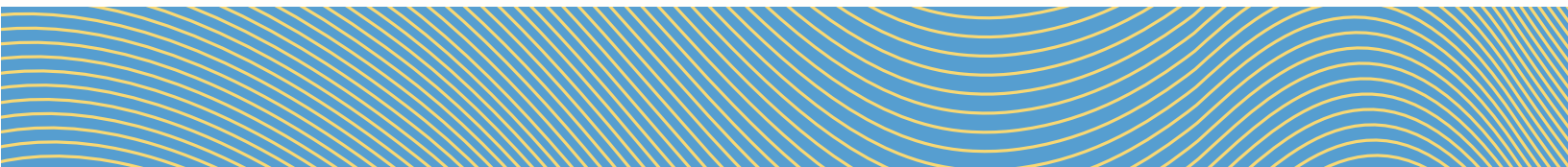
Konsesi dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD, serta didorong keterlibatan pihak swasta. Penerima konsesi adalah penyandang disabilitas yang memiliki Kartu Penyandang Disabilitas, dengan cakupan sembilan sektor layanan seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Besaran konsesi minimal sebesar 20%, dan dapat lebih besar bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pendamping, khususnya di sektor transportasi, pariwisata, dan olahraga.

Insentif diberikan kepada perusahaan swasta yang memberikan konsesi, mempekerjakan penyandang disabilitas, atau menyelenggarakan jasa wisata yang ramah disabilitas. Bentuk insentif dapat berupa apresiasi, promosi, kemudahan perizinan, fasilitas kerja yang aksesibel, atau bentuk lainnya sesuai kebijakan.

Proses harmonisasi RPP yang berlangsung panjang ini melibatkan banyak Kementerian/Lembaga (K/L), diantaranya: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Badan Layanan Umum Kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Sosial.

Penyusunan Regulasi tentang Kurs Pajak

Dalam rangka mendukung pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, serta Pajak Penghasilan atas pemasukan barang dan penghasilan dalam bentuk valuta asing, Badan Kebijakan Fiskal memiliki tugas reguler untuk menyusun Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai Nilai Kurs. KMK ini bertujuan memberikan informasi yang akurat dan terkini terkait nilai tukar atau kurs pajak yang berlaku dalam periode waktu tertentu (mingguan). Sepanjang tahun 2024, telah diterbitkan sebanyak 53 KMK mengenai Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, serta Pajak Penghasilan.



Investor Relation Unit dan Lembaga Rating (IRU)

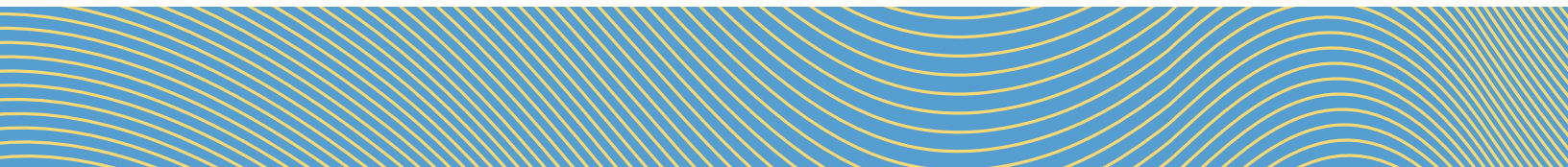
Investor Relations Unit (IRU) dibentuk untuk menjaga dan meningkatkan persepsi positif investor terhadap perekonomian Indonesia melalui komunikasi dan dialog aktif. IRU Badan Kebijakan Fiskal merupakan bagian dari *Investor Relations Unit* Republik Indonesia (IRU-RI), hasil kerja sama lintas institusi yang bertujuan mengoordinasikan komunikasi kebijakan ekonomi serta merespons berbagai *concern investor*. Anggotanya meliputi Bank Indonesia, BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan BPS, dengan koordinasi dipimpin oleh Bank Indonesia.

Tujuan utama IRU-FPA meliputi:

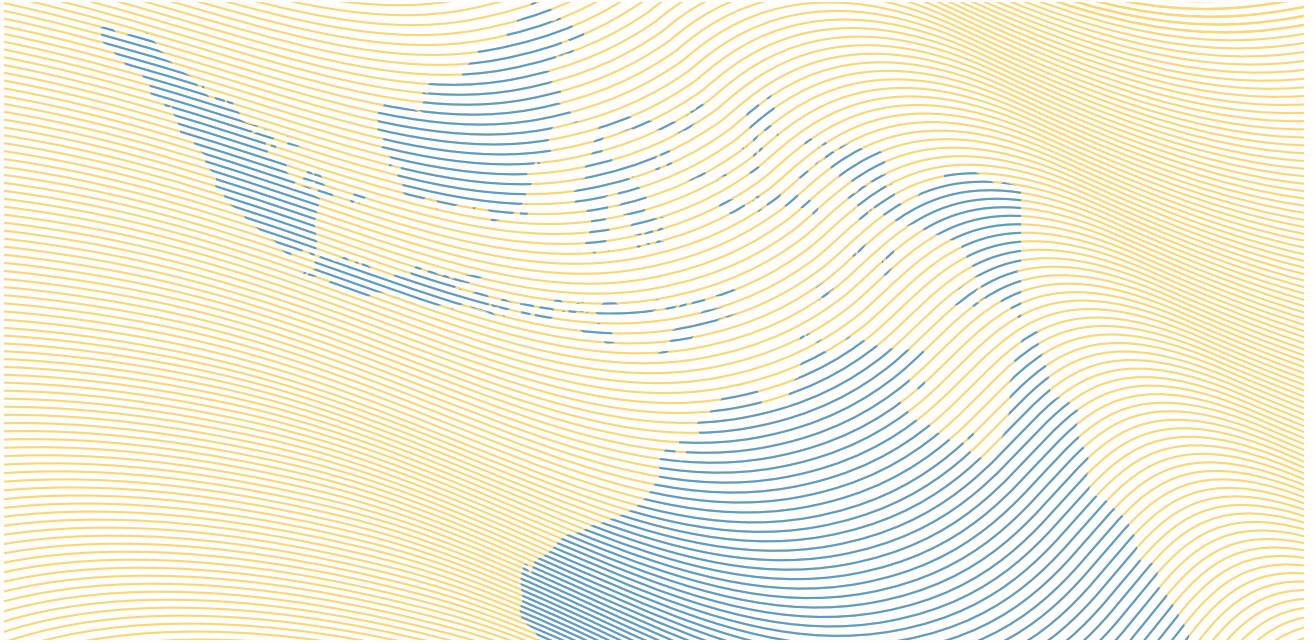
1. Menyampaikan informasi ekonomi dan kebijakan fiskal melalui *roadshow*, forum investor, dan *teleconference*.
2. Menjaga persepsi positif investor secara berkelanjutan.
3. Membangun komunikasi langsung antara tim IRU dan investor.
4. Memperkuat koordinasi dengan seluruh anggota IRU-RI.

Selama tahun 2024, capaian tim IRU Badan Kebijakan Fiskal diantaranya mencakup:

1. Menerima 50 kunjungan investor serta menghadiri berbagai forum investor, baik secara langsung maupun daring.
2. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi untuk kunjungan tiga lembaga pemeringkat utama (*Fitch*, *Moody's*, dan *S&P*) dalam rangka asesmen *Sovereign Credit Rating* (SCR) Indonesia.
3. Menyelenggarakan dua forum analisis untuk mendiseminasikan kebijakan fiskal terkini kepada pelaku pasar.
4. Berpartisipasi aktif dalam *Dedicated Team Meeting* (DTM) IRU-RI pada Januari dan November 2024.
5. Berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pelaksanaan *Investor Conference Call* (ICC) yang rutin diselenggarakan setiap bulan.
6. Mengelola laman web IRU Badan Kebijakan Fiskal dengan rutin mengunggah informasi dan dokumen terkait perkembangan ekonomi serta kebijakan terkini.



Preliminary Focus Group Discussion (FGD) Indonesia–Australia High Level Policy Dialogue 2024 (HLPD)



Pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah Krisis Keuangan Asia masih lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada 2045, Indonesia perlu menjaga laju pertumbuhan minimal 6% per tahun. Namun, tantangan struktural seperti keterbatasan kualitas SDM, infrastruktur, dan tata kelola masih menjadi hambatan utama. Di saat yang sama, ketimpangan pembangunan antar wilayah menuntut peran kebijakan industri dan fiskal yang lebih strategis untuk memperkuat daya saing daerah.

Dalam konteks tersebut, *High-Level Policy Dialogue* (HLPD) 2024 diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mengidentifikasi kebijakan untuk mengatasi hambatan struktural.
2. Mengeksplorasi sektor potensial sebagai pendorong pertumbuhan wilayah.
3. Merumuskan strategi percepatan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Keuangan serta mempererat kerja sama ekonomi dan keuangan Indonesia–Australia.

Pada 2024, PKEM bekerja sama dengan Prospera dan Indonesia *Project* menggelar *pre-heating HLPD* di Palembang, Semarang, dan Ambon untuk merumuskan isu-isu utama HLPD dari berbagai perspektif. Hasil utama dari ketiga lokasi adalah:

1. Sumatera: Ekonomi didominasi sektor pertanian dan pertambangan yang rentan terhadap volatilitas global dan perubahan iklim. Sektor jasa tumbuh pesat, namun sektor pertanian menghadapi tantangan dalam tata kelola, SDM, dan logistik.

2. Maluku: Bergantung pada sektor primer (pertambangan dan perikanan). Pertumbuhan kuat, tetapi kemiskinan tinggi. Tantangan utama mencakup akses pasar, infrastruktur, SDM, teknologi, dan keberlanjutan.
3. Jawa Tengah: Basis ekonomi manufaktur cenderung stagnan. Dihadapkan pada risiko bencana, konektivitas terbatas, regulasi kompleks, ICOR tinggi, dan logistik mahal. Relokasi industri butuh dukungan ekosistem dan efisiensi struktural.

Kajian dan Analisis

Penguatan *Linkage* Antara UMKM dan Industri Besar dalam Rangka Mendorong produktivitas, Daya Saing, dan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Di tengah dinamika perekonomian global, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi tantangan tersendiri. Target pertumbuhan sebesar 5,2% pada 2024 memerlukan strategi yang tepat, salah satunya dengan mengoptimalkan kontribusi sektor industri pengolahan (manufaktur) sebagai sektor strategis.

Industri manufaktur memiliki beragam subsektor yang saling terhubung. Untuk memperkuat kemitraan dengan UMKM secara efektif dan terarah, perlu dilakukan identifikasi subsektor prioritas berdasarkan kontribusi terhadap ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tren global, serta peran dalam rantai pasok.

Beberapa subsektor telah menunjukkan keterkaitan kuat dengan UMKM. Industri makanan dan minuman, misalnya, melibatkan UMKM baik sebagai pemasok bahan baku di sisi hulu (sektor pertanian), maupun sebagai distributor di sisi hilir. Industri elektronik dan otomotif juga memiliki potensi besar untuk menjalin kemitraan dengan UMKM, seiring meningkatnya permintaan domestik dan kemajuan teknologi.

Untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi, penguatan keterkaitan (*linkage*) antara UMKM dan industri besar perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, daya saing, dan adaptasi terhadap tren ekonomi berkelanjutan. Penerapan praktik ramah lingkungan (*green practices*) dalam operasional UMKM menjadi salah satu langkah strategis yang mendukung transformasi menuju ekonomi hijau.

Kemitraan antara UMKM dan industri manufaktur diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global. Dampak yang ditargetkan meliputi efisiensi rantai pasok, peningkatan nilai tambah, transfer teknologi dan inovasi, perluasan akses pasar, penguatan ekosistem ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja. Strategi kemitraan ini harus mendorong pertumbuhan industri sekaligus pemberdayaan UMKM sebagai penggerak perekonomian nasional.

Secara lebih detail kajian ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah:

1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi usaha kecil untuk naik kelas menjadi usaha menengah.
2. Menganalisis daya saing UMKM Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya.
3. Menganalisis *linkage* antara industri besar dan UMKM.
4. Mengusulkan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam rangka meningkatkan *linkage* UMKM dan industri besar untuk meningkatkan *output* ekonomi.
5. Mengusulkan rekomendasi kebijakan fiskal bagi UMKM dan Industri besar dalam mendukung *just transition* dan transformasi ekonomi hijau

Kajian Kebijakan Pengembangan Industri Semikonduktor Indonesia

Pengembangan industri semikonduktor menjadi salah satu strategi utama dalam merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia. Industri ini tumbuh pesat secara global dan berpotensi menjadi pilar penting dalam memperkuat daya saing serta keberlanjutan manufaktur nasional.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pemerintah menetapkan industri berbasis riset dan inovasi sebagai sektor prioritas, termasuk di dalamnya teknologi menengah dan tinggi (*medium-high technology*). Sejalan dengan arah tersebut, diperlukan kajian komprehensif untuk mendukung pengembangan industri semikonduktor sebagai bagian dari sektor prioritas nasional.

Sebagai industri *high-tech*, pengembangan semikonduktor memerlukan investasi besar dan dukungan kebijakan yang kuat. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat krusial, baik melalui regulasi yang menyeluruh maupun pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi prioritas kebijakan dan strategi pengembangan industri semikonduktor di Indonesia, dengan fokus pada intervensi fiskal. Selain itu, kajian ini juga menganalisis potensi dampak ekonomi, ketenagakerjaan, dan fiskal dari pengembangan industri ini, termasuk kontribusi terhadap *output*, nilai tambah, pendapatan masyarakat, dan potensi penerimaan negara.

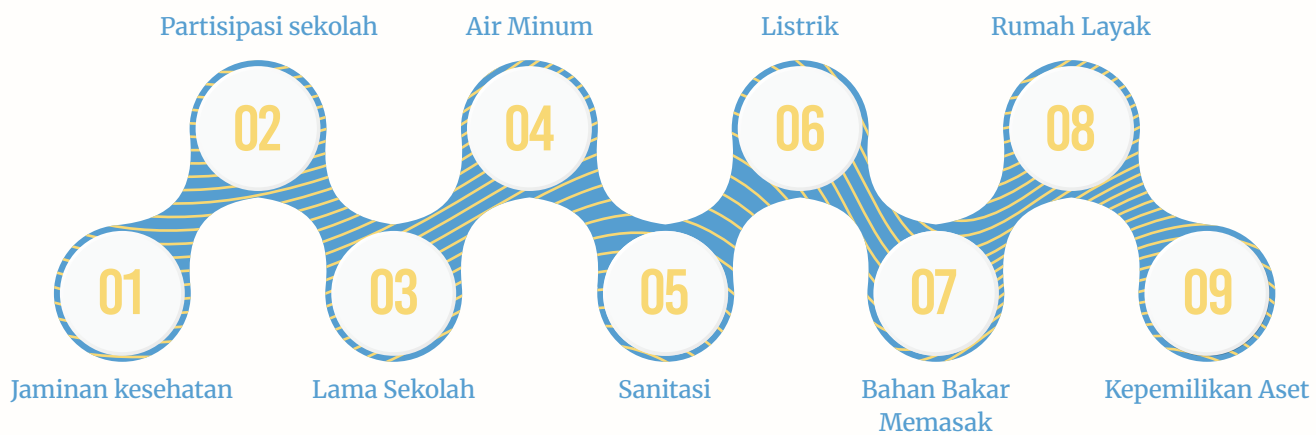
Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan investasi strategis, industri semikonduktor diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan berkontribusi lebih besar dalam rantai pasok global.

Kajian “Towards SDG 2030 : A Commitment to Alleviate All Forms of Deprivation in Indonesia”

Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam penurunan kemiskinan selama satu dekade terakhir. Namun, tren penurunannya cenderung melambat dan ke depan akan menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Karena itu, diperlukan pendekatan pengukuran alternatif selain berbasis konsumsi.

Metode Alkire-Foster yang digunakan dalam *Global Multidimensional Poverty Index* (MPI) menjadi salah satu alternatif yang relevan. Metode ini menitikberatkan pada dimensi pembangunan modal manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Kajian ini merupakan studi awal yang mengadaptasi pendekatan MPI dengan indikator dan ambang batas (*cut-off*) yang disesuaikan dengan konteks pembangunan Indonesia. Metode ini kemudian disebut sebagai *Moderate Multidimensional Deprivation Index of Indonesia* (MDI-I).

Menggunakan data Susenas 2020, MDI-I mengukur sembilan indikator:



Temuan utama kajian ini:

1. Dimensi kesehatan dan standar hidup layak menunjukkan tingkat deprivasi tertinggi. Rumah layak menjadi indikator dengan deprivasi terbesar, sedangkan air minum paling rendah.
2. Wilayah timur Indonesia mengalami deprivasi paling tinggi secara spasial, dan tingkat deprivasi di perdesaan hampir dua kali lipat dibandingkan perkotaan.
3. Perempuan mengalami deprivasi lebih tinggi dibandingkan laki-laki, terutama pada indikator rumah layak dan kepemilikan aset, mengindikasikan kerentanan terhadap kemiskinan dari sisi gender.

Beberapa rekomendasi hasil kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran kemiskinan multidimensi perlu dijadikan pelengkap indikator konsumsi, termasuk pendekatan berbasis wilayah untuk efektivitas intervensi.
- b. Diperlukan penyediaan perlindungan sosial yang inklusif dan merata, karena deprivasi tidak hanya dialami kelompok miskin, tetapi juga masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan dasar dan infrastruktur.

Kajian Analisis Potensi Pajak atas Transaksi Dalam Perusahaan Grup

Perusahaan cenderung memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) dalam regulasi perpajakan untuk memperoleh keuntungan (*tax benefit*) dari perbedaan struktur pajak antarnegara. Praktik ini memungkinkan perusahaan membayar pajak secara minimal atau bahkan tidak sama sekali, yang secara umum dikategorikan sebagai penghindaran pajak.

Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai negara telah menetapkan ketentuan antipenghindaran pajak domestik. Umumnya, aturan ini terbagi menjadi dua: *specific anti-avoidance rule* (SAAR) untuk mencegah skema tertentu, dan general *anti-avoidance rule* (GAAR) untuk menangani berbagai bentuk penghindaran secara umum.

Kajian ini merekomendasikan desain peraturan pelaksana GAAR di Indonesia serta penguatan ketentuan antipenghindaran pajak yang ada. Salah satu fokus Kementerian Keuangan adalah pembaruan pengaturan batasan utang atau pembayaran bunga sebagaimana tercantum dalam PMK 169/2015. Penguatan ini dapat memanfaatkan ruang pengaturan dalam UU PPh s.t.d.t.d. UU HPP dan PP 55/2022, dengan mengombinasikan rasio utang terhadap modal dan rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan (*interest limitation rule*).

Selain itu, terdapat ketentuan antipenghindaran lain yang sudah memiliki dasar hukum namun belum memiliki aturan pelaksana, seperti *Hybrid Mismatch Arrangement* dan perbandingan kinerja keuangan perusahaan. Untuk mendukung efektivitas pencegahan, perlu dipertimbangkan pula penerapan *Mandatory Disclosure Rule* (MDR), yang umum diterapkan pada pajak penghasilan — baik untuk individu maupun badan usaha — karena menjadi area yang paling rentan terhadap perencanaan pajak agresif.

Kajian Penguatan Peran APBN Dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA Dalam Negeri: Studi Kasus Hilirisasi Nikel

Permintaan global terhadap nikel terus meningkat seiring berkembangnya industri energi hijau dan kendaraan listrik. Sebagai negara dengan cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia (55 juta metrik ton cadangan dan 1,8 juta metrik ton produksi pada 2023), Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadi *game changer* dalam rantai pasok global. Peluang ini akan optimal jika nilai tambah dari sumber daya alam tercipta di dalam negeri melalui hilirisasi.

APBN berperan sebagai instrumen strategis dalam mendukung hilirisasi, antara lain melalui kebijakan tarif ekspor dan tarif royalti. Pemerintah telah menerapkan tarif royalti diferensial untuk mendorong pengolahan nikel lebih lanjut di dalam negeri, serta mendorong konservasi cadangan nikel menghadapi tingginya permintaan di masa depan.

Sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2020, ekspor produk olahan seperti ferronikel, nikel *matte*, dan *nickel pig iron* (NPI) meningkat signifikan. Namun, penerimaan negara dari sektor ini belum optimal. *Revenue ratio* (gabungan pajak dan PNBP terhadap *gross revenue*) hanya mencapai 4,56% pada 2021, turun menjadi 4,66% di 2022, dan naik tipis ke 3,39% pada 2023.

Untuk itu, peningkatan tarif royalti — terutama pada nikel kadar rendah — menjadi opsi kebijakan yang dapat mengoptimalkan PNBP sekaligus memperkuat hilirisasi. Misalnya, skenario peningkatan royalti dari 2% menjadi 10% untuk nikel kadar rendah dapat berdampak signifikan terhadap penerimaan negara. Selain itu, tarif ekspor yang lebih tinggi juga dapat mengubah perilaku produksi dan mendorong konservasi cadangan.

Kebijakan ini perlu disertai pemanfaatan pendapatan tambahan untuk pembangunan infrastruktur pendukung industri hilir, pemberian insentif bagi pelaku usaha, serta penguatan kapasitas R&D. Pemerintah juga dapat merancang skenario kebijakan tematik, seperti:

- **Sustainability:** penurunan laju produksi dari 8% menjadi 5% untuk menjaga cadangan nikel.
- **R&D:** peningkatan cadangan terkira (*estimated reserve*) menjadi cadangan terbukti (*proven reserve*), dari 40% menjadi 50%.
- **Hilirisasi:** insentif investasi industri hilir untuk memperkuat daya saing nasional.

Dengan desain kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai pemain utama dalam industri nikel global, sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya dan peningkatan kapasitas fiskal negara.

Kajian Optimalisasi Komoditas Batubara terhadap Penerimaan Negara

Potensi sumber daya alam dari sektor pertambangan batubara belum dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari komoditas ini masih belum maksimal. Untuk itu, diperlukan terobosan kebijakan strategis guna meningkatkan kontribusi batubara terhadap penerimaan negara, khususnya melalui perbaikan regulasi perizinan (IUP, IUPK), revisi formula Harga Batubara Acuan (HBA) dan Harga Patokan Batubara (HPB), serta penguatan tata kelola sektor.

Kontribusi penerimaan dari IUP tercatat belum optimal meskipun memiliki porsi produksi terbesar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kewajiban antara skema IUP dan IUPK, yang menimbulkan ketidakadilan serta potensi *moral hazard*. Selain itu, penetapan HBA berdasarkan tiga kelas kualitas berdampak pada menurunnya HPB dan tarif, serta membuka celah praktik *transfer pricing* akibat penggunaan rata-rata harga jual dalam perhitungan.

Sebagai respons, reformasi kebijakan batubara perlu diarahkan untuk:

1. Merevisi PP No. 26/2022 agar menyamakan tarif royalti antara IUP dan IUPK murni dengan ketentuan dalam PP No. 15/2022.
2. Menyesuaikan formula HBA dengan mengembalikannya ke ketentuan sebelum Kepmen ESDM No. 41K/2023 dan No. 227/2023.
3. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan batubara domestik dan ekspor sebagai bagian dari ketahanan energi nasional dan instrumen ekonomi negara.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penerimaan negara dari sektor batubara sekaligus memperkuat keberlanjutan pengelolaan sumber daya energi nasional.

Kajian Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kelautan dan Perikanan

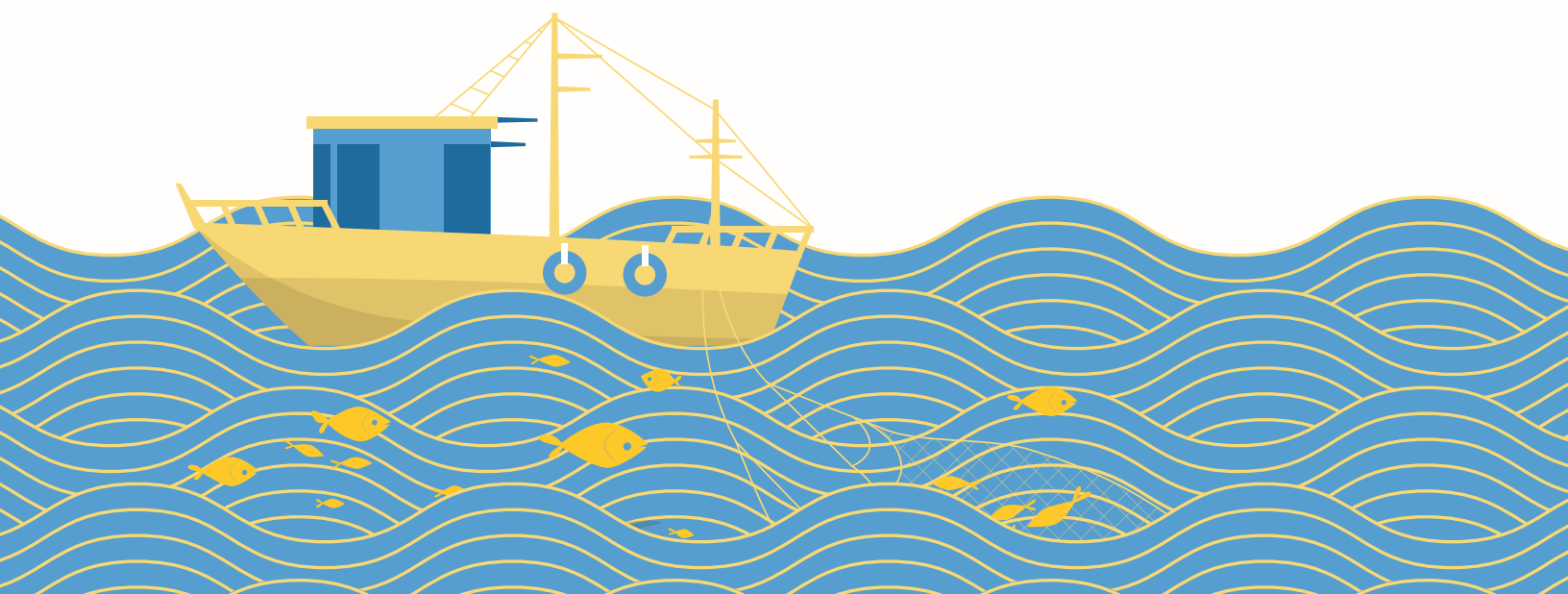
Sektor kelautan dan perikanan, khususnya perikanan tangkap, masih menjadi sorotan karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang relatif kecil. Pada 2023, kontribusi sektor ini hanya sebesar 2,6% terhadap PDB, meskipun Indonesia memiliki luas laut mencapai 3,25 juta km², hampir dua kali lipat dari luas daratan.

Rendahnya kontribusi terhadap PNBP disebabkan oleh masih minimnya volume produksi ikan tangkap. Sejak pertama kali dipungut pada 2006 melalui PP No. 19/2006 dengan nilai PNBP sebesar Rp0,19 triliun, kebijakan PNBP perikanan tangkap telah mengalami beberapa revisi. Pada 2015, Pemerintah menerbitkan PP No. 75/2015 yang mulai berlaku tahun 2016 dan meningkatkan PNBP menjadi Rp0,36 triliun. Reformulasi kebijakan kembali dilakukan melalui PP No. 85/2021.

Namun, peningkatan PNBP selama ini lebih disebabkan oleh perubahan formula kebijakan, bukan peningkatan produksi. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan formula pungutan hasil perikanan (PHP), misalnya dengan penerapan *single tariff* yang dihitung berdasarkan hasil tangkapan dan harga patokan ikan (HPI) di masing-masing daerah.

Kebijakan ini diharapkan mendorong peningkatan jumlah kapal penangkap ikan dari sekitar 5.500 menjadi lebih dari 10.000 unit, serta meningkatkan produksi menjadi 2 juta ton per tahun. Dengan demikian, target PNBP menjadi lebih realistis dan sesuai potensi. Selain itu, peningkatan aktivitas perikanan juga akan memperluas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kebijakan yang bijak dan berkelanjutan agar usaha serta investasi di sektor perikanan dapat tumbuh secara konsisten dan inklusif.



Evaluasi Efisiensi Formula Harga Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP)

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi formula serta struktur biaya pembentuk harga Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), guna menyusun rekomendasi formula harga dasar yang lebih efisien dan transparan, serta menganalisis model kelembagaan yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan energi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan di antaranya:

1. Struktur harga JBKP seperti Pertalite terdiri dari Harga Indeks Pasar (HIP) berbasis Mean of Platts Singapore (MOPS), ditambah biaya distribusi, penyimpanan, dan margin penyalur.
2. Proses pengadaan dan pengolahan BBM dikelola oleh Pertamina melalui koordinasi holding dan subholding.
3. Formula harga yang tidak membedakan asal bahan baku (impor/domestik) dinilai lebih efisien dibanding formula yang membedakan keduanya.
4. Peran trading arm membuka peluang peningkatan efisiensi melalui mekanisme tender terbuka yang memungkinkan partisipasi swasta.
5. Sekitar 50–60% pasokan Pertalite berasal dari impor; peningkatan kapasitas kilang belum tentu menurunkan biaya penyimpanan secara signifikan.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi kebijakan meliputi:

1. Pengembangan formula harga BBM yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika harga keekonomian, namun tetap menjaga stabilitas ekonomi.
2. Penyesuaian harga yang mempertimbangkan praktik negara lain dalam merespons fluktuasi harga global, dengan tetap melindungi daya beli masyarakat.
3. Pemerintah diharapkan bertindak sebagai fasilitator untuk menarik investasi melalui dukungan kebijakan fiskal, mengingat tingginya biaya pembangunan kilang domestik.

Analisis Kestinambungan Fiskal Jangka Panjang (*Long Term Fiscal Sustainability*) Tahun 2025-2045

Fiskal yang berkelanjutan adalah kondisi di mana kebijakan fiskal tetap stabil, mampu membiayai pembangunan, dan menjaga keseimbangan ekonomi melalui optimalisasi pendapatan, belanja yang efektif, serta defisit yang terjaga. Indonesia telah menetapkan *fiscal rules* dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni batas defisit maksimal 3% terhadap PDB dan batas utang maksimal 60% terhadap PDB.

Analisis *Long-Term Fiscal Sustainability* (LTFS) bertujuan memetakan risiko fiskal jangka panjang sebagai dasar bagi pengambilan keputusan kebijakan. Salah satu fokusnya adalah skenario 2045, yang menganalisis proyeksi fiskal untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dengan acuan indikator dalam RPJPN 2025–2045, seperti target pertumbuhan ekonomi dan penerimaan perpajakan.



Dalam skenario ini, diasumsikan disiplin fiskal dengan defisit terjaga di angka 2,5% PDB selama periode 2025–2045. Belanja negara dihitung berdasarkan proyeksi penerimaan dan defisit tersebut. Hasil analisis menunjukkan:

- Pendapatan negara diproyeksikan mencapai 19,3% PDB pada 2045, atau naik 7,7 poin persentase dibandingkan skenario baseline (11,6%).
- Belanja negara diproyeksikan sebesar 21,8% PDB, naik 6,46 poin persentase dari skenario baseline.
- Rasio utang terhadap PDB akan tetap jauh di bawah batas aman, yaitu 27,9% pada 2045, atau lebih rendah 21,1 poin persentase dari skenario baseline.

Proyeksi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal Indonesia tetap terjaga dalam jangka panjang dengan disiplin anggaran yang konsisten.

Analisis Dampak Bauran Energi Ketenagalistrikan Terhadap Subsidi dan Kompensasi Listrik

Sektor ketenagalistrikan merupakan salah satu subsektor energi yang berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju industri yang bernilai tambah dan berdaya saing. Namun, pertumbuhan konsumsi listrik masih didominasi oleh sumber energi fosil yang tidak berkelanjutan. Energi baru dan terbarukan (EBT) baru menyumbang 18,6% dari total produksi listrik, atau sekitar 65,23 TWh.

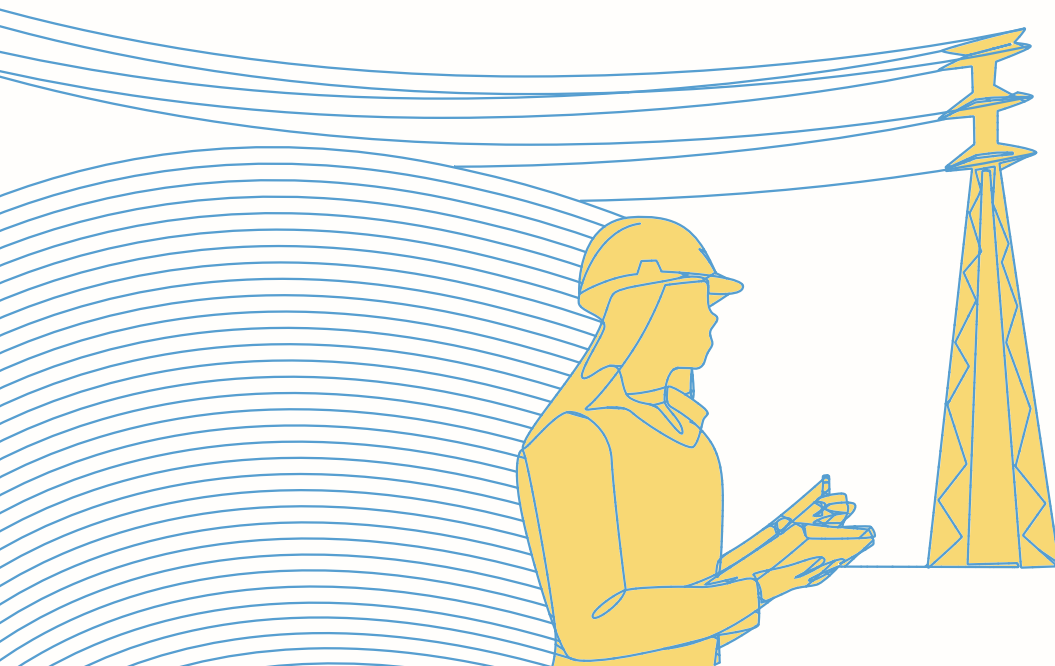
Untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), diperlukan percepatan transisi energi dengan meningkatkan porsi EBT dalam bauran listrik nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Transisi ini harus dilaksanakan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, makroekonomi, dan fiskal terhadap APBN.

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

1. Bauran energi yang ideal adalah yang memenuhi prinsip keandalan, keberlanjutan, dan keterjangkauan.
2. Pemilihan sumber energi didasarkan pada elastisitas peningkatan EBT terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP), subsidi, dan kompensasi listrik.
3. Dalam skenario *baseline*, sumber energi air, surya, dan angin memiliki elastisitas negatif terhadap BPP dan beban fiskal; peningkatan porsi energi air memberikan dampak paling optimal bagi sistem ketenagalistrikan.

Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini merekomendasikan:

1. Pemilihan sumber energi dalam bauran listrik harus mempertimbangkan aspek keandalan, keberlanjutan, dan keterjangkauan.
2. Dengan mempertimbangkan potensi EBT di Indonesia, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) menjadi prioritas utama dalam mendukung transisi energi yang berkelanjutan.



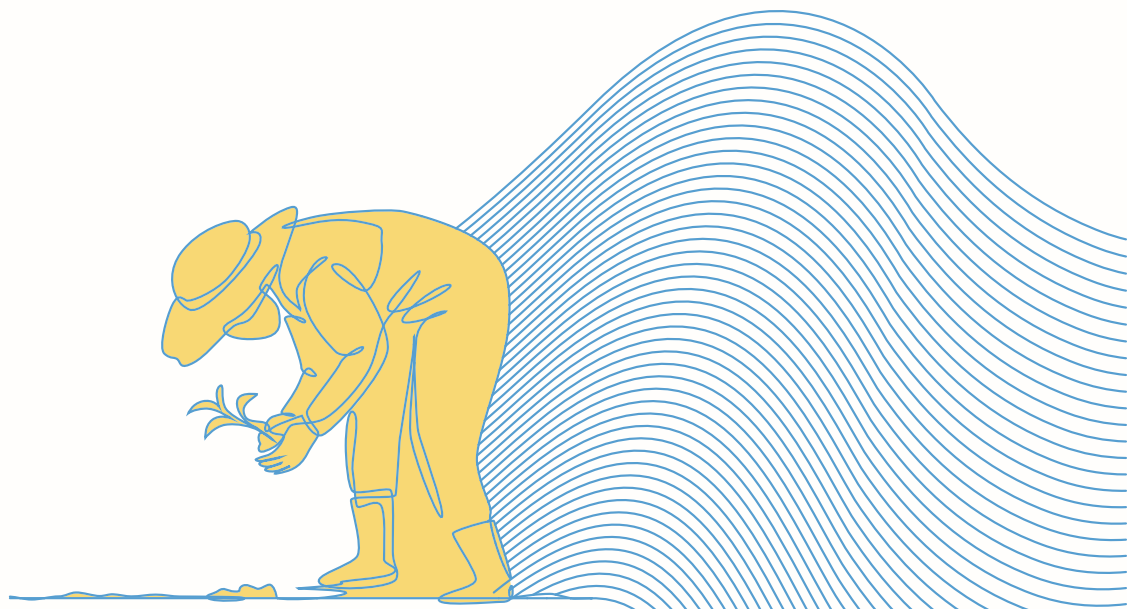
Kajian Analisis Kesejahteraan Petani di Indonesia

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, dengan 29,3 juta pekerja pada tahun 2023. Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan produktivitas rendah, tingginya tingkat kemiskinan, dan pendapatan yang tertinggal dibandingkan sektor lain.

Berbagai faktor memengaruhi kesejahteraan petani dan nelayan, antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan SDM, minimnya akses pelatihan, keterbatasan infrastruktur dan transportasi, penggunaan teknologi tradisional, serta akses terhadap jaminan sosial dan pembiayaan yang masih terbatas.

Kajian ini menekankan pentingnya Intervensi Produktivitas Terintegrasi dari hulu (pengolahan tanah, bibit unggul, pemupukan) hingga hilir (pascapanen, pengemasan, dan akses pasar). Pendekatan ini membutuhkan kolaborasi antara petani, pemerintah, lembaga riset, akademisi, dan industri.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan perlu dilakukan melalui pendekatan berbasis wilayah. Strategi *clustering* wilayah memungkinkan kebijakan lebih terarah sesuai karakteristik lokal, sehingga produktivitas dan pendapatan dapat meningkat secara berkelanjutan.



PENDAPATAN NEGARA

Indonesia terus melaju menuju negara maju di tengah dinamika dan gejolak ekonomi global. Dalam konteks ini, APBN dioptimalkan sebagai *shock absorber* untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pemulihan ekonomi, dan mendukung kesejahteraan.

Tema kebijakan fiskal tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Untuk mendukung tema tersebut, strategi fiskal dibagi dalam dua pendekatan:

1. Jangka pendek, fokus pada pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan peningkatan investasi.
2. Jangka menengah-panjang, diarahkan pada penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, hilirisasi SDA, serta reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Sebagai dukungan terhadap strategi tersebut, Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2024 telah merumuskan 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 20 (dua puluh) Peraturan Menteri Keuangan yang diklasifikasikan dalam tiga kategori kebijakan strategis:

1. Pemberian fasilitas perpajakan untuk mempercepat pertumbuhan dan transformasi ekonomi.
2. Perlindungan ekonomi dalam negeri.
3. Pengendalian konsumsi hasil tembakau.

Pemberian Fasilitas Perpajakan untuk Mempercepat Pertumbuhan dan Transformasi Ekonomi

Guna mendukung percepatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi, strategi optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Sejalan dengan arah kebijakan fiskal 2024, Badan Kebijakan Fiskal telah memprakarsai penyusunan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai bagian dari reformasi fiskal pendapatan negara berikut:

PP Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia

Dalam rangka mendukung kebijakan pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor yang berasal dari barang ekspor sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia,

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 22 Tahun 2024. Kebijakan tersebut diberikan dalam bentuk perlakuan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif yang lebih rendah atas penghasilan yang diterima Eksportir dari penempatan DHE SDA pada instrumen moneter dan/atau instrumen keuangan tertentu di Indonesia. Kebijakan ini, selain merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong Eksportir menempatkan dana hasil ekspornya ke dalam sistem keuangan Indonesia, juga bentuk penyalarsan dan pengharmonisasian dengan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam.

PMK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024

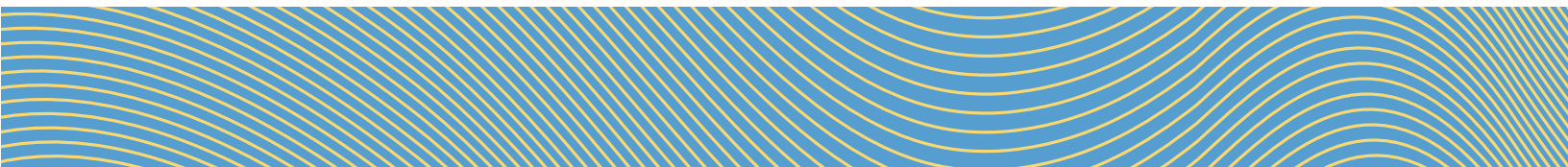
Dalam merespon tantangan ekonomi global 2024, Pemerintah memperkuat kesinambungan kebijakan fiskal dengan mendukung sektor strategis yang memiliki efek pengganda tinggi, salah satunya sektor perumahan. Melalui PMK Nomor 7 Tahun 2024, diberikan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah atas pembelian rumah tapak dan rumah susun, baik untuk hunian, tempat usaha, maupun perkantoran, guna mendorong pertumbuhan dan menggerakkan perekonomian nasional.

PMK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024

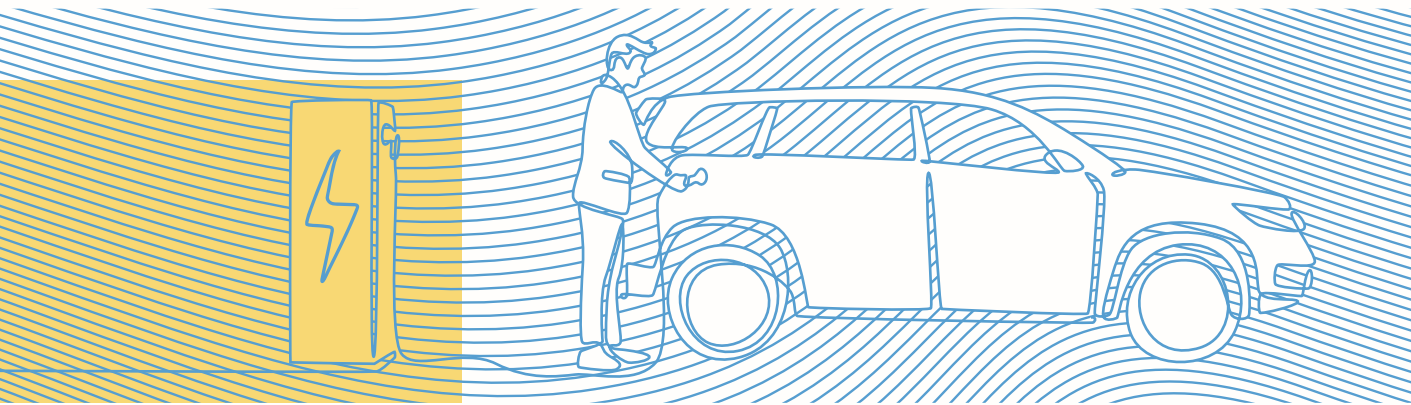
Dalam rangka mendukung transisi dari energi fosil ke energi listrik serta meningkatkan minat beli masyarakat terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Pemerintah menetapkan insentif fiskal melalui PMK Nomor 8 Tahun 2024. Insentif diberikan dalam bentuk PPN DTP dengan besaran berbeda berdasarkan tingkat TKDN:

- (a) $TKDN \geq 40\%$ mendapatkan PPN DTP sebesar 10%, dan
- (b) $TKDN \geq 20\%$ mendapatkan PPN DTP sebesar 5%.

Fasilitas ini berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2024. Daftar model dan tipe kendaraan yang memenuhi syarat ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perindustrian.



PMK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024



Dalam rangka mendukung transisi energi dari fosil ke listrik, menarik investasi, meningkatkan produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dalam negeri, serta mempercepat program KBLBB, Pemerintah memberikan dukungan fiskal melalui PMK Nomor 9 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur pemberian insentif PPnBM DTP atas impor KBLBB *Completely Built Up* roda empat tertentu dan/atau penyerahan KBLBB roda empat dari produksi *Completely Knocked Down* pada tahun anggaran 2024.

KBLBB yang memenuhi syarat dapat memperoleh insentif ini sepanjang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Investasi yang mengatur pedoman dan tata kelola pemberian insentif dimaksud. Pemenuhan syarat dibuktikan melalui surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/atau penyerahan KBLBB roda empat. Insentif diberikan sebesar 100% dari PPnBM terutang dan berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2024.

PMK Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

Sebagai bagian dari upaya peralihan energi fosil ke energi listrik, menarik investasi, dan mendorong peningkatan produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 10 Tahun 2024. Kebijakan ini memberikan insentif tarif bea masuk sebesar nol persen atas importasi KBLBB dalam kondisi utuh (*Completely Built Up*) maupun terurai lengkap (*Completely Knocked Down*) roda empat, berlaku hingga 31 Desember 2025.

PMK Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

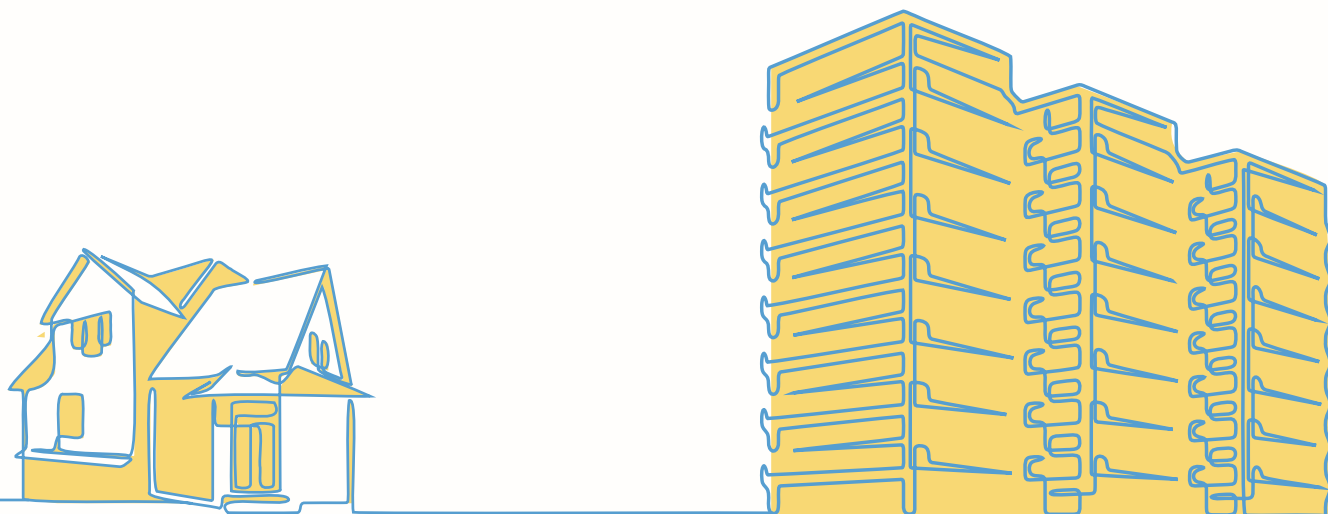
Sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan hilirisasi industri mineral logam, sekaligus penyederhanaan ketentuan penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar,

Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 38 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur perubahan tarif bea keluar atas hasil pengolahan mineral logam, yaitu konsentrat tembaga, besi laterit, timbal, dan seng dengan kadar tertentu. Ketentuan mulai berlaku pada 3 Juni 2024 sebagai lanjutan dari penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri.

PMK Nomor 61 Tahun 2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024

Menghadapi ketidakpastian ekonomi global, diperlukan penguatan sektor strategis sebagai penopang pertumbuhan. Sektor konstruksi dan perumahan dipilih karena memiliki efek pengganda yang besar, baik ke depan (*forward linkage*) maupun ke belakang (*backward linkage*), serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

Pemerintah telah memberikan berbagai dukungan fiskal bagi sektor perumahan, baik melalui insentif perpajakan maupun dari sisi belanja negara. Sebagai langkah akselerasi pada empat bulan terakhir 2024, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 61 Tahun 2024 yang mengatur tambahan fasilitas PPN DTP 100% atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun, berlaku mulai 1 September hingga 31 Desember 2024.



PMK Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah memberikan berbagai fasilitas perpajakan guna mendukung penciptaan investasi, antara lain melalui insentif Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Masuk. Seluruh kebijakan tersebut diselaraskan dengan regulasi domestik dan kesepakatan global, termasuk implementasi Pilar Dua yang mengatur penerapan pajak minimum global.

Ketentuan ini berdampak pada mekanisme pemberian fasilitas PPh Badan berupa *Tax Holiday*, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan di tingkat nasional. Mengingat periode fasilitas sebelumnya berakhir pada 8 Oktober 2024 dan mempertimbangkan kontribusinya terhadap peningkatan investasi, Pemerintah memperpanjang pemberian *Tax Holiday* hingga 31 Desember 2025 melalui penerbitan PMK Nomor 69 Tahun 2024.

Melalui PMK ini, pelaku usaha memperoleh kemudahan berupa pemutakhiran prosedur penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF) secara otomatis serta pelaporan online melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Kebijakan ini juga menjadi bagian dari penyesuaian perpajakan domestik pasca-implementasi Pilar Dua.

PMK Nomor 135 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025

Demi menjaga keberlanjutan kebijakan transisi energi dari fosil ke listrik, menarik investasi, meningkatkan produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di dalam negeri, serta mendukung percepatan program KBLBB, Pemerintah memberikan insentif fiskal melalui kebijakan PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa KBLBB roda empat tertentu.

Kebijakan tersebut diatur dalam PMK Nomor 135 Tahun 2024 sebagai lanjutan dari insentif yang telah berlaku sebelumnya di tahun yang sama. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 79 Tahun 2023 yang mengubah Perpres Nomor 55 Tahun 2019, dan mengatur pemberian insentif PPnBM dan Bea Masuk atas KBLBB impor dalam bentuk utuh (*Completely Built Up/CBU*) maupun kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri.

Insentif berlaku untuk tahun 2024 dan 2025, dengan syarat adanya komitmen produksi dalam negeri serta jaminan berupa bank garansi. Selain melalui penerbitan PP dan PMK-PMK tersebut, sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan untuk mempercepat pertumbuhan dan transformasi ekonomi Pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara, sebagaimana yang

telah dijelaskan pada Bab Capaian Utama.

Perlindungan Ekonomi dalam Negeri

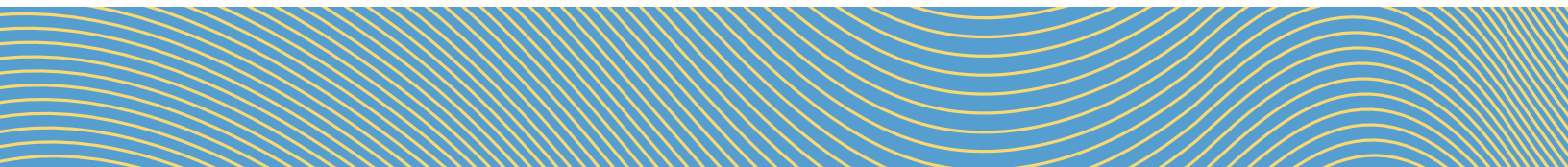
Ekonomi Indonesia sangat bergantung pada perdagangan internasional, namun di sisi lain, aktivitas tersebut juga berpotensi menimbulkan distorsi dalam negeri. Gempuran produk impor yang sebenarnya dapat diproduksi secara lokal serta kecenderungan ekspor produk dengan nilai tambah yang justru dinikmati oleh negara lain menjadi tantangan tersendiri.

Sebagai respons terhadap kerugian industri dalam negeri akibat peningkatan impor dan praktik perdagangan tidak sehat (*unfair trade*) seperti *dumping*, Badan Kebijakan Fiskal merumuskan kebijakan fiskal melalui penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur kebijakan *trade remedies*. Penyusunan regulasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas kementerian/lembaga dan mempertimbangkan keselarasan rantai industri agar sesuai dengan arah pengembangan industri nasional serta menjaga daya saing sektor industri dalam negeri.

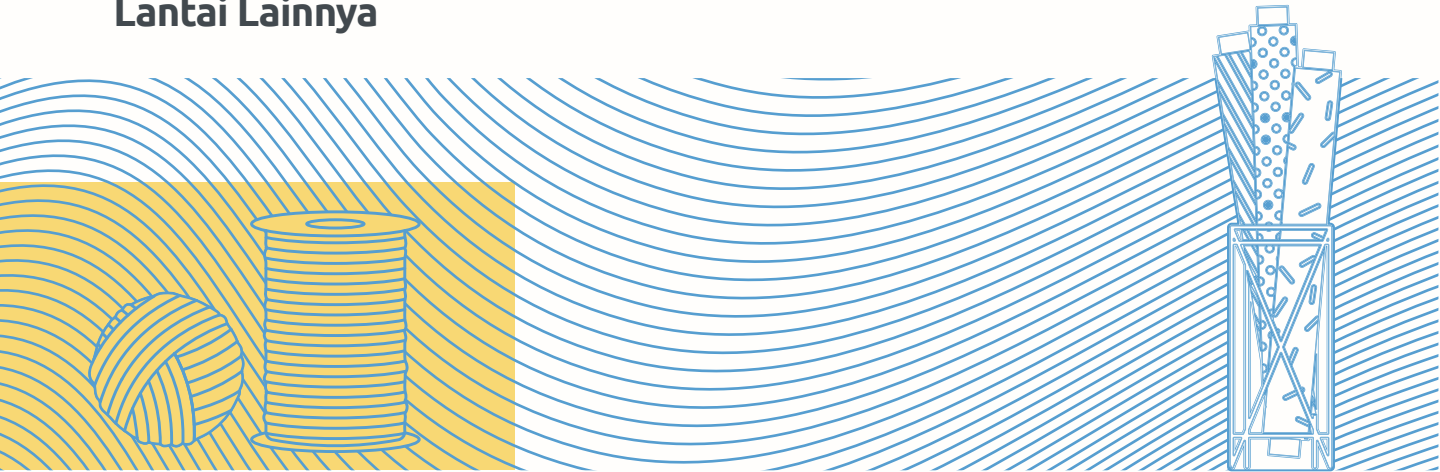
PMK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain

Hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPi) membuktikan industri dalam negeri masih mengalami kerugian serius akibat peningkatan jumlah impor produk kain dan masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural (kinerja). Melalui PMK ini, Pemerintah memberikan perpanjangan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor 107 pos tarif (5 segmen) produk kain selama 3 tahun sampai 8 Agustus 2027. Pengenaan BMTP tersebut merupakan tambahan dari bea masuk umum (*most favoured nation*) atau bea masuk preferensi berdasarkan kesepakatan internasional.

Sebagai respons, Badan Kebijakan Fiskal menyusun kebijakan *trade remedies* melalui penerbitan PMK guna melindungi dan memulihkan daya saing industri dalam negeri. Kebijakan ini dirumuskan bersama kementerian/lembaga terkait dengan tetap menjaga keselarasan rantai industri dan mendukung pengembangan sektor strategis nasional.



PMK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya



PMK ini memperpanjang pengenaan BMTP atas impor karpet dan tekstil penutup lantai lainnya selama tiga tahun hingga 20 Agustus 2027. Kebijakan ini bertujuan memberi waktu tambahan bagi industri dalam negeri yang masih terancam kerugian serius, sesuai hasil penyelidikan KPPI. Produk yang dikenai BMTP tercakup dalam pos tarif Bab 57, dengan tarif bertahap mulai dari Rp67.811/m² hingga Rp74.461/m².

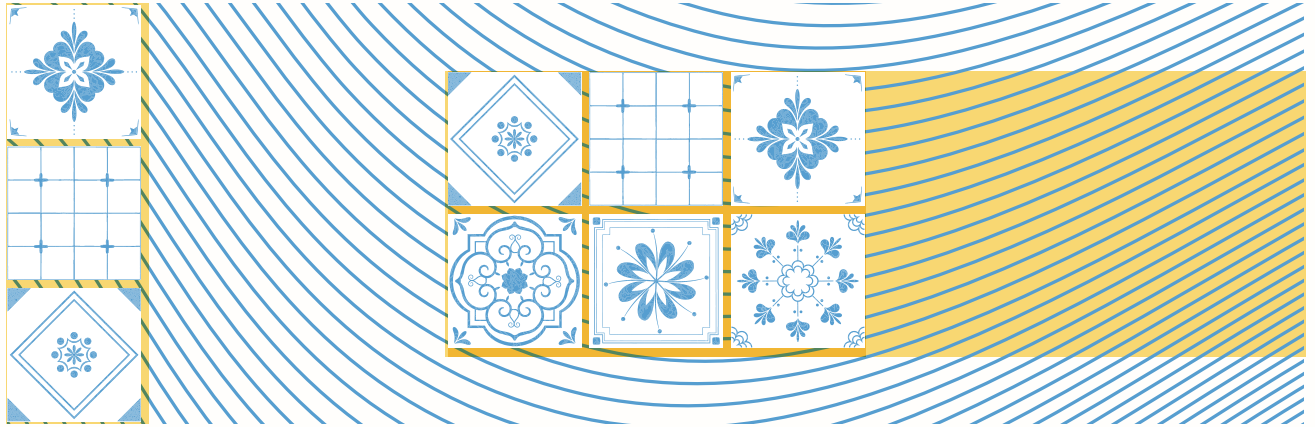
PMK Nomor 60 Tahun 2024 Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) dari Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok

Berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), importir asal Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok terbukti melakukan praktik *dumping* atas impor *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) yang menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri. Menindaklanjuti temuan tersebut serta Keputusan Menteri Perdagangan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengenakan Bea Masuk Anti *Dumping* (BMAD) terhadap impor tiga pos tarif produk BOPP dari kedua negara selama lima tahun, dengan tarif BMAD berkisar antara 5,76% hingga 29,95%.

PMK Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah dari Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan

Pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping* (BMAD) atas impor *tinplate* sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 214/PMK.010/2018 dan telah berakhir. Hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menunjukkan industri dalam negeri belum pulih dari kerugian akibat praktik *dumping* yang masih berlangsung. Pemerintah memperpanjang pengenaan BMAD selama lima tahun terhadap impor dua pos tarif *tinplate* dari Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan, dengan tarif antara 4,4% hingga 7,9%.

PMK Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok



Pemerintah mengenakan Bea Masuk Anti *Dumping* (BMAD) atas impor 11 pos tarif produk ubin keramik asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk memulihkan kerugian industri dalam negeri akibat praktik *dumping* yang dibuktikan melalui penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Kebijakan ini ditetapkan melalui PMK Nomor 70 Tahun 2024 dan berlaku selama lima tahun, mulai 28 Oktober 2024 hingga 27 Oktober 2029, dengan tarif BMAD sebesar Rp13.446/m² hingga Rp94.544/m².

PMK Nomor 71 Tahun 2024 Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Republik Rakyat Tiongkok

Produk H and I *Section* (HIS) merupakan salah satu produk hilir besi dan baja untuk konstruksi yang telah diproduksi di dalam negeri. Hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menunjukkan industri HIS dalam negeri masih mengalami kerugian akibat praktik *dumping* dari produsen asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang masih berlanjut. Sebagai bentuk perlindungan dan upaya peningkatan daya saing, pemerintah menetapkan Bea Masuk Anti *Dumping* (BMAD) atas impor empat pos tarif produk HIS dari RRT melalui PMK Nomor 71 Tahun 2024. Kebijakan ini berlaku selama lima tahun hingga 29 Oktober 2029, dengan tarif BMAD sebesar 11,93% untuk seluruh eksportir di RRT.

PMK Nomor 95 Tahun 2024 Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) dari Thailand dan Vietnam

Pemerintah mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor produk *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) dari Thailand dan Vietnam melalui PMK Nomor 95 Tahun 2024. Kebijakan ini diterbitkan setelah hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) membuktikan praktik *dumping* masih berlanjut. BMAD dikenakan selama lima tahun hingga Desember 2029, dengan tarif antara 3,9% hingga 28,4%. Produk BOPP merupakan

bagian dari industri plastik fleksibel yang umum digunakan untuk kemasan makanan, minuman, dan selotip.

PMK Nomor 103 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk *Antidumping* Terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand

Produk *Hot Rolled Coil* (HRC) merupakan produk baja *intermediate* di bagian hulu yang berperan penting dalam rantai industri baja. Berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), margin dumping masih ditemukan pada perusahaan yang dikenai Bea Masuk Anti *Dumping* (BMAD), sehingga berisiko menimbulkan kembali kerugian jika pengenaan dihentikan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 103 Tahun 2024 yang mengatur pengenaan BMAD atas impor produk HRC dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand. Kebijakan berlaku lima tahun hingga 14 Januari 2030, dengan tarif antara 0% hingga 20%.

Selain melalui penerbitan PMK yang mengatur mengenai kebijakan trade remedies, sebagai bentuk perlindungan ekonomi dalam negeri Pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global berdasarkan Kesepakatan Internasional, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab Capaian Utama.

Pengendalian Konsumsi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, salah satunya melalui pengendalian konsumsi rokok. Berbagai riset menunjukkan dampak negatif konsumsi rokok terhadap kesehatan, kondisi sosial ekonomi—terutama pada keluarga miskin—serta beban anggaran kesehatan.

Sebagai respons, pemerintah menjalankan kebijakan pengendalian rokok melalui instrumen fiskal dan nonfiskal. Kebijakan nonfiskal meliputi kawasan tanpa rokok, peringatan kesehatan bergambar, pelarangan penjualan eceran, serta pembatasan iklan dan promosi. Sementara itu, kebijakan fiskal dilakukan melalui pengaturan tarif cukai hasil tembakau yang dituangkan dalam PMK Nomor 191/PMK.010/2022 dan PMK Nomor 192/PMK.010/2022 untuk tahun 2023 dan 2024.

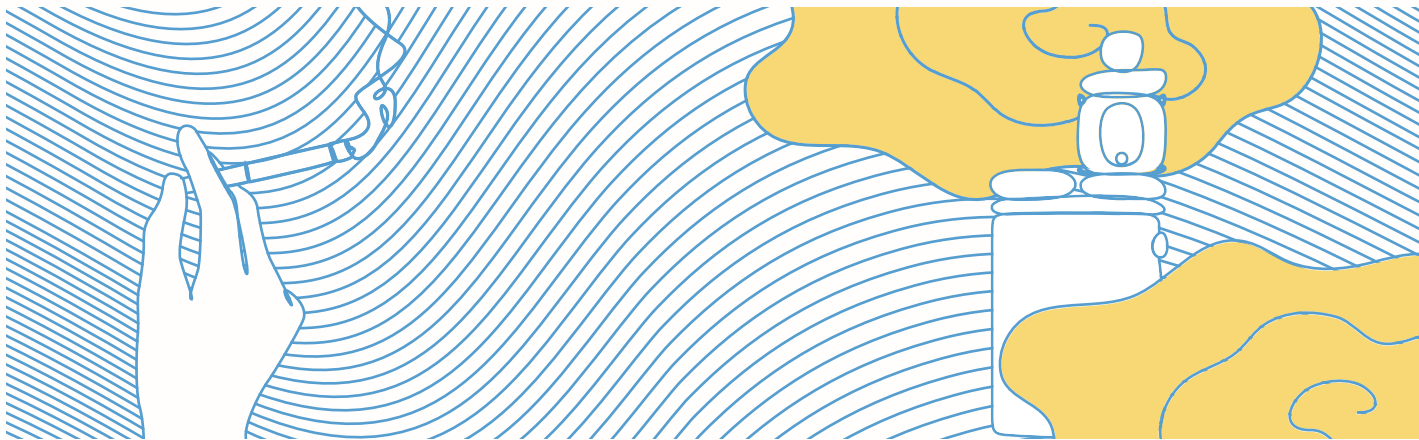
Pada 2025, kebijakan cukai akan difokuskan pada penguatan pengendalian harga melalui penyesuaian batasan minimum harga jual eceran, sejalan dengan harga transaksi pasar, sekaligus untuk mengurangi potensi *downtrading*.

PMK Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Perubahan tren konsumsi rokok menunjukkan peningkatan pada rokok berharga murah (golongan II dan III), yang mengancam upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi perokok, terutama anak dan remaja. Kondisi ini diproyeksikan memburuk tanpa pengendalian yang efektif. Sebagai respons, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 97 Tahun 2024 yang mengatur penyesuaian batasan minimum harga jual eceran hasil tembakau jenis sigaret, yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan Sigaret Kretek Tangan (SKT). Penyesuaian dilakukan melalui kenaikan rata-rata tertimbang sebesar 10% dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.

PMK Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

Pemerintah menyesuaikan batasan minimum harga jual eceran untuk hasil tembakau jenis rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya melalui PMK Nomor 96 Tahun 2024. Penyesuaian dilakukan dengan kenaikan rata-rata tertimbang sebesar 11,3% untuk rokok elektrik dan 6,2% untuk hasil pengolahan tembakau lainnya, berlaku mulai 1 Januari 2025.



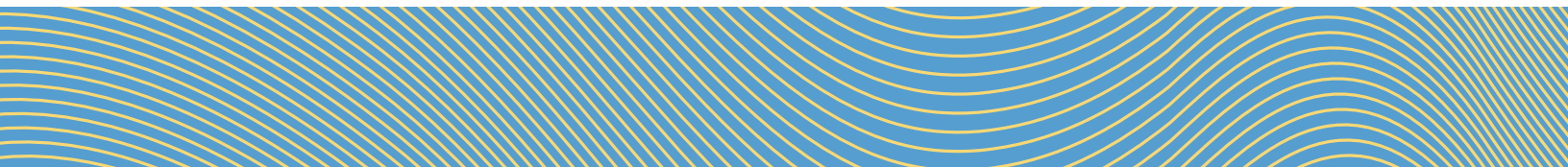
Kebijakan ini mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pengendalian konsumsi, tenaga kerja, penerimaan negara, rokok ilegal, dan dampak makro ekonomi. Sebagai bantalan, pemerintah mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar 3% dari penerimaan cukai untuk mendukung sektor industri, sosial, dan pengendalian rokok ilegal. Dukungan di bidang kesehatan juga disalurkan melalui DBH CHT, antara lain pelayanan kesehatan, penyediaan sarana prasarana, dan pembayaran iuran jaminan kesehatan. Keberhasilan pengendalian rokok bergantung pada sinergi kebijakan fiskal dan nonfiskal serta partisipasi masyarakat.

Kajian dan Analisis

Kajian Prioritas Nasional: Analisis Evaluasi Dampak Insentif Perpajakan atas Fasilitas Umum Terhadap Perekonomian Nasional

Penyediaan fasilitas umum seperti transportasi, sumber daya air, dan kelistrikan merupakan komitmen pemerintah yang sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 dan RPJMN 2020–2024. Dukungan pemerintah diwujudkan melalui pembebasan PPN atas jasa angkutan umum, listrik, dan air bersih sebagaimana tercatat dalam Laporan Belanja Perpajakan, serta melalui APBN dari sisi belanja (belanja K/L, subsidi, dana kompensasi, DAK Fisik) maupun pembiayaan (PMN dan pinjaman).

Sebagai tindak lanjut, Badan Kebijakan Fiskal melakukan kajian Analisis Evaluasi Dampak Insentif Perpajakan atas Fasilitas Umum terhadap Perekonomian Nasional sebagai bagian dari Prioritas Nasional 2024. Hasil utama dari kajian ini meliputi: 1) *Benchmarking* kebijakan PPN menunjukkan bahwa pembebasan PPN atas jasa angkutan umum diterapkan secara penuh di Thailand dan secara parsial di negara seperti Inggris, Argentina, dan Vietnam. Pada sektor kelistrikan dan air bersih, umumnya tidak dilakukan pembebasan PPN secara utuh, namun diterapkan skema pengurangan tarif seperti di Islandia. 2) Hasil analisis model *input-output* menunjukkan sektor transportasi menjadi penerima insentif PPN terbesar dan memberikan dampak ekonomi paling signifikan, baik dari sisi *output* maupun tenaga kerja, sementara sektor listrik memiliki *multiplier output* tertinggi karena keterkaitannya yang kuat dengan berbagai sektor lainnya. 3) Berdasarkan analisis elastisitas ekonometrika, insentif PPN transportasi darat terbukti efektif menurunkan biaya dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pengaruhnya terhadap transportasi laut belum signifikan karena keterbatasan jumlah armada. Di sisi lain, insentif PPN untuk transportasi dan air minum belum berpengaruh terhadap inflasi, berbeda dengan insentif PPN listrik yang cukup efektif karena konsumsi listrik masyarakat yang tinggi, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha.



SEKTOR KEUANGAN

Pada tahun 2024, sektor keuangan memainkan peran strategis dalam mendukung efektivitas kebijakan fiskal nasional. Pemerintah mendorong stabilitas dan perluasan akses keuangan guna memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Melalui berbagai instrumen fiskal, sektor ini diarahkan untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 36B dan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK s.t.d.d. UU P2SK), Pemerintah telah menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan (PP 41/2024). Peraturan ini mengatur penyusunan Rencana Kerja OJK, pungutan dan penerimaan OJK lainnya, yang mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diserahkan kepada OJK, penggunaan anggaran dari rupiah murni, mekanisme penggunaan pungutan dan penerimaan lainnya, tarif pungutan sektor jasa keuangan, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

PP 41/2024 disusun untuk mendukung operasionalisasi OJK agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip *good governance*, yaitu independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan *fairness*. Dalam proses penyusunannya, Pemerintah telah melakukan konsultasi dengan DPR melalui rapat kerja pada 8 Januari 2023. Selain itu, untuk menyerap masukan dari masyarakat, telah dilakukan beberapa kali *public consultation*, termasuk yang terakhir pada 11 Juli 2024 dengan melibatkan asosiasi dan lembaga terkait di sektor jasa keuangan.

PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pemerintah berkomitmen mendukung pemberdayaan UMKM, antara lain melalui kemudahan akses kredit atau pembiayaan dengan tetap menjaga prinsip kepastian hukum dan kehati-hatian. Salah satu bentuk kemudahan diberikan kepada UMKM yang masih memiliki catatan di perbankan, melalui kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet pada bank dan/atau lembaga keuangan nonbank BUMN sesuai Pasal 250 dan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kebijakan ini berlaku bagi seluruh debitur UMKM dengan kredit atau pembiayaan macet yang memenuhi kriteria.

Selain UMKM, kebijakan ini juga mencakup piutang negara dari debitur koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, khususnya yang bersumber dari dana bergulir pemerintah melalui BLU. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penanganan piutang negara macet pada debitur UMKM dan koperasi penyalur pembiayaan. Kebijakan ini bersifat *one-off policy* dan berlaku selama enam bulan sejak diundangkan.

Financial Sector Assessment Program (FSAP) Indonesia

Financial Sector Assessment Program (FSAP) 2023/2024 telah dilaksanakan melalui *first mission* pada Oktober 2023 dan *main mission* pada Maret 2024, dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Area asesmen mencakup stabilitas sistem keuangan, termasuk analisis risiko sistemik, kerangka pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, manajemen krisis dan jaring pengaman sistem keuangan, serta pengembangan sektor keuangan.

Secara umum, hasil asesmen menunjukkan bahwa perekonomian dan sektor keuangan Indonesia berada dalam kondisi sehat, dengan pertumbuhan yang kuat, stabil, dan cukup resilien terhadap gejolak eksternal. Asesor memberikan apresiasi positif terhadap penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang dinilai sebagai *game changer* bagi sektor keuangan Indonesia.

Capaian ini merupakan hasil sinergi Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS, otoritas terkait, serta pelaku usaha sektor jasa keuangan. Rekomendasi dari FSAP diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kualitas pengaturan, pengawasan, dan pengembangan sektor keuangan, sekaligus mendukung implementasi reformasi struktural yang telah dicanangkan dalam UU P2SK. Hasil asesmen ini juga diharapkan memperkuat ketahanan sektor keuangan, menjaga kepercayaan masyarakat, mendorong investasi dan arus modal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Financial Stability Board (FSB)

Badan Kebijakan Fiskal bersama Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal berpartisipasi aktif dalam forum *Financial Stability Board (FSB)*, termasuk *Plenary Meeting*, *Steering Committee on Standard Implementation*, dan *Regional Consultative Groups*. Forum tahun 2024 membahas program kerja FSB, kerentanan global dan regional, pemanfaatan *artificial intelligence* di sektor keuangan, *cross-border payment*, dan risiko keuangan terkait iklim.

Sebagai organisasi *standard-setting*, FSB memantau implementasi standar keuangan internasional dan kemajuan reformasi. Kementerian Keuangan turut menyampaikan usulan prioritas kerja 2025 agar sejalan dengan perubahan lanskap keuangan global.

Financial Action Task Force (FATF)

Ekosistem aset dan keuangan digital berkembang pesat di Asia Tenggara, dengan Indonesia berpotensi menjadi *market leader*. Kondisi ini mendorong peningkatan kapasitas pegawai Kementerian Keuangan, khususnya Badan Kebijakan Fiskal, untuk menjawab dinamika sektor yang terus bergerak cepat. Salah satu langkah strategis adalah keanggotaan penuh Indonesia dalam *Financial Action Task Force* (FATF), sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 30 Tahun 2019. Keanggotaan ini memberikan manfaat seperti partisipasi dalam pembentukan kebijakan global APUPPT PPSPM, akses bantuan teknis, serta peningkatan kepercayaan internasional terhadap sistem keuangan Indonesia.

Namun, keanggotaan FATF juga membawa konsekuensi. Indonesia dituntut menjaga kepatuhan terhadap *FATF Recommendations* dan memperkuat efektivitas implementasi. Gagal memenuhi standar berisiko membuat suatu negara masuk dalam *grey list*, yang menurut IMF berdampak negatif terhadap PDB, *foreign direct investment* (FDI), dan aliran modal. Jika tidak ada perbaikan, risiko masuk *black list* meningkat. Posisi Indonesia di FATF juga berpotensi memengaruhi *credit rating* yang pada akhirnya berdampak pada akses dan biaya pembiayaan pembangunan nasional.

ASEAN Working Committee on Financial Inclusion (WC-FINC)

Peningkatan keuangan inklusif di kawasan ASEAN diwujudkan melalui pembentukan ASEAN *Working Committee on Financial Inclusion* (WC-FINC) oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN sejak 2016. Komite ini bertugas mengoordinasikan kebijakan dan inisiatif untuk memperluas inklusi keuangan di kawasan, dengan dukungan berbagai mitra pembangunan seperti *Alliance for Financial Inclusion* (AFI), *World Bank* (WB), dan *United Nations Capital Development Fund* (UNCDF). Pertemuan rutin WC-FINC diselenggarakan setiap tahun untuk membahas perkembangan inklusi keuangan di negara anggota.



Pada 2024, agenda WC-FINC dilaksanakan di Laos sebagai ketua ASEAN tahun ini, dengan 14 item pembahasan utama. Indonesia turut memberikan *point of intervention* pada berbagai isu, termasuk menyoroti pentingnya Digital ID dalam mendorong inklusi keuangan. Namun, Indonesia menekankan bahwa pengembangan Digital ID memerlukan keterlibatan lintas lembaga, sehingga tidak dapat sepenuhnya berada dalam ranah kebijakan sektor keuangan.

Kajian dan Analisis

Kajian Pemetaan Potensi Aset Wakaf Komersial Nasional dan Identifikasi Sumber Pendanaan Pengembangan Aset Wakaf Dalam Kerangka Pengembangan Wakaf Uang

Kajian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi wakaf uang di Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp130 triliun. Namun, realisasi yang tercatat masih sangat rendah. Hingga Oktober 2023, total perolehan aset wakaf uang, baik melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) maupun non-CWLS, baru mencapai Rp2,23 triliun atau sekitar 1,71% dari total potensi yang ada.

Kajian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi potensi aset wakaf fisik di Indonesia; 2) mengidentifikasi peluang pengembangan aset wakaf fisik dalam kerangka komersial; 3) mengidentifikasi praktik kanalisasi dana terhadap aset wakaf fisik dan sumber pendanaannya; 4) mengidentifikasi model bisnis pengelolaan dana wakaf serta perhitungan potensi biaya dan keuntungannya; dan 5) menganalisis strategi pengembangan model bisnis pengelolaan dana wakaf. Kajian dilaksanakan melalui kerja sama antara Badan Kebijakan Fiskal dan *Center for Islamic Business and Economic Studies* (CI-BEST) IPB, dan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan lanjutan untuk pengembangan dan pendalaman wakaf uang di Indonesia.

Kajian Perpajakan Sektor Perbankan dan Asuransi Syariah



Prinsip *mutatis mutandis* yang selama ini digunakan dalam pengaturan perpajakan perbankan dan asuransi syariah masih menimbulkan tantangan, terutama karena model bisnis syariah sangat berbeda dari konvensional. Perbedaan ini kerap menimbulkan kerancuan interpretasi, menghambat daya saing produk syariah, dan menciptakan ketidakpastian pajak bagi pelaku usaha. Diperlukan penjelasan dan pengaturan lebih rinci agar terdapat kesetaraan perlakuan pajak terhadap produk syariah yang ekuivalen dengan produk konvensional—seperti investasi bank syariah dibandingkan pasar modal, atau dana tabarru' pada asuransi syariah dibandingkan dana sosial pada lembaga keuangan sosial. Selain itu, kegiatan spesifik seperti *spin-off*, *shared services*, atau akad pembiayaan khusus seperti *salam*, *istishna*, *mudharabah*, dan *musyarakah* memerlukan dukungan kebijakan

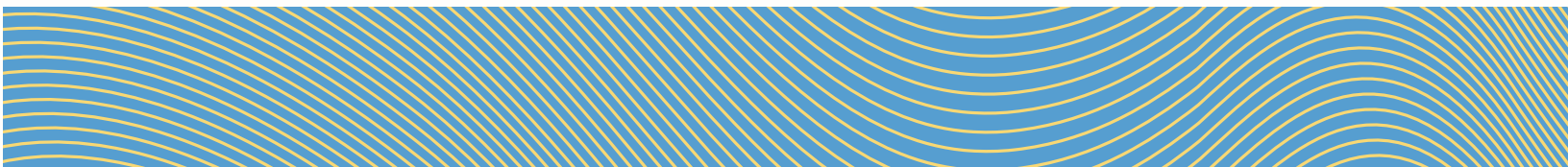
strategis yang memungkinkan lembaga syariah menunjukkan karakteristik uniknya, salah satunya melalui pendekatan *Sharia First*.

Sejalan dengan semangat penguatan sektor keuangan syariah dalam UU P2SK, sejumlah terobosan telah diperkenalkan, seperti pengaturan *investment account*, izin bank syariah untuk memiliki anak usaha nonkeuangan, serta peran sebagai *nazhir* wakaf dan *bullion bank*. Namun, untuk memastikan implementasi yang optimal, diperlukan regulasi lanjutan, terutama dalam aspek perpajakan. Berdasarkan analisis PKSK, Badan Kebijakan Fiskal, dan DJP, isu perpajakan syariah sebagian besar berada di *level* Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Surat Edaran Dirjen Pajak (SE DJP), atau bahkan belum memiliki regulasi sama sekali. Oleh karena itu, penyempurnaan aturan perpajakan direkomendasikan dilakukan melalui revisi PMK dan SE DJP, termasuk penyusunan insentif perpajakan atas produk *murabahah hakiki*. Hal ini sejalan dengan Pasal 307 UU P2SK yang memungkinkan pemberian insentif perpajakan melalui peraturan perpajakan tanpa harus menunggu Peraturan Pemerintah, mengingat kewenangan berada di bawah Kementerian Keuangan.

Kajian *Innovative Credit Scoring* (ICS)

Akses pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan formal masih menjadi kendala bagi rumah tangga berpendapatan rendah serta Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Hambatan utama berasal dari ketiadaan data riwayat kredit, agunan, dan bukti pendapatan resmi. Menanggapi hal ini, pada 2024 Badan Kebijakan Fiskal bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyusun kajian berjudul Prospek *Innovative Credit Scoring* (ICS) sebagai Alternatif Pilihan Ketidadaan atau Kurangnya Kualitas *Physical Collateral* pada UMK dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR). Kajian ini tidak hanya menganalisis prospek ICS sebagai alternatif agunan fisik, tetapi juga mengidentifikasi parameter dan sumber data ICS serta mekanisme pemanfaatannya dalam penilaian kelayakan calon debitur UMK dan PBR.

Penyusunan kajian dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan regulator, pemilik data alternatif, lembaga pengelola informasi perkreditan (LPIP), penyedia ICS, lembaga pengguna, dan akademisi. Sepanjang 2024, telah dilaksanakan 13 FGD secara daring dengan melibatkan 38 narasumber. Kajian ini direncanakan selesai pada 2025 dan akan menjadi dasar pertimbangan pengembangan kebijakan pembiayaan inklusif ke depan.



KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebagai Turunan Perpres Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana

Pemerintah telah membentuk Dana Bersama Penanggulangan Bencana melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021. Namun, karena pengaturan dalam peraturan tersebut masih bersifat umum, diperlukan regulasi teknis yang implementatif, mulai dari aspek pengumpulan, pengembangan, hingga penyaluran dana. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, disusunlah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana. RPMK ini menjadi dasar hukum bagi Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU BPD LH) dalam mengelola Dana Bersama, serta mengatur peran dan keterlibatan unit-unit eselon I Kementerian Keuangan.

Dana Bersama Penanggulangan Bencana merupakan kebijakan inovatif yang belum memiliki pengaturan teknis secara utuh. Oleh karena itu, pengesahan RPMK ini menjadi penting agar Dana Bersama dapat segera dioperasionalkan dengan tata kelola yang baik. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber sah lainnya, dan akan dikembangkan melalui investasi jangka pendek maupun panjang. Hasil pengembangan tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana di tahap prabencana, darurat bencana, dan pascabencana, termasuk untuk skema *transfer of risk*.



Dalam penyusunannya, RPKM ini melibatkan Tim Pengelola Proyek Indonesia *Disaster Risk Finance and Insurance* (IndoRISK) yang terdiri atas berbagai unit internal Kementerian Keuangan, seperti DJA, DJPB, DJPK, DJKN, dan DJPPR, serta instansi eksternal seperti BNPB. Sepanjang tahun 2024, Tim IndoRISK telah melakukan serangkaian rapat pembahasan. Draft RPKM pun telah disampaikan kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal untuk mendapatkan arahan, sembari PKRB memproses permohonan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. RPKM ini juga menjadi peraturan pelaksana dari Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (6), dan Pasal 10 Perpres 75 Tahun 2021, serta berfungsi sebagai pedoman resmi bagi Pemerintah dalam mengelola Dana Bersama secara menyeluruh dan bertanggung jawab. Urgensi penyusunan RPKM ini terletak pada fungsinya sebagai pendukung pembiayaan APBN dalam penanggulangan bencana dan sebagai dasar pengelolaan Dana Bersama oleh Pemerintah.

Kesepakatan Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) antara Indonesia dan Negara Mitra Bilateral

Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Keuangan Indonesia dengan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis dalam rangka penyelenggaraan High Level Economic Dialogue (HLED)

Tonggak Baru Kerja Sama Ekonomi: High Level Economic Dialogue (HLED) Indonesia-Prancis

Hubungan bilateral Indonesia dan Prancis memasuki babak baru dengan peluncuran *High-Level Economic Dialogue* (HLED), sebuah platform strategis untuk mempererat kerja sama ekonomi dan keuangan kedua negara. Inisiatif ini pertama kali diusulkan oleh Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, pada 2019 melalui surat resmi kepada Menteri Keuangan RI, dan disambut baik oleh Indonesia pada Maret 2020.

Namun, realisasi HLED sempat tertunda akibat pergantian pejabat di Prancis dan dampak pandemi COVID-19. Komunikasi antara kedua negara kembali terjalin pada akhir 2023, ditandai dengan penyusunan *draft Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai dasar hukum HLED. Rencana penandatanganan awalnya dijadwalkan bersamaan dengan kunjungan Menteri Keuangan RI ke Paris pada Mei 2024 dalam *Ministerial Council Meeting* OECD, tetapi perubahan agenda di pihak Prancis membuat proses dilakukan secara *desk-to-desk*. Pada Juli 2024, versi final MoU diserahkan oleh Kedutaan Besar Prancis sebagai simbol komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan ekonomi ke depan.

Ruang Lingkup Kerja Sama Strategis

HLED diharapkan menjadi tonggak penguatan hubungan bilateral dengan beragam proyek kerja sama strategis, antara lain:

1 Pengembangan Pendidikan:

- Kolaborasi LPDP dengan universitas-universitas terkemuka di Prancis.

2 Pembiayaan Ekspor:

- Kerja sama antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Bank Exim Prancis (BPi).

3 Penguatan Kapasitas SDM:

- Program magang bagi pegawai Kementerian Keuangan di OECD atau Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis.

4 Kerja Sama Triangular:

- Kolaborasi LDKPI (Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Indonesia) dengan AFD (Agence Française de Développement).

5 Bantuan Teknis:

- Pengiriman ahli Prancis untuk mendukung proyek-proyek strategis di Indonesia. .

Fokus pada Perdagangan dan Investasi

Selain kerja sama strategis, HLED juga menjadi wadah untuk membahas isu perdagangan dan investasi. Beberapa agenda prioritas yang diangkat termasuk:

1 Keberlanjutan Minyak Sawit:

- Upaya pengakuan internasional terhadap keberlanjutan minyak sawit Indonesia.s.

2 Pengembangan Sektor Minyak Atsiri:

- Meningkatkan daya saing minyak atsiri Indonesia dalam industri parfum Prancis.

3 Inovasi Teknologi Hijau:

- Mendukung pengembangan teknologi ramah lingkungan di kedua negara.

4 Investasi di Sektor Pemeliharaan Pesawat:

- Memanfaatkan potensi strategis Indonesia dalam industri aviasi.

Dengan kontribusi Indonesia yang signifikan, baik melalui pembelian barang bernilai tinggi maupun pinjaman dari Prancis sebesar USD 2,75 miliar, *High-Level Economic Dialogue* (HLED) menjadi peluang strategis untuk menciptakan keseimbangan perdagangan dan membuka pasar baru bagi kedua negara. HLED diharapkan tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan *tangible deliverables* yang memberi manfaat konkret. Proyek-proyek kerja sama yang dirancang mencerminkan sinergi antara Indonesia dan Prancis dalam mencapai tujuan ekonomi bersama. Lebih dari itu, HLED dibentuk sebagai *platform* dinamis yang dapat beradaptasi dengan tantangan dan peluang masa depan. Dengan komitmen kuat dari kedua belah pihak, HLED diharapkan menjadi pilar penting dalam memperkuat hubungan bilateral dan membuka jalan menuju kemitraan strategis yang lebih seimbang, berkelanjutan, dan saling menguntungkan.

Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia–Uni Emirat Arab

Memperkuat Hubungan Bilateral: Kolaborasi Indonesia dan UEA di Bidang Manajemen Keuangan Publik

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) semakin menguat, terutama setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Abu Dhabi pada 17 Juli 2024. Salah satu pencapaian penting dari kunjungan tersebut adalah penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di bidang Manajemen Keuangan Publik (*Public Financial Management/ PFM*) antara kedua negara. MoU ini tidak hanya mempererat hubungan diplomatik, tetapi juga membuka peluang kerja sama strategis dalam penguatan pengelolaan keuangan negara.

Penandatanganan MoU PFM menjadi tonggak awal kolaborasi baru yang difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, penyusunan rekomendasi kebijakan, dan pelaksanaan proyek strategis berdasarkan rencana aksi bersama. Untuk mendukung implementasinya, dibentuk *Joint Committee* (JC) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 MoU. Struktur JC mencakup tiga komponen utama:

- *Advisory Board*, dengan Deputi Keuangan masing-masing negara sebagai perwakilan utama.
- *Co-Chairs* di Tingkat Teknis, yang terdiri dari direktur urusan keuangan internasional. Indonesia diwakili oleh Kepala PKRB, dengan dukungan Kepala PKPPIM sebagai *alternate*.
- *Joint Secretariat*, yang melibatkan Atase Keuangan di Abu Dhabi dan Pokja Bilateral PKRB.

Indonesia menekankan pentingnya JC menghasilkan *output* nyata seperti penguatan performa ekonomi, kapasitas kelembagaan, serta rekomendasi kebijakan strategis. UEA mendukung pandangan ini dengan menambahkan bahwa area kerja sama harus tetap berada di bawah lingkup Kementerian Keuangan untuk memastikan kendali dan efisiensi.

Rencana aksi untuk periode 2024–2025 telah disusun dengan agenda yang mencakup:

1. Pertemuan *Joint Council* dan *Advisory Board*,
2. Kunjungan studi pada isu-isu strategis,
3. *Workshop* perpajakan internasional,
4. Forum ekonomi dan kebijakan publik,
5. Kerja sama pembiayaan iklim, dan
6. Dialog Kebijakan Ekonomi Tingkat Tinggi (*High-Level Economic Policy Dialogue / HLEPD*).

Indonesia juga mengusulkan perluasan portofolio investasi di sektor strategis melalui forum investor, meskipun UEA lebih memilih fokus pada pengelolaan utang melalui *Debt Management Office* masing-masing.

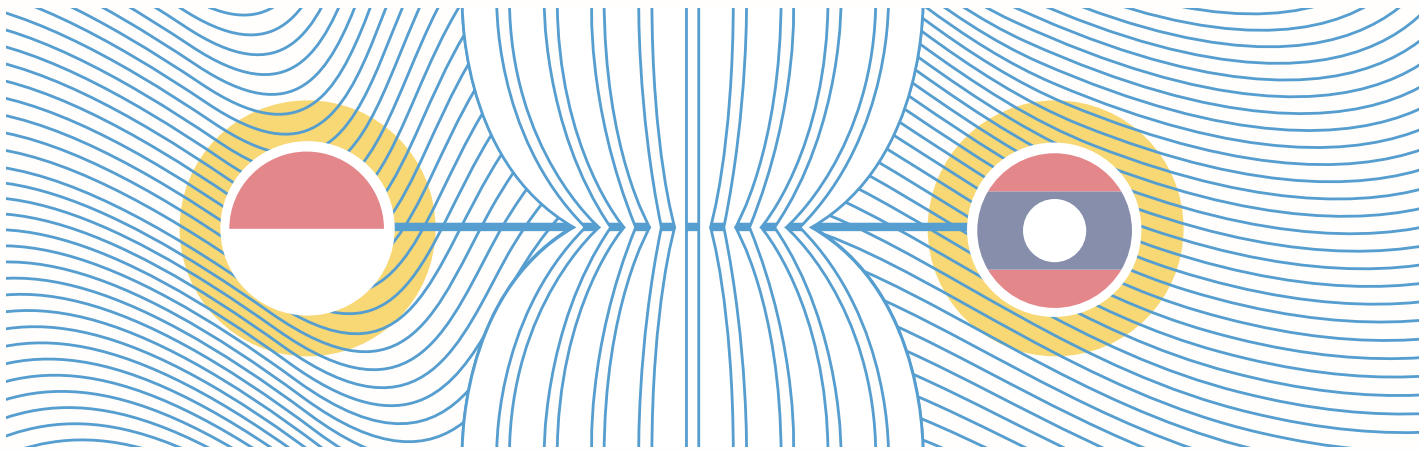
Sebagai bagian dari rencana aksi, HLEPD perdana akan dilaksanakan pada kuartal kedua tahun 2025, dengan kehadiran Menteri Keuangan dari kedua negara. Indonesia mengusulkan topik diskusi seperti:

1. Kondisi ekonomi terkini kedua negara,
2. Keuangan berkelanjutan,
3. Potensi kerja sama investasi,
4. Kebijakan perpajakan, dan
5. Tata kelola *Family Office* (FO)

Rencana aksi dan struktur JC yang di-*endorsed* disepakati sebagai *living document*, memungkinkan perubahan sesuai kebutuhan. Setiap revisi harus melalui diskusi teknis dan mendapat persetujuan dari *Advisory Board*. *Co-Chairs* bertugas merancang detail pelaksanaan HLEPD, termasuk topik, hasil yang diharapkan, serta eksplorasi aktivitas tambahan dalam rencana dua tahun. Kerja sama Indonesia-UEA melalui MoU PFM ini diharapkan menjadi katalis untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi kedua negara. Dengan komitmen yang kuat, kolaborasi ini tidak hanya mempererat hubungan diplomatik tetapi juga menciptakan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi kedua negara.

Dukungan Indonesia untuk Keketuaan Laos pada Jalur Keuangan ASEAN 2024

Tahun 2024 menjadi momen penting bagi Laos yang mengambil alih Keketuaan ASEAN. Dengan tantangan sebagai negara tanpa garis pantai dan keterbatasan anggaran, Laos mengusung visi kolaborasi lintas sektor—seperti keuangan-kesehatan dan keuangan-pertanian—untuk mendorong stabilitas ekonomi dan memperkuat integrasi kawasan. Sebagai Ketua ASEAN sebelumnya, Indonesia memberikan dukungan penuh untuk memastikan transisi berjalan lancar. Komitmen tersebut ditegaskan dalam *Grant Agreement* antara Indonesia dan Laos yang ditandatangani pada pertemuan bilateral di sela ASEAN *Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting* (AFMGM), Agustus 2023 di Jakarta.



Bantuan yang diberikan Indonesia mencakup perumusan agenda substantif, dukungan logistik, dan hibah pendanaan untuk pertemuan non-reguler. Selain mendukung kelancaran agenda regional, kerja sama ini juga memberikan manfaat langsung bagi Indonesia, antara lain melalui pelibatan pelaku UMKM nasional dalam penyediaan perlengkapan seminar dan layanan logistik, yang turut mendorong dampak ekonomi domestik.

Laos diharapkan dapat melanjutkan berbagai inisiatif strategis yang telah dirintis Indonesia selama Keketuaan ASEAN 2023, antara lain:

1. Kolaborasi keuangan-kesehatan untuk memperkuat kapasitas kesehatan kawasan.
2. Penguatan ketahanan pangan melalui sinergi sektor keuangan dan pertanian.
3. Pembentukan ASEAN Treasury Forum sebagai *platform* kolaborasi keuangan lintas negara.
4. Penguatan pembiayaan infrastruktur melalui ASEAN *Infrastructure Fund*.

Dengan keterbatasan anggaran, Laos menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan inisiatif-inisiatif tersebut. Dukungan hibah dari Indonesia pun menjadi krusial, tidak hanya untuk keberlanjutan program, tetapi juga memberi dampak strategis sebagai berikut:

Aspek Politik

1. Memperkuat solidaritas ASEAN sebagai komunitas yang saling mendukung.
2. Meningkatkan citra Indonesia sebagai pemimpin kawasan yang proaktif.
3. Menjaga stabilitas regional di tengah tantangan global.

Aspek Ekonomi

1. Mendukung kesepakatan yang memperkuat integrasi dan stabilitas keuangan ASEAN.
2. Mendorong partisipasi UMKM Indonesia dalam penyelenggaraan pertemuan.
3. Menjamin keberlanjutan agenda prioritas Indonesia pascakeketuaan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Memberikan *technical assistance* bagi pegawai Kementerian Keuangan Laos.
2. Membangun fondasi SDM kawasan yang lebih berkualitas dan berdaya saing.
3. Tantangan dan Harapan untuk ASEAN 2024

Laos dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola keterbatasan anggaran dan logistik yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah pertemuan non-reguler, seperti forum keuangan-kesehatan dan pertemuan awal untuk mendukung ketahanan pangan. Namun, dengan dukungan dari Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya, Laos diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala tersebut. Keberhasilan Laos sebagai Ketua ASEAN 2024 akan menjadi wujud nyata solidaritas kawasan dalam menghadapi tantangan global. Dukungan Indonesia tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan agenda regional, tetapi juga memperkuat peran ASEAN sebagai komunitas yang adaptif dan berdaya tahan. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk mendorong ASEAN melampaui visi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, menjaga harmoni kawasan, serta memperkuat posisi ASEAN di kancah global.

Adapun beberapa bentuk dukungan konkret Indonesia kepada Laos antara lain:

1. Pelatihan bagi *Liaison Officers (LO)* dan *Voluntary Officers (VO)* sebagai bagian dari hibah Dukungan Keketuaan Laos pada *ASEAN Finance Process 2024*, dilaksanakan pada 25 Maret 2024.
2. Pengiriman *expert* Indonesia untuk mendukung persiapan substansi dan logistik Keketuaan Laos pada 19–23 Februari 2024 (Q1).
3. Pemanfaatan *technical assistance* dari PROSPERA untuk penyiapan dokumen pertemuan *ASEAN Finance and Central Bank Deputies' Meetings Working Group (AFCDM-WG)* pada 19–23 Februari 2024 di Vientiane, dan *ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM)* pada 2–4 April 2024 di Luang Prabang (Q2).
4. Penyaluran hibah untuk mendukung penyelenggaraan *The 2nd ASEAN Finance and Health Ministers' Meeting (AFHMM)* yang akan dilaksanakan pada 8 Agustus 2024 (Q3).

Pelaksanaan Kerja Sama Teknik Luar Negeri Lingkup Kementerian Keuangan Tahun 2024: Kolaborasi Global untuk Penguatan Kompetensi SDM Kemenkeu

Sepanjang tahun 2024, Badan Kebijakan Fiskal terus menjalankan peran sebagai *focal point* dalam pengelolaan Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN) di lingkungan Kementerian Keuangan. Peran ini mencerminkan komitmen Badan Kebijakan Fiskal dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM, memperkuat sinergi global, dan pengelolaan kerja sama internasional. Sejumlah inisiatif layanan telah dihadirkan sebagai wujud peningkatan kualitas tata kelola KTLN di lingkungan Kemenkeu.

Adapun bentuk layanan yang diselenggarakan PKRB meliputi: 1) pengurusan dokumen penawaran dan pencalonan pegawai untuk mengikuti beasiswa non-gelar dalam bentuk pelatihan, training, workshop, dan seminar, baik daring (*online/virtual*) maupun luring (*offline/in-person*), yang ditawarkan oleh mitra pembangunan melalui Kementerian Sekretariat Negara maupun langsung dari penyelenggara; 2) pengurusan dokumen perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang dibiayai sponsor asing seperti negara mitra bilateral dan organisasi internasional nonpemerintah/*nonprofit*; serta 3) pengurusan perizinan penugasan tenaga asing di lingkungan Kemenkeu. Seluruh pelaksanaan layanan ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, sebagaimana diubah terakhir melalui PMK Nomor 141/PMK.01/2022.

Kerja sama ini tidak hanya memperluas wawasan pegawai, tetapi juga turut mendorong peningkatan daya saing global Indonesia. Melalui pengelolaan program yang transparan dan inklusif, dengan partisipasi gender yang seimbang memastikan bahwa setiap inisiatif pengembangan SDM selaras dengan visi Kementerian Keuangan untuk membangun institusi yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Kerja sama teknik luar negeri ini menunjukkan bahwa kolaborasi internasional merupakan kunci dalam menghadapi tantangan global dengan kesiapan, kompetensi, dan keahlian yang mumpuni.

Program Beasiswa *Non-Degree*: Investasi dalam Pengembangan SDM

Sepanjang tahun 2024, Badan Kebijakan Fiskal mengelola 36 program beasiswa *non-degree* dalam 15 kerangka program Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN). Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan mitra internasional dari berbagai negara seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Bentuk kegiatan meliputi pelatihan, *workshop*, dan seminar yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Dari total peserta, 104 orang (58%) berjenis kelamin laki-laki dan 76 orang (42%) perempuan. Berdasarkan negara penyelenggara, Singapura menjadi kontributor terbesar dengan 157 peserta, diikuti oleh Indonesia (14), Korea Selatan (4), Jepang dan Malaysia (masing-masing 2), serta Thailand (1).

Pengelolaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)

Pada tahun 2024, Badan Kebijakan Fiskal telah memfasilitasi pengurusan 213 dokumen perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang dibiayai sponsor asing, dengan total 388 peserta dari berbagai unit eselon I. Tujuan PDLN mencakup seminar, konferensi internasional, pelatihan, studi banding, penugasan pada organisasi internasional, dan magang.

Perizinan Penugasan Tenaga Asing

Dalam hal penugasan tenaga asing, Badan Kebijakan Fiskal mengelola perizinan bagi lima tenaga ahli dari institusi internasional seperti *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *National Tax Agency (NTA)* Jepang, dan *National Tax Service (NTS)* Korea Selatan. Para tenaga ahli ini memiliki peran strategis di bidang perpajakan internasional dan pengembangan kebijakan ekonomi.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:



Massimo Geloso Grosso (*OECD*, Italia) bertugas sebagai tenaga ahli di Badan Kebijakan Fiskal sekaligus Kepala Kantor Perwakilan Regional *OECD* di Jakarta sejak 2017.



Seiichiro Imai (*NTA*, Jepang) merupakan *long term visitor* di DJP yang berperan sebagai penghubung kerja sama perpajakan Indonesia–Jepang sejak 2021 hingga semester I 2024.



Melinda Meily Brown (*OECD*, Inggris/Australia) bertugas di DJP sebagai *Senior Tax Advisor* di bidang *international business* sejak 2022.



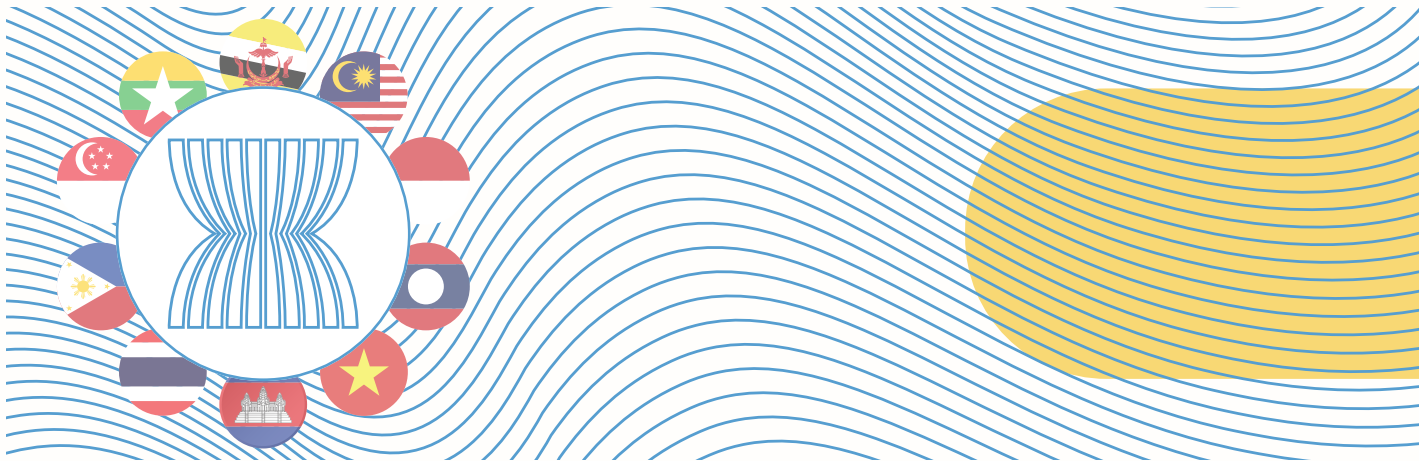
Ryu Jihyeon (*NTS*, Republik Korea) merupakan tenaga ahli DJP sebagai *tax officer* bidang perpajakan internasional sejak 2022 hingga Desember 2024.



Deguchi Yu (*NTA*, Jepang) bertugas di DJP sebagai penghubung kerja sama perpajakan Indonesia–Jepang, dengan status *long term visitor* sejak Juni 2024.

Forum Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM)



Pertemuan *ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM)* berlangsung pada 2–5 April 2024 di Luang Prabang, Laos, dengan rangkaian agenda seperti *AFMGM with Business Councils*, *AFMGM with International Financial Institutions (IFIs)*, *AFMM Retreat*, *11th AFMGM*, serta sejumlah pertemuan pendukung seperti *High Level Policy Dialogue*, *ASEAN Treasury Forum*, dan *Treasury Seminar*. Dalam *AFMM Retreat*, para Menteri Keuangan menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara ASEAN, kompetisi sebagai blok kawasan di level global, serta dorongan untuk integrasi pasar energi terbarukan melalui *connected grid*. ASEAN juga didorong untuk terus fokus pada inovasi, keberlanjutan, dan strategi pertumbuhan inklusif guna mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dan berketahanan iklim.

Dalam pertemuan dengan *ASEAN Business Advisory Council (ABAC)*, dunia usaha mengusulkan pembentukan *ASEAN Business Entity (ABE)* dan perluasan *sistem cross-border payment* untuk remitansi. Wamenkeu RI menyoroti perlunya kehati-hatian terhadap aspek regulasi masing-masing negara dan mendukung pengembangan *QR payment* lintas negara yang bermanfaat bagi pekerja migran. Salah satu capaian utama dari keketuaan Laos adalah pengesahan pembentukan *ASEAN Treasury Forum (ATF)* sebagai forum reguler di bawah jalur keuangan, dengan pertemuan pertama akan digelar di Indonesia pada September 2024, dan Indonesia ditunjuk sebagai *chair* selama dua tahun pertama. Indonesia juga mendorong pembentukan *ASEAN Cross-sectoral Working Committee (ACS-WC)* untuk memperkuat kolaborasi sektor keuangan dengan sektor pertanian dan kesehatan, serta mendorong penguatan kapasitas *ASEAN Infrastructure Fund (AIF)* melalui rekapitalisasi dan reformasi proses bisnis. Selain itu, Indonesia turut membagikan hasil pertemuan G20 sebagai kontribusi terhadap agenda regional.

ASEAN Finance and Health Ministers' Meeting (AFHMM)

Pelaksanaan *The 2nd ASEAN Finance and Health Ministers' Meeting (AFHMM)* merupakan tindak lanjut dari inisiatif Indonesia saat menjabat sebagai *Chairmanship ASEAN* pada 2023. Pertemuan dilaksanakan secara hybrid pada 8 Agustus 2024, berbarengan dengan *ASEAN Health Ministers' Meeting (AHMM)*. Mengusung tema “*ASEAN's Path to Health and Finance Collaboration for Sustainable Health System Resilience*”, pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan Lao PDR selaku *Co-Chairs*. Menteri Kesehatan negara anggota ASEAN hadir secara fisik, sedangkan Menteri Keuangan hadir secara daring.

Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, antara lain:

1. Pembentukan *Working Group on Finance-Health Collaboration (WG-FH)* sebagai forum koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan negara anggota, melalui pengesahan *Terms of Reference (ToR) WG-FH*.
2. Komitmen kerja sama tingkat menteri antara sektor keuangan dan kesehatan yang akan ditindaklanjuti dalam pembahasan WG-FH.
3. Pembentukan wadah pertukaran praktik terbaik terkait integrasi kebijakan fiskal dan kebijakan kesehatan antar negara anggota ASEAN.

Forum Association of Southeast Asian Nations Plus Three (ASEAN+3)

ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM+3)

Pertemuan AFMGM+3 berlangsung pada 2–5 Mei 2024 di Tbilisi, Georgia. Agenda pertemuan mencakup *Economic Review and Policy Dialogue (ERPD)* serta inisiatif dalam kerangka kerja sama keuangan ASEAN+3, yaitu (i) *RFA Future Direction*; (ii) *Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)*; (iii) *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)*; (iv) *Asian Bond Markets Initiative (ABMI)*; (v) *Disaster Risk Financing (DRF)*; dan (vi) *ASEAN+3 Future Initiatives*. Pertemuan tersebut menghasilkan *Joint Statement* yang membahas kondisi ekonomi makro kawasan dan global, penguatan kerja sama keuangan ASEAN+3, penguatan institusional AMRO, serta sejumlah tema strategis.

Joint Statement tersebut memperkuat jaring pengaman regional melalui eksplorasi struktur pembiayaan fasilitas keuangan agar efektif dalam mencegah, memitigasi, dan menyelesaikan krisis di masa depan, termasuk mekanisme penyeteroran modal (*paid-in capital*) tanpa mengurangi cadangan devisa. Sementara itu, penguatan struktur AMRO ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan kawasan dan pengelolaan CMIM, antara lain melalui penambahan struktur baru, Deputy Direktur 3 (DD3), yang akan menjalankan fungsi pengawasan dan penelitian terkait kondisi keuangan dan fiskal ASEAN+3. Indonesia mengajukan kandidat yang kuat untuk mengisi posisi DD3 tersebut.

Forum Kerja Sama Interregional

Forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

APEC Finance and Central Bank Deputies' Meeting (FCBDM)

Rangkaian *APEC Finance and Central Bank Deputies' Meeting (APEC-FCBDM)* berlangsung pada 21–24 Februari 2024 di Arequipa, Peru, dihadiri oleh 21 anggota APEC, Sekretariat APEC, serta mitra jalur keuangan *APEC Finance Ministers Process (FMP)*. Pertemuan membahas empat agenda utama keketuaan Peru di jalur keuangan, yaitu: (i) *more sustainable*, (ii) *more digital*, (iii) *more resilient*, serta (iv) *modernisasi FMP dan evaluasi Cebu Action Plan (CAP)*. Selain itu, turut dibahas perkembangan ekonomi dan keuangan kawasan.

Pertemuan didahului oleh tiga *workshop* utama, yakni: (i) *domestic carbon pricing measures*, (ii) *clean energy transition*—dengan Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu narasumber, dan (iii) *hydrometeorological risk financing and insurance*. Pada sesi *more sustainable*, dibahas pentingnya sinergi antara kebijakan *carbon pricing* dan *non-carbon pricing* dalam mencapai target NDC, dukungan pembiayaan swasta untuk transisi energi, serta usulan Peru untuk membentuk platform koordinasi *sustainable finance* di APEC. Dalam sesi *more digital*, CAFF menekankan pentingnya *open finance* dan literasi keuangan digital, di mana survei OECD menunjukkan skor literasi digital rata-rata negara APEC hanya 54 dari 100, dengan disparitas tinggi berdasarkan pendapatan, pendidikan, usia, jenis kelamin, dan lokasi.

Sementara pada sesi *more resilient*, Peru memaparkan hasil *workshop* terkait pembiayaan risiko *hidrometeorologi*, termasuk pentingnya pemahaman terhadap instrumen transfer risiko bencana dan solusi pendanaan yang terjangkau. Sejumlah anggota seperti Filipina, Hong Kong, dan Indonesia berbagi praktik terbaik. Indonesia menyampaikan kemajuan dan tantangan implementasi *Pooling Fund* Bencana, asuransi Barang Milik Negara, asuransi pertanian dan nelayan, serta pengembangan model risiko bencana.

APEC Senior Finance Officials' Meeting (SFOM)

Rangkaian pertemuan *APEC Senior Finance Officials' Meeting (SFOM)* diselenggarakan pada 27–30 Mei 2024 di Urubamba, Peru. Pertemuan ini dihadiri oleh 21 anggota APEC, Sekretariat APEC, serta mitra jalur keuangan *APEC Finance Ministers Process (FMP)*, termasuk *APEC Business Advisory Council (ABAC)*, *ADB*, *IMF*, *World Bank Group (WBG)*, *OECD*, *UNDP*, *IDB*, dan *PECC*. Agenda utama yang dibahas mencakup tiga dari empat prioritas keketuaan Peru, yakni: (i) *more sustainable* (pembiayaan infrastruktur berkelanjutan dan *sustainable finance initiative*), (ii) *more digital* (*open finance* dan edukasi keuangan digital), serta (iii) *modernisasi Finance Ministers Process (FMP)*. Pertemuan juga meninjau kondisi ekonomi dan keuangan global dan kawasan.

Pada sesi *more sustainable*, dibahas tantangan pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di kawasan APEC, terutama terkait rendahnya kepastian implementasi proyek. Selain itu, turut diperkenalkan inisiatif baru *Sustainable Finance Initiative* sebagai wadah pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar anggota APEC dalam mendorong penguatan *sustainable finance*.

APEC Finance Ministers' Meeting (FMM)

APEC Finance Ministers' Meeting (FMM) diselenggarakan pada 20–21 Oktober 2024 di Lima, Peru, sebagai puncak rangkaian jalur keuangan APEC dengan tema “*More Sustainable, More Digital, More Resilient, More APEC*”. Pertemuan dihadiri oleh Menteri Keuangan dari negara anggota APEC, lima organisasi mitra (IMF, World Bank, OECD, ADB, dan IDB), *APEC Business Advisory Council (ABAC)*, serta Sekretariat APEC. Rangkaian kegiatan terdiri dari sesi penyusunan *Joint Ministerial Statement (JMS)*, *Retreat APEC Finance Ministers*, *High-Level Event on Sustainable Finance*, dan *Plenary APEC FMM*.

Dalam sesi *Retreat*, para ketua delegasi membahas empat isu utama: perpajakan, reformasi dana pensiun, infrastruktur berkualitas, dan transformasi digital. Negara anggota berbagi pengalaman kebijakan, seperti Singapura dengan *Central Provident Fund (CPF)* yang multifungsi, Jepang dengan inovasi trust fund untuk infrastruktur, Kanada dengan sistem pengadaan terpusat berbasis provinsi, serta Hong Kong melalui pengembangan infrastruktur terintegrasi berbasis destinasi wisata.

Sesi *Plenary* membahas perkembangan ekonomi global dan regional, inisiatif APEC sepanjang 2024, serta pengenalan *inisiatif Forum for Just Energy Transition (FJET)* dari Amerika Serikat. Korea Selatan sebagai Chair APEC 2025 juga menyampaikan rencana dan prioritas tahun mendatang. APEC menekankan pentingnya keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter, kerja sama multilateral, serta penguatan sistem perdagangan global yang terbuka dan transparan.

Indonesia menyampaikan keberhasilan transisi pemerintahan yang stabil, serta desain APBN yang akomodatif terhadap program prioritas pemerintahan baru, dengan optimisme terhadap target pertumbuhan tinggi 2025–2029. Para anggota menyampaikan apresiasi atas capaian keketuaan Peru dan menerima hasil pertemuan sebagai bagian dari *output APEC FMM 2024*.

Forum Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)

Diskusi IPEF melibatkan koordinasi aktif antara Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan. Keppres Pembentukan Tim Perunding IPEF telah terbit pada 4 Juni 2024.

Badan Kebijakan Fiskal terlibat dalam pembahasan Pilar III (*Clean Economy*) dan Pilar IV (*Fair Economy*), terutama dalam proses ratifikasi perjanjian Pilar IV dan tindak lanjut *forum IPEF Clean Economy Investor Forum (CEIF)* terkait pendanaan iklim yang mendukung bisnis kawasan Indo-Pasifik.

Kerja Sama Bilateral

Dialog Kebijakan

Macro-Economic Dialogue Indonesia-European Commission

Macro-Economic Dialogue antara Kementerian Keuangan dan *European Commission (EC)* pertama kali digelar pada 17 April 2024 di sela *Spring Meetings IMF–World Bank* di Washington, DC. Dialog ini merupakan inisiatif dari EC dan membahas dua isu utama: *macroeconomic update* dan *green transition*.

Menteri Keuangan menyampaikan harapan agar dialog ini menjadi tonggak kerja sama erat Indonesia–UE, serta menyoroti dampak ketegangan global terhadap ekonomi dan respons kebijakan Indonesia. Sementara itu, Komisioner EC memaparkan reformasi ekonomi Uni Eropa dan pendekatan terhadap kebijakan makroekonomi serta transisi hijau.

Pertemuan Bilateral dengan Negara Mitra

Selama Januari–September 2024, tim *ad-hoc* telah menyiapkan 93 bahan pertemuan bilateral untuk Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, seluruhnya disampaikan tepat waktu. Penyusunan bahan terbagi ke dalam beberapa periode: 18 bahan (Januari–Februari), 23 bahan (Maret–April), 10 bahan (Mei), 10 bahan (Juni), 12 bahan (Agustus–September), dan 21 bahan (Oktober–November), termasuk sejumlah pertemuan bilateral tambahan yang merupakan inisiatif Badan Kebijakan Fiskal.



Pertemuan Bilateral dengan Menteri Keuangan Arab Saudi

Pada 16 Januari 2024, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Arab Saudi, Mohammed Abdullah Al-Jadaan, di sela *Spring Meetings WB–IMF* di Washington, DC. Pertemuan membahas sejumlah isu strategis, antara lain: (i) tantangan perekonomian global dan perkembangan ekonomi Arab Saudi; (ii) dukungan Indonesia terhadap peningkatan modal *Islamic Development Bank (IsDB)*; (iii) dukungan Arab Saudi terhadap inisiatif *G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF)* di mana Indonesia dan Italia menjadi *Co-Chairs 2024*; (iv) agenda pembiayaan iklim dan pembangunan berkelanjutan; (v) kerja sama Selatan–Selatan terkait ekonomi haji dan umrah; serta (vi) dukungan terhadap Palestina di tengah konflik yang berlangsung.



Pertemuan Bilateral dengan *Treasurer of Australia*

Pada 28 Februari 2024, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, melakukan pertemuan bilateral dengan *Treasurer Australia*, H.E. Jim Chalmers, di sela *G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting di São Paulo, Brasil*. Pertemuan membahas sejumlah isu penting, antara lain: (i) dukungan Australia terhadap inisiatif *G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF)* di mana Indonesia dan Italia menjadi *Co-Chairs 2024*; (ii) perkembangan *G20 Transition Finance Framework* yang diinisiasi pada presidensi Indonesia dan menjadi agenda prioritas tahun ini; (iii) dukungan Australia atas upaya Indonesia menjadi anggota OECD; serta (iv) penguatan

kemitraan Indonesia–Australia, khususnya dalam *sustainable finance* dan rantai pasok kendaraan listrik. Selain itu, *Treasurer Chalmers* menyampaikan keinginan Australia untuk mengusulkan penerapan standar ESG pada mineral strategis, termasuk nikel, dalam forum G20.



Pertemuan Bilateral dengan Wakil Menteri Keuangan RRC

Pada 28 Februari 2024, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, melakukan pertemuan bilateral dengan Vice Minister of Finance Republik Rakyat Tiongkok, Lao Min, di sela *G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting* di São Paulo, Brasil. Pertemuan membahas beberapa isu strategis, antara lain: (i) dampak signifikan ekonomi Tiongkok terhadap perekonomian global, dengan pertumbuhan kuartal I yang melampaui ekspektasi; (ii) kerja sama Indonesia–Tiongkok dalam ekonomi berkelanjutan, termasuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik; (iii) dukungan Tiongkok terhadap *interoperability taksonomi* antara forum G20 dan ASEAN; (iv) dukungan atas inisiatif Sino-Indonesia Energy Transition Partnership (ETP) yang diajukan oleh PLN; (v) dorongan kepada Tiongkok sebagai pemegang saham terbesar *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* untuk memfasilitasi pinjaman lunak sektor publik; serta (vi) pertukaran pengalaman mengenai *carbon credit*, seiring rencana Indonesia menerapkan *carbon exchange* market pada akhir 2024.



Pertemuan Bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD

Pada 29 Februari 2024, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, melakukan pertemuan bilateral dengan *Secretary-General Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, Mathias Cormann, di sela *G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting* di São Paulo, Brasil. Pertemuan membahas: (i) dukungan negara-negara anggota OECD terhadap proses aksesi penuh Indonesia setelah melalui diskusi di OECD Council sejak September 2023 hingga Januari 2024; (ii) apresiasi Indonesia atas fasilitasi penyelenggaraan *OECD Economic Survey of Indonesia 2024*; serta (iii) dukungan Indonesia terhadap *inclusive framework* dalam *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* sebagai bagian dari reformasi perpajakan internasional.



Pertemuan Bilateral dengan Komisioner Ekonomi – Uni Eropa

Pada 29 Februari 2024, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, melakukan pertemuan bilateral dengan *European Commissioner for Economy – European Union (EU)*, Paolo Gentiloni, di sela *G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting* di São Paulo, Brasil.

Pertemuan membahas sejumlah isu penting, antara lain: (i) dukungan terhadap *inisiatif Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) 2024*, di mana Indonesia dan Italia menjadi *Co-Chairs* di bawah presidensi Brasil; (ii) hasil evaluasi *EU Deforestation Regulation* yang menyatakan bahwa industri kelapa sawit Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan dan berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*; (iii) penguatan dialog kebijakan makroekonomi antara Indonesia dan *European Commission*; serta (iv) dukungan Uni Eropa terhadap aksesi penuh Indonesia sebagai anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, termasuk dalam proses di OECD Council.



Pertemuan Bilateral dengan Menteri Keuangan dan Pembangunan Nasional II Singapura

Pada 25 Oktober 2024, Wakil Menteri Keuangan II RI, Thomas Djiwandono, melakukan pertemuan bilateral dengan *Second Minister for Finance and National Development of Singapore*, Indranee Rajah, di sela *Annual Meeting IMF–World Bank Group* di Washington, D.C., Amerika Serikat. Pertemuan membahas sejumlah isu strategis, antara lain: (i) prioritas pembangunan Indonesia di bawah pemerintahan baru pada 2025; (ii) pengalaman *Energy Transition Mechanism (ETM)* Singapura dan potensi penerapannya di Indonesia, khususnya terkait pengembangan *transition bond* dan *carbon market* untuk menarik investasi asing; (iii) isu kawasan dalam kerangka ASEAN dan ASEAN+3, serta sinergi kepentingan Indonesia–Singapura menjelang *Chairmanship Malaysia* di ASEAN 2025 dan *Co-Chairmanship Malaysia–Tiongkok* di ASEAN+3; serta (iv) peningkatan investasi Singapura di Indonesia, terutama di bidang energi bersih, hilirisasi sumber daya alam, dan pengembangan sumber daya manusia.



Pertemuan Bilateral dengan Menteri Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan

Pada 24 Oktober 2024, Wakil Menteri Keuangan II RI, Thomas Djiwandono, melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy and Finance of South Korea, Choi Sang-mok, di sela *Annual Meeting IMF–World Bank Group* di Washington, D.C., Amerika Serikat. Pertemuan membahas sejumlah isu strategis, antara lain: (i) prioritas Indonesia dan target pembangunan di bawah pemerintahan baru pada 2025; (ii) tantangan perekonomian global dan respons kebijakan fiskal Korea; (iii) dukungan Indonesia terhadap Korea sebagai *Chair APEC 2025*, termasuk prioritas dalam jalur keuangan APEC; serta (iv) penguatan kerja sama bilateral dan peluang peningkatan investasi Korea di Indonesia.



Pertemuan Bilateral dengan Menteri Keuangan Brazil

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Finance of Brazil, H.E. Fernando Haddad, pada 25 Juli 2024 di sela-sela *Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG)* di Rio de Janeiro, Brazil. Pertemuan membahas sejumlah topik strategis, antara lain: (i) transisi *finance framework* dari Presidensi G20 Indonesia ke Presidensi G20 Brazil, khususnya terkait *sustainable finance*; (ii) reformasi *Multilateral Development Banks (MDB)* dan tantangan yang dihadapi negara berkembang; serta (iii) potensi penyelenggaraan *high-level policy dialogue* antara Indonesia dan Brazil untuk berbagi pengalaman terkait desentralisasi fiskal dan program kesejahteraan.



Pertemuan Bilateral dengan Menteri Keuangan Republik Afrika Selatan

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Finance of the Republic of South Africa, Enoch Godongwana, pada 24 Juli 2024 di sela-sela *Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG)* di Rio de Janeiro, Brazil. Pertemuan membahas sejumlah hal, antara lain: (i) kesinambungan agenda G20 saat Presidensi Afrika Selatan pada 2025, termasuk isu *health equity*, penanganan darurat, dan respons kesehatan; (ii) perkembangan ekonomi global dan kondisi ekonomi Afrika Selatan yang berada di bawah ekspektasi; (iii) penguatan

hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Afrika Selatan; serta (iv) ajakan kepada Afrika Selatan untuk berkolaborasi melalui Indonesia Aid dalam kerangka *South-South and Triangular Cooperation* (KSST).

Pertemuan Bilateral Lainnya

Pembahasan *Subsidiary Agreement* (SA) KINETIK Hub dengan Australia KINETIK Hub merupakan wadah koordinasi program KINETIK—kerja sama transisi energi Indonesia dan Australia senilai AUD200 juta selama lima tahun. Program ini lahir dari kesepakatan Presiden RI dan PM Australia pada 2022 dalam kerangka *Climate and Infrastructure Partnership*.

KINETIK Hub berperan memastikan implementasi program berjalan terkoordinasi dan sesuai target. Pemerintah Australia mengundang Kementerian Keuangan, khususnya Badan Kebijakan Fiskal, sebagai mitra strategis dalam hub ini. Saat ini, proses penyusunan *Subsidiary Arrangement* (SA) tengah berlangsung, sebagai kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan DFAT, mengacu pada *General Agreement on Development Cooperation* (GADC) 1998.

Pembahasan SA difasilitasi oleh PKRB bersama unit terkait, seperti Kemlu, Kemenko Perekonomian, DJPPR, dan Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal. Rapat koordinasi telah dilaksanakan untuk finalisasi substansi dan naskah perjanjian.

Kerja Sama Perdagangan Internasional

The Eight Round of ASEAN-China FTA 3.0 Upgrade Negotiations

Pertemuan putaran ke-8 negosiasi peningkatan ASEAN-China FTA 3.0 diselenggarakan pada 5–9 Agustus 2024 di Ha Long, Viet Nam. Pembahasan difokuskan pada sejumlah klausul perjanjian dagang, termasuk *Modality for Further Liberalization*.

RRT mengajukan informal counter proposal berisi dua opsi liberalisasi. Indonesia menerima opsi 1 dengan ketentuan tambahan liberalisasi: RRT (12%), ASEAN-7 (4%), Kamboja dan Myanmar (masing-masing 2%), serta Lao (2 pos tarif). Namun, Indonesia menolak negosiasi *offer* tanpa *request*.

RRT menawarkan tiga skenario: (1) modalitas disepakati sebelum AEM-MOFCOM Summit, *request-offer* menyusul; (2) seluruh negosiasi *Market Access* dihapus; (3) pendekatan satu kali *offer* tanpa request. RRT menegaskan hanya menerima skenario 3, namun akan konsultasi informal dengan AMS. Sebagian besar negara condong pada skenario 1 dan 3, sementara Indonesia dan Vietnam mendukung skenario 1. Indonesia menilai skenario 1 paling realistis, sedangkan skenario 3 akan menyulitkan proses ratifikasi karena tidak ada request yang menjadi dasar manfaat *upgrade* ACFTA. Jika perlu, Indonesia membuka opsi skenario 2 yang berarti penghentian proses *Trade in Goods*.

Dalam Kaukus ASEAN, Singapura mengusulkan percepatan *end rate* dengan *staging period*

maksimal 10 tahun, namun ditolak Indonesia karena mengarah pada komitmen *RCEP Plus* sebagaimana tercantum dalam opsi 2.

Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership (ICA-CEPA) **Putaran ke-10**

Putaran ini digelar pada 4–8 November 2024 di Bandung. Sejumlah *working group (WG)* berunding secara paralel membahas pasal-pasal perjanjian. Pada *WG Rules of Origin*, kedua negara menyepakati substansi Bab ROO, termasuk isu penting seperti *Accumulation of Production, Net Cost, Remanufacturing Goods*, aksesori, kemasan, dan ambang batas set.

Pada *WG National Treatment and Market Access*, telah disepakati liberalisasi akses pasar sebesar 81%. Indonesia mengusulkan penambahan artikel *Cooperation* terkait bioteknologi dan isu lain, yang akan dibahas lebih lanjut oleh *WG Ecotech*. Kedua pihak juga menyepakati penghapusan metode baku pada artikel Transposisi HS, dengan ketentuan bahwa *Trade in Goods Committee* dapat meninjau transposisi jika berpotensi lebih protektif.

Pada *WG Investment*, draf Bab Investasi telah disepakati sepenuhnya dan tinggal menunggu penyelesaian *legal drafting*. Sementara pada *WG Financial Services*, draf Bab FS hampir selesai, dengan satu catatan: perlu referensi non-substantif ke pasal relevan dalam bab investasi dan jasa perdagangan yang akan dicantumkan dalam pasal *Scope*.

Perundingan Indonesia-EU: Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) **Putaran ke-17**

Perundingan putaran 26 Februari–1 Maret 2024 ini berlangsung di Bandung membahas 13 isu secara paralel di tingkat *Chief Negotiator* dan *Working Groups (WG)*. PKRB mengikuti *WG Rules of Origin (ROO)*, *WG Investment*, dan *Chapter Subsidi*. Pada *WG ROO*, dibahas teks ROO, *origin procedures*, dan *Annex Product Specific Rules*. Kedua pihak akan konsultasi internal atas produk yang belum disepakati, dengan tindak lanjut di perundingan berikutnya di Brussels pada 13–17 Mei 2024.

Pada *WG Investment*, pembahasan mencakup *Liberalisation of Investment* dan *Investment Protection Agreement*. Kedua pihak akan melanjutkan diskusi secara internal sebelum dibawa ke Joint Session selanjutnya. Pada *Chapter Subsidi*, dibahas kembali teks Bab Kompetisi. Indonesia dan EU menyampaikan klarifikasi atas posisi masing-masing dan sepakat melanjutkan dialog teknis tentang transparansi.

The 106th ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS)

Pertemuan CCS ASEAN berlangsung pada 26 Februari–2 Maret 2024 di Bandung, dihadiri oleh negara anggota ASEAN, *ASEAN Secretariat*, dan kementerian/lembaga terkait. Beberapa isu utama yang dibahas antara lain: (i) Vietnam mengusulkan masa tenggang tambahan 1 tahun untuk *ratchet obligation*, menyesuaikan dengan komitmen mereka di CPTPP; (ii) hingga batas waktu 5 Februari 2024, tidak ada negara ASEAN-6 yang menyerahkan *draft* awal *ATISA NCM Schedule*, sehingga CCS menetapkan tenggat baru hingga 29 Maret 2024; (iii) Singapura mengusulkan dukungan teknis dari ERIA atau mitra pengetahuan lainnya

untuk membantu penilaian draf NCM; (iv) Indonesia telah menyerahkan draf NCM sektor jasa keuangan kepada Kemendag untuk konsolidasi lebih lanjut, dengan catatan bahwa paket AFAS ke-9 baru akan ditandatangani setelah pemerintahan baru terbentuk.

CCS juga menyepakati pelaksanaan pertemuan selanjutnya, yaitu CCS ke-107 pada 3–7 Juni 2024 di Kamboja dan CCS ke-108 pada 21–25 Oktober 2024 di Jakarta.

Kerja Sama Pembiayaan Risiko Bencana

The 15th Meeting of ASEAN Cross-Sectoral Coordination Committee on Disaster Risk Financing and Insurance (ACSCC-DRFI)

Pertemuan ACSS–DRFI diselenggarakan pada 4–7 Desember 2023 di Ha Long Bay, Vietnam dan dihadiri oleh negara anggota ASEAN, ICRM, NTU, dan ASEAN Secretariat. Pertemuan membahas empat agenda utama, yaitu: 1) pembaruan ADRFI pasca-AFMGM, yang mencakup laporan pelaksanaan program pengembangan kapasitas pada pilar *risk assessment and advisory, health and finance collaboration*, dan *capacity building*, serta rencana pelatihan *aquaculture micro-insurance* pada 2024; 2) posisi ADRFI dalam inisiatif DRF ASEAN+3, di mana seluruh negara ASEAN menyepakati kelanjutan pembahasan platform ADRFI-2 dalam forum ASEAN+3, meskipun Indonesia, Kamboja, dan Vietnam menyatakan perlunya diskusi internal terkait perluasan cakupan topik; 3) jadwal pertemuan ADRFI berikutnya yang akan dilaksanakan *back-to-back* dengan AFCDM-WG pada Februari 2024 di Lao PDR; dan 4) perkembangan pembentukan *ASEAN Cross-Sectoral Working Committees (ACS-WC)*, di mana Indonesia menyampaikan usulan struktur awal ACS-WC yang terdiri atas *tiga working groups*, yakni *Working Group on Disaster Risk Financing and Insurance*, *Working Group on Finance–Health Collaboration*, dan *Working Group on Food Security*, serta mendorong penyesuaian ToR ADRFI agar selaras dengan pembentukan ACS-WC. Forum secara umum menyatakan dukungan atas inisiatif Indonesia tersebut.

The 11th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD)

Pertemuan dilaksanakan pada 19 Februari 2024 di *United Nations Conference Centre*, Bangkok, dan dihadiri oleh sejumlah NGO internasional seperti UNICEF, UNDP, ESCAP, ILO, UNESCO, UNFPA, UNHABITAT, UNHCR, UN Women, dan WFP. Pertemuan bertujuan untuk 1) mendorong dialog dan berbagi pengalaman antar pembuat kebijakan, praktisi pembangunan, pakar, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan perlindungan sosial; 2) membahas visi, praktik terbaik, serta rekomendasi dalam merespon tantangan sosio-ekonomi saat ini; dan 3) memberikan arah agenda perlindungan sosial di tingkat regional. Indonesia berpartisipasi dalam sesi ketiga *“Financing for enhanced social protection”* dan memaparkan *inisiatif Pooling Fund* Bencana sebagai instrumen strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana, yang akan diintegrasikan dengan *Adaptive Social Protection (ASP)*.

Selain itu, Indonesia menegaskan pentingnya perluasan instrumen pembiayaan iklim dan risiko bencana guna mendukung sistem perlindungan sosial yang adaptif. Pendekatan terintegrasi ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, tetapi juga membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

Pada triwulan III 2024, Badan Kebijakan Fiskal mewakili Kementerian Keuangan dalam Kelompok Kerja Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan (Kornas KSS), yang diwakili oleh Kepala PKRB dan Analis Muda Devi Yanti Br. Bangun, serta didukung oleh pelaksana Gilang Bayu Utomo. Keterlibatan PKRB mencakup dua inisiatif kerja sama, yaitu: 1) Proyek *Strengthening Capacities for Policy Planning for the Implementation of the 2030 Agenda in Indonesia and in the Global South (SDGs SSTC)* yang didukung Pemerintah Jerman melalui *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)*. Proyek ini memasuki awal fase kedua, dan GIZ mengundang para pemangku kepentingan untuk menyusun visi dan strategi bersama melalui kegiatan *Strategic Visioning* pada 29–30 Juli 2024 di Bogor.



GIZ juga merencanakan lokakarya *Gender Equity, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* pada 25 September 2024 yang turut mengundang PKRB Badan Kebijakan Fiskal. 2) Proyek *South-South Triangular Cooperation in Decentralised Renewable Energy (SSTC DRE)*, kerja sama antara Kementerian ESDM dan GIZ, dengan PKRB sebagai bagian dari tim pengarah. Kegiatan mencakup rapat evaluasi pelaksanaan *exchange* pertama serta persiapan untuk *exchange* kedua pada November 2024. Rencana kegiatan yang telah disampaikan antara lain: SSTC Kenya (pekan I–II, luring, diselenggarakan Indonesia), SSTC Nepal (pekan IV, daring), dan SSTC Madagascar (daring).

Kerja Sama Multilateral

Badan Kebijakan Fiskal turut berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan dalam rangka penguatan diplomasi dan posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral. Beberapa pertemuan penting yang dihadiri secara aktif oleh Delri selama tahun 2024, di antaranya:

The Spring Meetings of The International Monetary Fund – World Bank Group (IMF-WBG) Tahun 2024

Rangkaian pertemuan *The Spring Meetings of the International Monetary Fund – World Bank Group* (IMF-WBG) Tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 15-20 April 2024 di Kantor Pusat IMF-WBG yang berlokasi di Washington D.C., Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia (Delri) dipimpin oleh Menteri Keuangan (selaku Gubernur WBG di Indonesia) bersama Gubernur Bank Indonesia, termasuk pada Pertemuan Kedua Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 (*2nd G20 FMCBG Meeting*) dalam rangkaian pertemuan Spring Meeting tersebut.



Beberapa pertemuan utama yang dihadiri oleh Delri antara lain *Development Committee Ministerial Lunch*, *Development Committee Meeting*, pertemuan terbatas *Early Warning Exercise (Restricted EWE)*, *International Monetary and Finance Committee (IMFC) Breakfast*, pertemuan IMF *Fiscal Forum*. Selain itu, Delri juga hadir pada dua *side event* WBG yaitu “*Unleashing the Power of Digital Transformation to Enhance Connectivity in ASEAN*” dan “*Transforming Challenge into Action: Expanding Health Coverage for All*”.

Sebagai hasil pertemuan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi global masih mengalami tekanan yang antara lain disebabkan oleh dampak panjang COVID-19, tingginya tensi geopolitik, tingginya tingkat suku bunga yang menyebabkan tekanan utang di negara berkembang dan berpendapatan rendah, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta dinamika politik global yang masih tidak menentu.

Di sisi lain, reformasi WBG mendapatkan sorotan baik melalui *World Bank Group Evolution Roadmap* guna terciptanya WBG yang lebih besar, lebih baik, dan lebih berani (*bigger, better, bolder*).

The Annual Meetings of the International Monetary Fund – World Bank Group (IMF–WBG) Tahun 2024

Rangkaian The Annual Meetings of the International Monetary Fund – World Bank Group (IMF–WBG) Tahun 2024 berlangsung pada 22- 26 Oktober 2024 di Washington DC, Amerika Serikat. Kegiatan ini mencakup Pertemuan Keempat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 (The 4th G20 FMCBG Meeting) di bawah Presidensi Brazil, serta Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Perubahan Iklim. Delegasi Kementerian Keuangan dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono.



Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Wamenkeu menghadiri sejumlah acara utama dan side events. Pada Annual Roundtable of ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors IMF, diskusi berfokus pada tantangan ekonomi ASEAN di tengah kompleksitas situasi global. Pemerintah Indonesia menyampaikan target pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sumber daya manusia serta ketahanan di sektor pangan, energi, dan air. Selain itu, Wamenkeu juga mewakili Southeast Asia Voting Group (SEAVG) dalam Development Committee Plenary untuk membahas reformasi operasional World Bank, termasuk dukungan pada replenishment IDA21 untuk membantu negara-negara miskin dan rentan.

Dalam sesi bilateral, Indonesia menjalin dialog dengan World Bank, Islamic Development Bank, serta negara mitra seperti Belanda, Singapura, dan Australia untuk memperkuat kolaborasi dalam investasi, perdagangan, serta inovasi pembiayaan.

Dari hasil pertemuan ini, disimpulkan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi global pada 2024- 2025 stabil meskipun rentan terhadap berbagai risiko, seperti konflik geopolitik, kebijakan proteksionis, dan perlambatan di Tiongkok serta Eropa. Indonesia berkomitmen memperdalam reformasi domestik dan memperkuat kerja sama internasional untuk memastikan pertumbuhan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat multilateralisme yang diusung dalam forum-forum internasional tersebut

The 49th Islamic Development Bank Annual Meetings (48th IsDB AM) 2024

Rangkaian *49th IsDB Annual Meeting* diselenggarakan pada 27–30 April 2024 di Riyadh, Arab Saudi, mengusung tema “*Cherishing Our Past, Charting Our Future: Originality, Solidarity, and Prosperity*”. Pertemuan ini menjadi momentum spesial dalam rangka 50 tahun berdirinya IsDB dan menjadi wadah dialog negara anggota, organisasi internasional, dan sektor swasta mengenai isu-isu pembangunan global.



Delegasi Indonesia (Delri) menghadiri *plenary session*, *governors roundtable*, serta beberapa *side events* dan pertemuan bilateral dengan negara mitra dan pimpinan IsDB. Dalam *governors roundtable*, Delri menyampaikan dukungan atas inisiatif pembentukan *new concessional window* dan mendorong agar IsDB dapat mencontoh skema pembiayaan konsesional dari lembaga pembangunan multilateral lainnya, mengingat sebagian besar negara anggota IsDB merupakan negara berpenghasilan menengah ke bawah.

Indonesia juga menekankan pentingnya tata kelola yang akuntabel dan dukungan pendanaan dari negara donor untuk memperkuat fungsi pembiayaan ini. Pada *side events*, Delri turut berpartisipasi dalam diskusi mengenai transisi energi dan pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang diusung Indonesia.

Sebagai pemegang saham terbesar ketiga IsDB, Indonesia menegaskan komitmennya

sebagai mitra strategis dalam reformasi kelembagaan dan operasional IsDB, serta terus mendukung kolaborasi konkret untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di negara-negara anggota.

The 57th Asian Development Bank (ADB) Annual Meeting



Pertemuan *57th ADB Annual Meeting* dan *27th ASEAN+3 Finance Ministers' Meeting* berlangsung pada 2–5 Mei 2024 di Tbilisi, Georgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Keuangan sebagai Gubernur ADB untuk Indonesia, didampingi perwakilan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Dalam *Governor's Plenary*, Menteri Keuangan memaparkan strategi Indonesia dalam memobilisasi pendanaan sektor swasta, termasuk penerbitan SBN, insentif fiskal, dan implementasi *Energy Transition Mechanism (ETM)*. Indonesia juga mendorong agar ADB memperkuat perannya dalam pembiayaan iklim yang selaras dengan Perjanjian Paris dan menjalankan reformasi institusi yang lebih efektif.

Di forum *AFMGM+3*, Indonesia menekankan pentingnya penguatan *Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)* sebagai jaring pengaman keuangan kawasan, serta mendorong kerja sama regional dalam mendukung stabilitas keuangan dan transisi energi. Selain itu, Indonesia menyatakan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kontribusi pada *Asian Development Fund 14*.

The 9th Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Annual Meeting

Sidang Tahunan ke-9 *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* diselenggarakan pada 25–26 September 2024 di Samarkand, Uzbekistan, dengan tema *Building Resilient Infrastructure for All*. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, didampingi perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bappenas, dan KBRI Tashkent.

Dalam seminar bertema kesehatan dan iklim, Wamenkeu menekankan pentingnya integrasi kebijakan kesehatan dalam strategi perubahan iklim dan perlunya pendanaan infrastruktur kesehatan yang adaptif. Dalam *Governors' Business Roundtable*, Indonesia mengusulkan penguatan AIIB melalui optimalisasi neraca, reformasi operasional, dan pendirian kantor perwakilan.

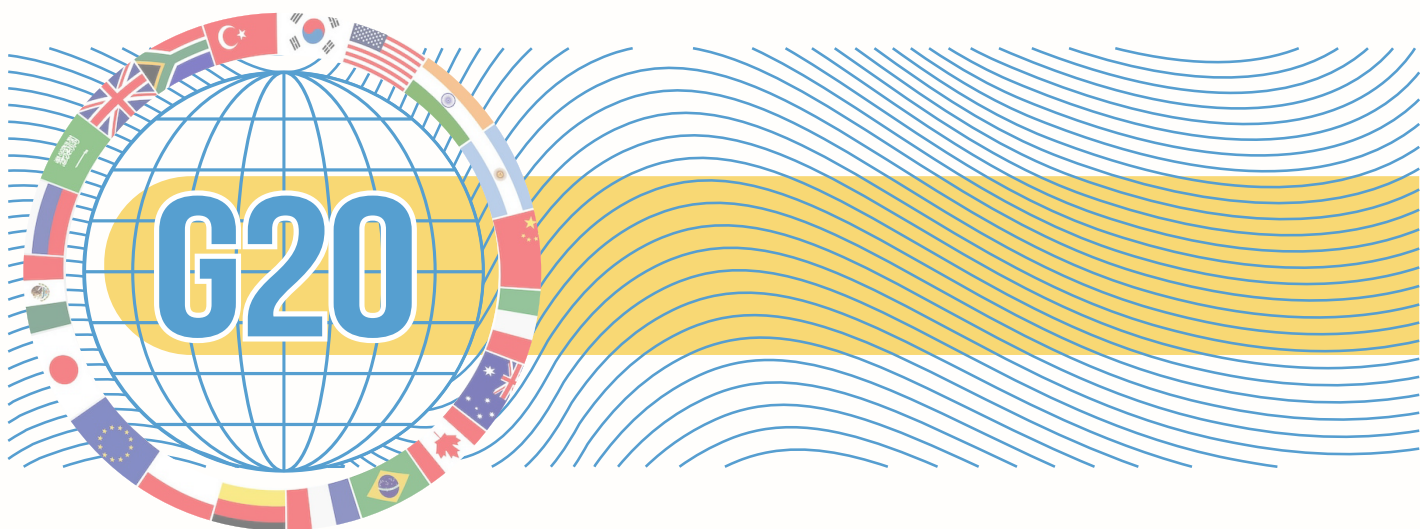


Pada *Governors' Official Session*, disetujui penerimaan Nauru sebagai anggota baru, lokasi Sidang 2025 di Beijing, dan pengangkatan pejabat baru. Presiden AIIB memaparkan capaian sembilan tahun AIIB, termasuk pendanaan USD54,7 miliar untuk 285 proyek. Delri menegaskan komitmen Indonesia sebagai mitra strategis AIIB, mendorong reformasi, dan mendukung pembentukan kantor AIIB di Indonesia.

Partisipasi Aktif dalam Pertemuan-pertemuan Jalur Keuangan pada Forum G20

Badan Kebijakan Fiskal mendukung partisipasi aktif Menteri Keuangan pada Jalur Keuangan (*Finance Track*) di Forum G20, baik pada tingkat *working group*, *deputies*, *ministers*, maupun *leaders* (G20 summit meeting) di bawah Presidensi Brazil sepanjang tahun 2024. Adapun pada tingkat *working group*, pertemuan yang dihadiri oleh Delri dan didukung oleh Badan Kebijakan Fiskal pada Jalur Keuangan, antara lain (1) *Framework Working Group (FWG)*; (2) *International Sustainable Architecture Working Group (IFAWG)*; (3) *Sustainable Finance Working Group (SFWG)*; (4) *Infrastructure Working Group (IWG)*; (5) *Global Mobilization*

Against Climate Change Task Force Meeting (TF Clima); dan (6) Joint Finance and Health Task Force (JFHTF).



Pada tahun 2024, isu pembahasan dan kesepakatan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota G20 di Jalur Keuangan, antara lain:

1. Dunia masih menghadapi tantangan global seperti tingginya utang negara berkembang, tensi geopolitik, proteksionisme, risiko stabilitas keuangan, digitalisasi, hingga perpajakan internasional. Negara anggota G20 menekankan pentingnya kebijakan kolektif dan semangat multilateralisme dalam menghadapinya.
2. Negara G20 menyambut kemajuan terkait pajak minimum global untuk perusahaan multinasional, serta mendorong percepatan penyelesaian *simplified approach transfer pricing* agar *Multilateral Convention* dapat segera ditandatangani.
3. Pendanaan campuran dari sumber publik, swasta, MDB, dan filantropi dinilai penting untuk mendukung aksi iklim dan transisi, terutama di negara berkembang. Penguatan sistem keuangan dan konsistensi standar global turut ditekankan.
4. Transisi energi dianggap sebagai peluang mendorong pertumbuhan, memperkuat ketahanan, menurunkan biaya energi, dan menciptakan lapangan kerja di sektor hijau dan teknologi baru.
5. Negara anggota mendukung Peta Jalan G20 untuk memperkuat kapasitas MDBs agar lebih besar, efektif, dan berdampak. Diskusi mengenai peningkatan modal atau optimalisasi sumber daya akan dilanjutkan pada Presidensi Afrika Selatan 2025.
6. Indonesia menyampaikan keprihatinan atas hambatan perdagangan negara maju yang mengganggu integrasi global dan transisi hijau. Indonesia juga menekankan pentingnya reformasi domestik, ketahanan pangan-energi, serta mendesak penuntasan penandatanganan STTR MLI dalam kerangka Inclusive Framework.

KERJA SAMA & KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM

Pada tahun 2024, Badan Kebijakan Fiskal terus memperkuat kerja sama dan kebijakan pembiayaan untuk mendukung upaya penanganan perubahan iklim. Fokus diarahkan pada pengembangan instrumen fiskal hijau, optimalisasi pembiayaan inovatif, serta kolaborasi dengan mitra internasional. Langkah ini bertujuan memperluas sumber daya pembiayaan berkelanjutan dan mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dukungan Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan melalui *Energy Transition Mechanism (ETM)*



Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca melalui *Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC)*, salah satunya dengan meluncurkan *Energy Transition Mechanism (ETM)* yang bertujuan mendorong pengembangan energi terbarukan dengan skema *blended financing*. Dalam implementasinya, pemerintah bekerja sama dengan ADB dan menunjuk PT SMI sebagai manajer platform transisi energi. Adapun capaian terkini ETM pada 2024 diantaranya proses pembahasan penyelesaian *Energy Transition Mechanism Investment Package (ETM IP)* yang merupakan skema pembiayaan konsesional berupa pinjaman dan hibah antara Pemerintah Indonesia dan ADB untuk mendukung inisiatif transisi energi di Indonesia.

29th Conference of Parties United Nations Framework Convention on Climate Change (COP29 UNFCCC)

COP29 UNFCCC digelar pada 11–22 November 2024 di Baku, Azerbaijan. Delegasi Kementerian Keuangan RI dipimpin oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang menghadiri agenda tingkat tinggi pada 14–15 November, didukung tim teknis sebagai *lead negotiator isu climate finance* sejak awal rangkaian. Partisipasi ini mencerminkan peran aktif Kemenkeu dalam negosiasi pendanaan iklim global.

Delegasi hadir dalam berbagai pertemuan utama, termasuk COP29 *Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Action* dan sesi bilateral dengan *Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP)*, Brasil, dan Amerika Serikat. Dalam forum-forum ini, Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk mendukung transisi energi dan keuangan adaptasi, termasuk pengurangan biaya pinjaman serta valuasi karbon yang adil bagi negara pemilik hutan tropis seperti Indonesia, Brasil, dan Kongo.

Di arena negosiasi, pembahasan utama meliputi *New Collective Quantified Goal (NCQG)* dan *Long-Term Finance*. Indonesia menyoroti perlunya komitmen pendanaan yang adil dan proporsional terhadap *historical emissions*, serta menolak skema yang mewajibkan mobilisasi dana domestik secara paksa dari negara berkembang. Indonesia juga mendorong transparansi target pendanaan USD100 miliar per tahun melalui laporan *Standing Committee on Finance (SCF)*.

Di sisi lain, pengesahan Pasal 6.2 membuka ruang legal bagi kerja sama perdagangan karbon bilateral. Indonesia menyambut hal ini dengan menyiapkan perluasan kemitraan ke negara-negara seperti Singapura, Jerman, dan Belanda, serta mendorong penguatan peran lembaga keuangan internasional dalam mendukung mekanisme transisi energi yang berkeadilan.

11th & 12th Ministerial Meeting of The Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA)

Pertemuan tingkat Menteri Keuangan dalam kerangka *Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA)* berlangsung pada 17 April dan 23 Oktober 2024, dipimpin bersama oleh Indonesia dan Belanda di sela agenda *IMF–WBG Spring dan Annual Meeting*.

Pada *11th Ministerial Meeting*, dibahas peran strategis Kementerian Keuangan dalam penyusunan dan pembiayaan *Nationally Determined Contribution (NDC)* berikutnya, termasuk isu penghapusan subsidi bahan bakar fosil, penetapan harga karbon, dan mobilisasi pasar obligasi global untuk transisi yang adil.



Pada *12th Ministerial Meeting*, anggota CFMCA mendeklarasikan *Joint Climate Action Statement (CAS) 2024* sebagai kelanjutan dari CAS 2023, yang menegaskan dukungan Kemenkeu terhadap NDC 3.0 menjelang pengajuan ke UNFCCC pada awal 2025. Pertemuan juga membahas integrasi penilaian risiko iklim dalam perencanaan makroekonomi serta pengembangan instrumen pembiayaan iklim.

Koalisi turut mengesahkan *Coalition Charter* yang mempertegas sifat *member-driven* dan memperjelas tata kelola pendanaan serta peran pemangku kepentingan. Indonesia mendorong agar piagam ini menjadi dasar bagi transformasi koalisi yang lebih terarah dan berdampak.

Penugasan sebagai *National Designated Authority* pada *Green Climate Fund (NDA GCF)*

Badan Kebijakan Fiskal sebagai Sekretariat NDA GCF untuk Indonesia tengah melaksanakan program *GCF Readiness Fase III (RPSP III)* dengan tema “*Enhancing Indonesia’s Access to International Climate Finance and Private Sector Investments for Climate Actions*”. Program ini disetujui pada September 2022 dengan pendanaan sebesar USD2.504.422 dan didukung oleh *Green Growth Institute (GGGI)* sebagai mitra pelaksana. Program mencakup tiga *workstream* utama:

- **Workstream 1:** Meningkatkan alokasi pendanaan perubahan iklim di seluruh sektor prioritas;
- **Workstream 2:** Meningkatkan kapasitas serta penguatan *project pipeline* Entitas Terakreditasi Nasional (*Direct Access Entities/DAE*);
- **Workstream 3:** Meningkatkan investasi sektor swasta dalam aksi iklim.

Beberapa capaian dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024, antara lain:

Penguatan *Project Preparation Facility (PPF)* terkait Program Transisi Energi

PT SMI telah melaksanakan pengajuan revisi ketiga kepada GCF untuk nota konsep dan fasilitasi penyiapan proyek (*Project Preparation Facility/PPF*) berjudul "*Climate Finance Facility to Support Energy Transition*". PPF ini juga telah memperoleh dukungan dana pendamping dari *Global Energy Alliance for People and Planet* (GEAPP) sebesar USD 1,5 juta. Sebagai langkah selanjutnya, PT SMI telah mengajukan permohonan *No- Objection Letter* (NOL) kepada NDA pada bulan Oktober 2024.

Penguatan Entitas Nasional dalam Mendorong Akses Pendanaan GCF

Bantuan teknis terhadap Bank CIMB Niaga dalam proses akreditasi GCF

Sebagai salah satu upaya mendukung sektor swasta dalam pendanaan iklim, NDA memberikan dukungan kepada Bank CIMB Niaga dalam penyusunan kebijakan internal, yaitu kebijakan *Environment and Social Safeguard* serta kebijakan *Information Disclosure*. Secara paralel, NDA juga melakukan diskusi dengan CIMB Niaga dalam mengidentifikasi sektor potensial (sektor pertanian dan manufaktur hijau) yang ke depannya akan digunakan untuk mengembangkan nota konsep serta penyiapan fasilitas persiapan proyek (*Project Preparation Facility/PPF*)

Dukungan terhadap Kemitraan sebagai DAE

NDA dan Kemitraan tengah membahas beberapa agenda penting, termasuk pengembangan PPF BRAVE di Jawa Tengah yang masih menunggu penunjukan konsultan dari Sekretariat GCF. *Concept note* untuk *Adaptation Finance Facility* juga sedang direvisi sebelum disampaikan ke NDA. Secara paralel, Kemitraan merancang program *Readiness* khusus DAE terkait IRMF yang mencakup: 1) penilaian kebutuhan organisasi internal, 2) pelatihan manajemen proyek dan isu perubahan iklim, dan 3) pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi. Program ini bertujuan memperkuat kesiapan kelembagaan untuk mengakses pendanaan GCF secara langsung.

Kajian Pendukung: Usulan Strategi dan Rekomendasi Kebijakan

Studi Technology Needs Assessment

Studi ini bertujuan memetakan ekosistem teknologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor-sektor prioritas, dengan fokus pada kebutuhan pembiayaannya. Konsultasi hasil awal telah dilakukan bersama pemangku kepentingan sektor energi, kehutanan, tata guna lahan, pangan, dan air, dengan dukungan konsultan Deloitte. Temuan dari konsultasi ini akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan serta hambatan dalam implementasi 12 teknologi prioritas di keempat sektor tersebut.

Penyiapan Blended Finance Fora dan Penyusunan Kerangka Awal Mekanisme Blended Finance

Blended Finance Fora yang bertujuan mendorong peningkatan investasi sektor swasta dan

pendanaan alternatif dalam proyek iklim kini memasuki tahap awal pelaksanaan. Sepanjang Agustus hingga September 2024, konsultan melakukan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan guna menggali tantangan, peluang, dan praktik terbaik *blended finance* di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan ini juga menjadi dasar penyusunan kerangka *blended finance*, yang diawali dengan tinjauan pustaka dan identifikasi isu kunci. Selanjutnya, NDA bersama konsultan akan mengadakan diskusi terfokus untuk memvalidasi temuan dari tahap awal tersebut.

Pengembangan Pedoman Pendanaan Iklim untuk Sektor Prioritas (Climate Finance Guidebook)

Buku pedoman tersebut memuat lanskap pendanaan iklim di Indonesia serta informasi teknis, termasuk kriteria dan tahapan yang diperlukan untuk mengakses pendanaan program perubahan iklim. Penyusunannya telah dimulai melalui *kick-off meeting* antara tim NDA, GGGI, dan konsultan. Proses berlanjut dengan penyusunan kerangka kebijakan *blended finance*, yang diawali dengan tinjauan pustaka sebagai langkah awal kegiatan studi.

Pelibatan Pemangku Kepentingan yang Inklusif

Penyelenggaraan Lokakarya

Sekretariat NDA bekerja sama dengan *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) dan *Climate Bonds Initiative* menyelenggarakan lokakarya untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan nasional, khususnya pemerintah daerah, sektor agribisnis, dan lembaga keuangan, dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program *Sub-national Climate Fund* (SnCF) oleh IUCN yang didanai GCF sejak 2021.

Pengembangan dan Pembaharuan Platform Climate Finance Focal Points (CFFP)

CFFP akan diintegrasikan dengan data penganggaran iklim dari pemerintah yang telah diidentifikasi melalui mekanisme *Climate Budget Tagging* (CBT) untuk menyediakan informasi pendanaan dari sumber internasional dan publik.

Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Tingkat Nasional (*Climate Budget Tagging/CBT*)

Sejak 2016, Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan kegiatan *Climate Budget Tagging* (CBT) sebagai upaya untuk mengukur dan mengoptimalkan dukungan APBN terhadap penanganan perubahan iklim. Setiap tahunnya, kegiatan ini menghasilkan laporan yang digunakan sebagai instrumen transparansi publik, akuntabilitas pengelolaan APBN, serta sebagai referensi kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi. Pada tahun 2024, Badan Kebijakan Fiskal kembali menyusun laporan CBT yang memuat informasi alokasi dan realisasi anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tahun 2022–2023, sekaligus menganalisis efektivitas pemanfaatannya di berbagai sektor prioritas.

Pada aspek mitigasi tahun 2022, total anggaran mencapai Rp23,55 triliun, dengan dominasi sektor energi dan transportasi sebesar 82,6%. Sektor kehutanan dan limbah menyusul dengan porsi lebih kecil, sementara sektor pertanian dan IPPU mencatatkan proporsi di bawah 3%. Di tahun 2023, alokasi mitigasi menurun signifikan menjadi Rp10,30 triliun, namun sektor energi tetap menjadi penyumbang utama, diikuti oleh sektor limbah. Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam menjaga konsistensi pembiayaan mitigasi, terutama dalam konteks transisi energi rendah emisi.

Sementara itu, anggaran adaptasi pada tahun 2022 mencapai Rp42,70 triliun dengan sektor air sebagai prioritas utama (48,8%), mencerminkan pentingnya pengelolaan sumber daya air dalam konteks perubahan iklim. Di tahun 2023, alokasi adaptasi menurun menjadi Rp30,24 triliun dengan sektor kebencanaan dan kelautan menjadi fokus tambahan. Penurunan ini menandakan perlunya optimalisasi strategi pendanaan adaptasi agar tetap responsif terhadap kerentanan iklim dan sosial.

Dari total belanja negara tersebut, potensi *underlying assets* untuk pembiayaan inovatif melalui SBN hijau mencapai Rp44,77 triliun pada 2022 dan Rp29,00 triliun pada 2023. Temuan ini menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam merancang strategi pendanaan yang lebih terarah dan berdampak. Selain itu, laporan CBT menjadi sarana komunikasi strategis kepada publik dan mitra internasional dalam menunjukkan komitmen Indonesia terhadap transparansi dan akuntabilitas pendanaan iklim.

Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Tingkat Daerah (*Regional Climate Budget Tagging/RCBT*)



Pada tahun 2024, proses *Regional Climate Budget Tagging* (RCBT) diperluas ke seluruh pemerintah provinsi, didukung oleh pengembangan sistem *autotagging* berbasis data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) oleh DJPK. Inisiatif ini selaras dengan arah

kebijakan pembangunan rendah karbon nasional dan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC). Regulasi seperti Permendagri No. 7/2018 dan No. 10/2023 turut memperkuat integrasi isu iklim ke dalam RPJMD dan RKPD.

Meskipun kerangka regulasi semakin kuat, tantangan masih dihadapi di level implementasi, termasuk keterbatasan kapasitas teknis, koordinasi antar sektor, dan pemantauan anggaran. Melalui RCBT, pemerintah daerah dapat mengevaluasi tren alokasi anggaran mitigasi dan adaptasi dari tahun ke tahun, yang sekaligus menjadi indikator komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan. Data ini juga penting untuk meningkatkan transparansi dan menarik pembiayaan eksternal.

Informasi anggaran iklim daerah, jika dikombinasikan dengan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), dapat dimanfaatkan untuk merancang instrumen keuangan hijau seperti obligasi atau sukuk hijau. Pemanfaatan APBD sebagai *underlying asset* dapat memperluas akses terhadap pendanaan inovatif, memperkuat kepercayaan investor, dan mempercepat implementasi program iklim di tingkat daerah.

Penandaan Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender



Sejak 2018, Badan Kebijakan Fiskal telah melaksanakan sejumlah inisiatif terkait penandaan anggaran perubahan iklim yang responsif gender, seperti kajian pendanaan iklim responsif gender (2018), kajian keterkaitan pembiayaan iklim dengan kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan (2019), asesmen awal instrumen ekonomi dan pendanaan responsif gender (2021), serta penyusunan dan uji coba pedoman penandaan PIRG (2021–2023).

Saat ini, Badan Kebijakan Fiskal masih melaksanakan tiga kegiatan yang terkait dengan penandaan anggaran perubahan iklim responsif gender.

Penandaan anggaran perubahan iklim yang responsif gender di tingkat nasional

Sejak tahun anggaran 2019, telah dilakukan penandaan anggaran perubahan iklim yang responsif gender (PIRG) pada delapan Kementerian/Lembaga (K/L) yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUUR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dari uji coba penandaan anggaran PIRG, terdapat beberapa temuan penting antara lain:

1. KPUUR memiliki anggaran PIRG terbesar setiap tahunnya
2. Penurunan anggaran PIRG sekitar 24% dari nominal awal sejak tahun 2019-2023
3. Dominasi aksi mitigasi dalam alokasi anggaran PIRG diikuti adaptasi dan kemudian *co-benefit*.

Asesmen awal gender pada instrumen *Green Sukuk*

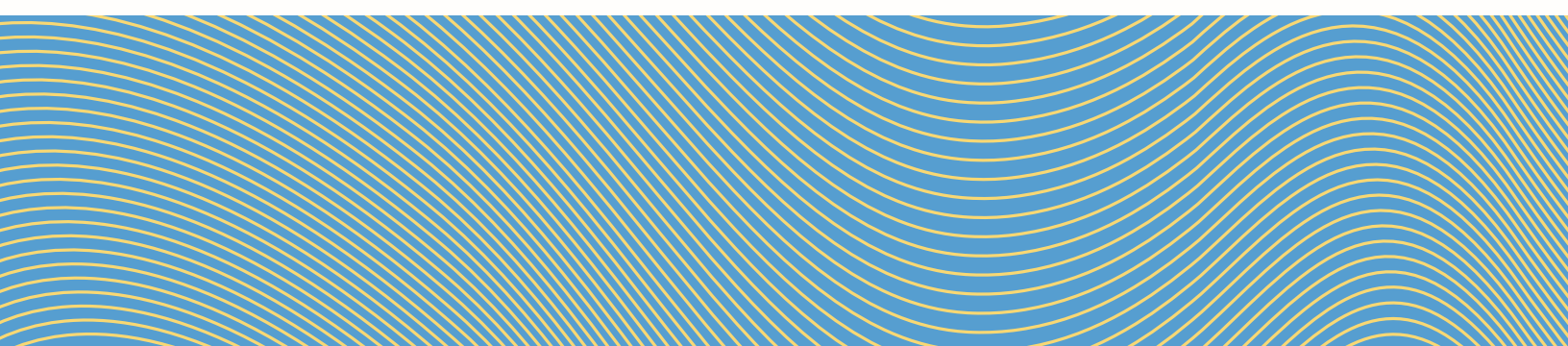
Sebagai langkah memperluas isu gender dalam pendanaan iklim yang inovatif, sedang dilakukan analisis aspek *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) pada instrumen pendanaan *Green Sukuk*. Tujuan dari analisis ini meliputi:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis aspek gender dalam proyek *Green Sukuk* di Indonesia.
2. Menyajikan rekomendasi kebijakan dan program untuk mengintegrasikan aspek gender dalam proyek *Green Sukuk*.
3. Membangun indikator asesmen Pengarusutamaan Gender (PUG) guna meninjau proyek-proyek *Green Sukuk* selanjutnya.

Asistensi teknis bagi Pemerintah Daerah

Untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam kegiatan iklim, pelatihan awal telah dilakukan di empat wilayah: Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi DIY, dan Kabupaten Gunung Kidul. Tahun 2024, asistensi teknis difokuskan kepada Pemkot Surabaya yang dinilai memiliki komitmen tinggi terhadap isu iklim dan gender. Kegiatan serupa juga direncanakan di Kabupaten Wakatobi melalui proyek *National Adaptation Plan* (NAP).

Saat ini, pemerintah daerah belum diwajibkan melakukan penandaan anggaran terkait perubahan iklim maupun gender. Oleh karena itu, Badan Kebijakan Fiskal akan menyusun kata kunci untuk mendukung sistem *autotagging* APIRG di tingkat nasional dan daerah.



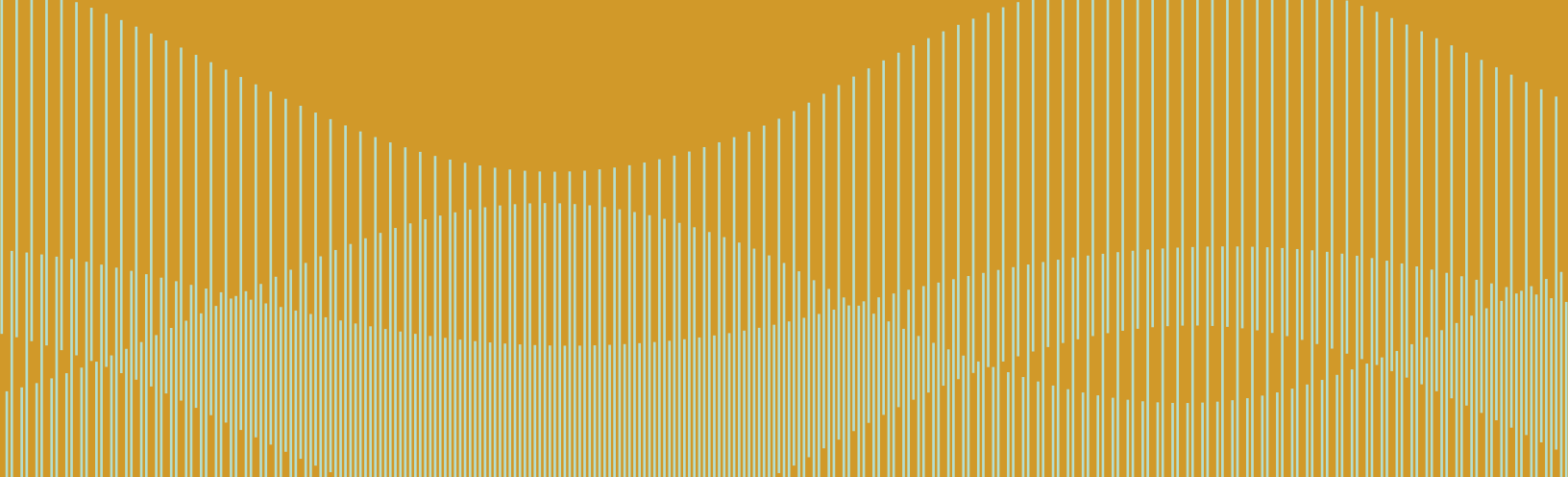


BAB 3

DUKUNGAN

KESEKRETARIATAN

Satu-satunya hal yang tetap adalah perubahan. Badan Kebijakan Fiskal bersiap menjawab tantangan dengan lebih gesit dan tepat sasaran demi membawa dampak lebih besar.

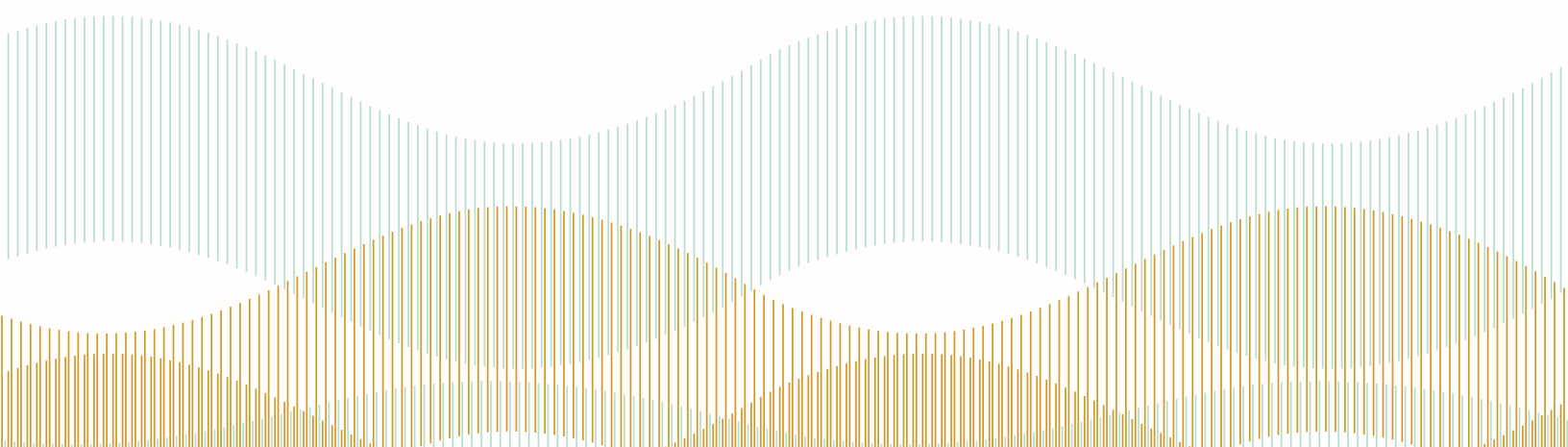


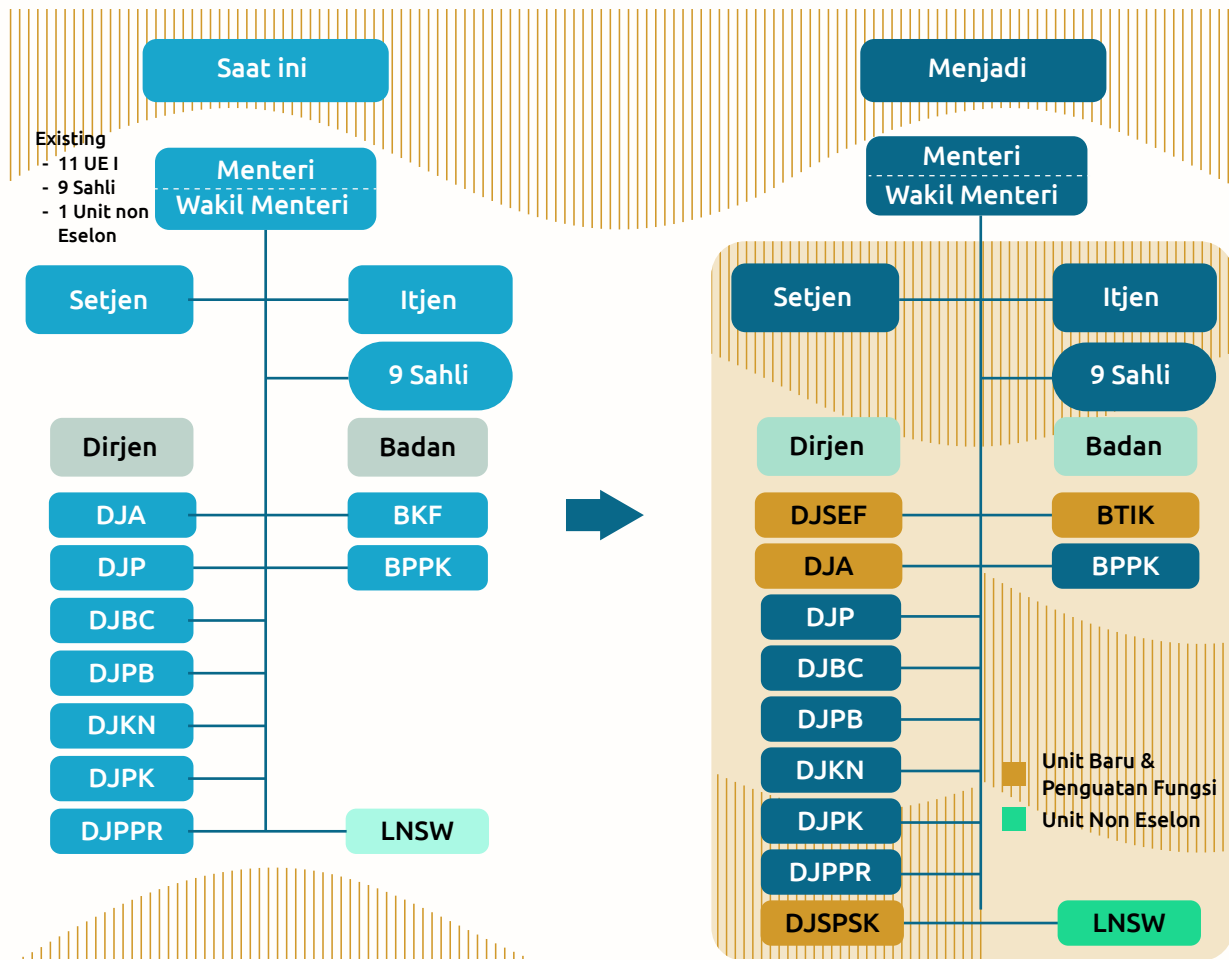
Transformasi Organisasi

Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi Badan Kebijakan Fiskal dalam menjalani transformasi organisasi secara menyeluruh. Transformasi ini lahir sebagai respons terhadap penataan ulang struktur dan fungsi Kementerian Keuangan yang terjadi pasca berjalannya pemerintahan baru. Dalam Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, Kementerian Keuangan kini memiliki peran strategis yang lebih signifikan, dengan tanggung jawab langsung kepada Presiden dan tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Langkah ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Perpres 139/2024), Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Perpres 140/2024), dan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Perpres 158/2024).

Refocusing dan Penguatan Kelembagaan

Penguatan peran strategis Kementerian Keuangan menuntut peningkatan kapasitas koordinasi dan pengendalian lintas sektoral. Dalam konteks ini, penataan kelembagaan difokuskan pada Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit strategis. Transformasi yang dilakukan mencakup tidak hanya perubahan nomenklatur, tetapi juga penajaman fungsi perumusan kebijakan fiskal, serta penguatan sektor keuangan dan kerja sama internasional. Sebagai *think tank* Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal melakukan reorganisasi untuk menyesuaikan diri dengan amanah Perpres 158 Tahun 2024 dan kebutuhan penguatan kelembagaan yang baru.





Sesuai amanat Perpres 158 Tahun 2024, Badan Kebijakan Fiskal bertransformasi menjadi dua Direktorat Jenderal, yakni Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) dan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK). Transformasi menjadi DJSEF bertujuan memperkuat peran strategis dalam perumusan kebijakan makrofiskal, sektoral, pendapatan negara (termasuk PNBPN), belanja, dan pembiayaan, serta fungsi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Struktur DJSEF dibentuk dari tiga pusat kebijakan yang sebelumnya berada di bawah Badan Kebijakan Fiskal, yaitu Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan APBN, dan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, dengan penyesuaian nomenklatur direktorat dan perluasan fungsi.

Sementara itu, penguatan sektor keuangan juga diwujudkan melalui pembentukan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), untuk mendukung implementasi UU Nomor 4 Tahun 2023. DJSPSK dibentuk dari transformasi tiga pusat kebijakan di Badan Kebijakan Fiskal, yaitu Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, diperkuat dengan penggabungan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dari Sekretariat Jenderal.

Sekilas DJSEF: *Beyond Policy Recommendation*

Proses penataan kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Keuangan dalam menjawab kompleksitas kebijakan ekonomi dan fiskal saat ini. Kelembagaan DJSEF diatur melalui PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang secara jelas menetapkan tugas, fungsi, dan struktur organisasinya.

DJSEF bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal—sebuah mandat yang berbeda secara signifikan dari Badan Kebijakan Fiskal sebelumnya yang hanya memberikan rekomendasi kebijakan. Dengan status sebagai direktorat jenderal, DJSEF kini memiliki peran yang lebih strategis dan operasional: tidak hanya memberi masukan, tetapi juga mengawal kebijakan hingga ditetapkan, diterima, dan diimplementasikan secara efektif, demi mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun fungsi yang dijalankan DJSEF meliputi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, DJSEF terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Strategi Stabilisasi Ekonomi;
- c. Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi;
- d. Direktorat Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi;
- e. Direktorat Strategi Perpajakan;
- f. Direktorat Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- g. Direktorat Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sekilas DJSPSK: Penguatan Kebijakan Sektor Keuangan & Kerja Sama Internasional

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor keuangan nasional. Untuk mendukung mandat tersebut, dilakukan penguatan terhadap Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) yang sebelumnya berada di bawah Badan Kebijakan Fiskal, menjadi satu unit eselon I tersendiri yakni Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Jika sebelumnya PKSK berfungsi sebagai penyusun rekomendasi kebijakan, kini DJSPSK memiliki mandat lebih luas, termasuk merumuskan kebijakan pengembangan sektor keuangan, literasi dan inklusi keuangan, penguatan sektor keuangan untuk mendukung sektor riil, serta pelaksanaan manajemen aktuaria pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 4/2023.

Selain PKSK, unit lain yang mendukung penguatan sektor keuangan seperti Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) yang sebelumnya berada di bawah Sekretariat Jenderal juga digabungkan ke dalam DJSPSK berdasarkan PMK Nomor 124 Tahun 2024. Fungsi kerja sama internasional yang sebelumnya berada di Badan Kebijakan Fiskal—yakni kerja sama bilateral dan regional (PKRB) serta kerja sama multilateral dan pembiayaan iklim (PKPPIM)—ikut tergabung ke dalam struktur DJSPSK sebagai bagian dari penguatan peran dan cakupan unit baru ini.

Adapun DJSPSK memiliki fungsi sebagai berikut.

- a. Perumusan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional;
- d. Pelaksanaan fasilitasi Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional;
- f. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional;
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, DJSPSK terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya;

- c. Direktorat Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria;
- d. Direktorat Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan;
- e. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan;
- f. Direktorat Kerja Sama Regional dan Bilateral; dan
- g. Direktorat Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan.

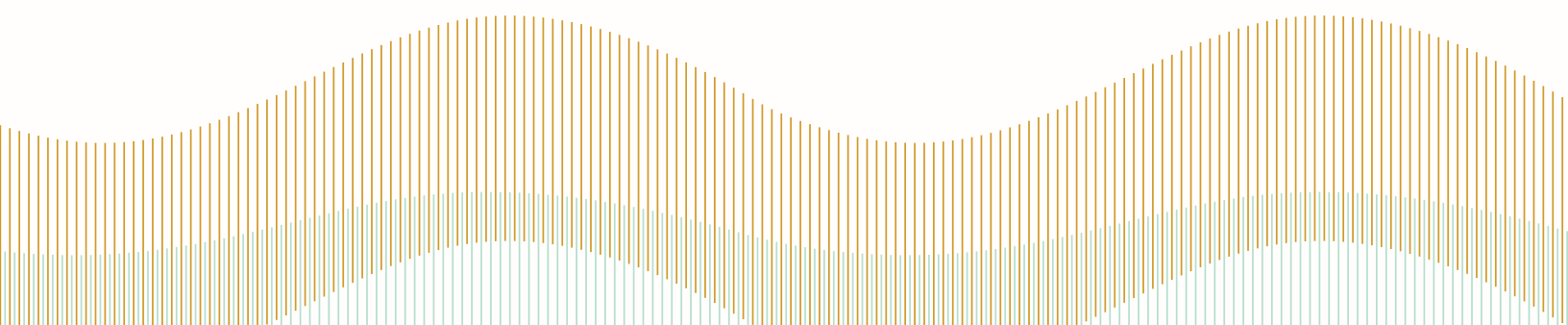
Dukungan Keuangan

Realisasi Pendapatan dan Belanja di Badan Kebijakan Fiskal TA 2024

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.231.009.234 yang sebagian besarnya berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang sudah tidak terpakai di Badan Kebijakan Fiskal. Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Kebijakan Fiskal tidak memiliki estimasi pendapatan.

Sementara untuk Realisasi Belanja Negara pada Badan Kebijakan Fiskal selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp67.219.210.043 atau mencapai 90,57 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp74.220.215.000. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

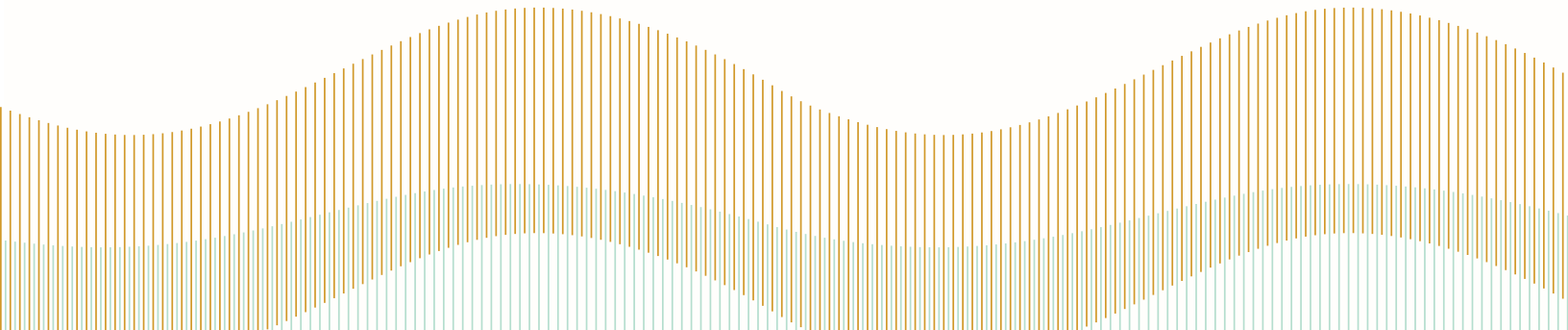
Uraian	Anggaran	31 Des 2024 Realisasi	%
Pendapatan Negara		2.231.009.234	
Belanja Negara	74.220.215.000	67.219.210.043	90,57



Realisasi Belanja per Kegiatan Badan Kebijakan Fiskal

Realisasi belanja Badan Kebijakan Fiskal per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Realisasi Belanja	%
CE	Program Kebijakan Fiskal			
4762	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	7.874.262.000	7.536.205.404	90,71
4763	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	6.881.458.000	6.207.699.598	90,21
4764	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	11.177.546.000	10.009.706.870	89,55
4765	Komunikasi dan Edukasi	3.857.759.000	3.634.064.120	94,20
Jumlah Belanja Program CE		29.791.025.000	27.387.675.992	91,93
WA	Program Kebijakan Fiskal			
4672	Legislasi dan Litigasi	315.400.000	282.827.670	89,67
4673	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	32.686.352.000	30.125.775.744	92,17
4674	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	2.557.269.000	1.831.313.508	71,61
4675	Pengelolaan Organisasi dan SDM	8.724.187.000	7.517.163.712	86,16
4676	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	42.543.000	41.057.925	96,51
4677	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	103.439.000	86.231.678	83,36
Jumlah Belanja Program WA		44.429.190.000	39.884.370.237	89,77
Jumlah		74.220.215.000	67.272.046.229	90,64
Pengembalian Belanja			52.836.186	
Belanja Netto		74.220.215.000	67.219.210.043	90,57



Hibah di Badan Kebijakan Fiskal

Hibah *Agence Francaise de Development (AFD)*

Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan *Agence Française de Développement (AFD)* dalam pelaksanaan proyek yang mendukung reformasi kebijakan fiskal di Indonesia. Proyek *Sustainable Development Facility (SDF)* ini bertujuan meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia serta memperkuat pertukaran informasi dengan otoritas pajak Prancis.

Fokus utama proyek mencakup: (i) penguatan kebijakan perpajakan atas ekonomi digital, (ii) dukungan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim, (iii) analisis dampak *tax expenditure* terhadap perekonomian nasional, (iv) pengembangan pajak tidak langsung seperti PPN dan cukai, (v) kajian terkait *shadow economy* dan *tax gap*, serta (vi) penguatan analisis isu perpajakan internasional oleh Badan Kebijakan Fiskal.

Hibah PROSPERA

Indonesia menghadapi tantangan dalam mengumpulkan penerimaan negara untuk membiayai belanja yang terus meningkat, sambil tetap menjaga defisit anggaran dalam batas maksimal tiga persen terhadap PDB. Untuk mendukung reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, Pemerintah Australia memberikan dukungan melalui program hibah PROSPERA.

Melalui GPF *Treasury* dan AIPEG, konsultan disediakan untuk memperkuat kebijakan penerimaan serta kapabilitas Badan Kebijakan Fiskal dalam memberikan rekomendasi kebijakan. Fokus dukungan mencakup analisis perubahan Undang-Undang PPN, perpajakan internasional, dan reformasi pajak jangka menengah.

Hibah UNICEF

Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan UNICEF dalam pelaksanaan proyek UNICEF *Country Programme Action Plan (CPAP) 2021–2025*, yang mendukung kebijakan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024. Proyek ini berada di bawah tanggung jawab Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, dengan koordinasi dari Bappenas.

Hibah Program *Readiness and Preparatory Support Programme (RPSP) Phase III*

Kementerian Keuangan, melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal selaku *National Designated Authority (NDA) untuk Green Climate Fund (GCF)* di Indonesia, menerima hibah *Readiness and Preparatory Support Programme (RPSP) Phase III*. Hibah ini merupakan kelanjutan dari fase sebelumnya dan mencakup kegiatan baru yang sejalan dengan prioritas nasional.

Sebagaimana tujuan program RPSP, fase ketiga ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan NDA GCF dan meningkatkan kesiapan entitas nasional dalam mengakses pendanaan iklim dari GCF. Hibah dikelola dan disalurkan oleh *Global Green Growth Institute*

(GGGI) sebagai mitra pelaksana yang ditetapkan oleh Badan Kebijakan Fiskal.

Hibah *Climate Finance Network (CFN)*

Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam pelaksanaan program kebijakan fiskal perubahan iklim melalui hibah *Sustainable Development Financing* (SDF) fase II yang berlangsung sejak 2017 dan berakhir pada Juni 2022. Sebagai kelanjutan kerja sama tersebut, UNDP Indonesia menyampaikan komitmen untuk mendukung pembiayaan perubahan iklim melalui hibah *Climate Finance Network* (CFN), yang didanai oleh Pemerintah Kerajaan Inggris dan disalurkan melalui UNDP.

Hibah *Domestic Resources Mobilization for Sustainable Development (DRM)*

Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH* (GIZ) dari Jerman dalam pelaksanaan hibah *Domestic Resource Mobilization* (DRM). Hibah ini bertujuan memperkuat kapasitas Badan Kebijakan Fiskal dalam perumusan dan analisis kebijakan fiskal, termasuk evaluasi serta pengembangan kebijakan subsidi.

Hibah *Performing Energy Transition Through Fiscal Reform in Indonesia (PERFORM)*

GIZ dan Kementerian Keuangan kembali menjalin kerja sama melalui proyek PERFORM, dengan komitmen mendukung penguatan kerangka kebijakan fiskal untuk mendukung transisi energi dan pencapaian target iklim Indonesia. Proyek ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca melalui target *Enhanced Nationally Determined Contributions* (NDC) dan *Net Zero Emissions* (NZE), serta mendukung prioritas pendanaan iklim nasional.

Hibah *Policy for Approach and Incentive Strategy for Mineral Downstreaming*

PT Tony Blair Indonesia APAC memberikan hibah kepada Badan Kebijakan Fiskal dengan tajuk *Policy for Approach and Incentive Strategy for Mineral Downstreaming*. Hibah ini ditujukan untuk mendukung penyusunan kajian kebijakan dalam rangka promosi peningkatan dan retensi rantai nilai mineral di Indonesia.

Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan keputusan tersebut, Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Badan Kebijakan Fiskal, dengan pedoman layanan informasi publik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022.

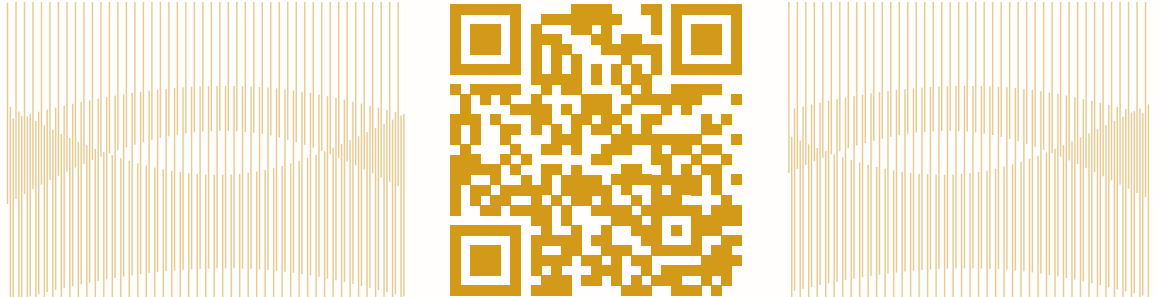
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi publik, Badan Kebijakan Fiskal membentuk Tim Dukungan Layanan Informasi Publik melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor Kep-7/KF/2024. Badan Kebijakan Fiskal berkoordinasi dengan PPID Kementerian Keuangan dalam pelayanan informasi publik, termasuk pembahasan permohonan informasi, penyusunan daftar informasi, klasifikasi informasi, dan berbagi pengetahuan.

Dukungan Pelayanan Informasi Publik

- a. Badan Kebijakan Fiskal memiliki ruang layanan yang digunakan untuk melayani pemohon informasi publik. Ruang ini berlokasi di Gedung R.M. Notohamiprodo Lantai 2, Jl. Dr Wahidin Raya No. 1, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.



- b. Sistem Informasi PPID (SIPPID) Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal menggunakan SIPPID terintegrasi yang dapat diakses oleh pemohon informasi publik melalui aplikasi e-PPID atau tautan e-ppid.kemenkeu.go.id
- c. QR Code Badan Kebijakan Fiskal menyediakan QR Code menuju laman *website* layanan PPID sehingga memudahkan pemohon informasi publik yang datang langsung ke Badan Kebijakan Fiskal.



Kanal Pendukung



Telepon

Pemohon informasi publik dapat menghubungi nomor 021-34833486 untuk menanyakan informasi terkait layanan informasi publik di Badan Kebijakan Fiskal



Email

Email yang digunakan Badan Kebijakan Fiskal dalam melakukan pelayanan informasi publik yaitu ppid.bkf@kemenkeu.go.id.



Media Sosial

Badan Kebijakan Fiskal senantiasa membagikan informasi tentang layanan informasi publik melalui media sosial Instagram dan X (@BKFKemenkeu).



Situs

Pemohon informasi publik dapat mengunjungi situs web Badan Kebijakan Fiskal pada tautan <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ppid> untuk memperoleh informasi terkait layanan informasi PPID Badan Kebijakan Fiskal.



Pengelolaan Kearsipan



Pada 2024, Badan Kebijakan Fiskal terpilih sebagai unit eselon I terbaik dalam pengawasan kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan. Audit pengawasan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal bersama Arsip Nasional Republik Indonesia. Dari 127 unit yang diaudit, hanya tiga unit meraih nilai sempurna, yaitu Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, dan Direktorat Sistem Informasi DJPK. Capaian ini menunjukkan keseriusan Badan Kebijakan Fiskal dalam pengelolaan arsip yang sesuai kaidah, dan prestasi ini perlu terus dipertahankan.

Pengelolaan kearsipan di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal dilaksanakan secara efektif sesuai dengan regulasi mengenai kearsipan. Hal tersebut tercermin dari hasil pengawasan kearsipan internal Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Kementerian Keuangan setiap tahunnya. Pada periode 2021-2024, hasil pengawasan kearsipan internal Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Badan Kebijakan Fiskal selalu meraih nilai 4 terbaik dibandingkan seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, bahkan sejak tahun 2023 Badan Kebijakan Fiskal selalu meraih nilai tertinggi dalam pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan. Di tingkat unit Pengolah, terdapat dua unit eselon II Badan Kebijakan Fiskal, yaitu Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal dan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara juga mendapat apresiasi dari Unit Kearsipan I Biro Umum, Sekretariat Jenderal sebagai unit pengolah terbaik dengan mendapatkan nilai sempurna (100) pada pengawasan kearsipan tahun 2024.

Selain kegiatan pengawasan kearsipan internal, Unit Kearsipan II Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal juga secara rutin mengadakan kegiatan pembinaan pengelolaan kearsipan kepada seluruh pengelola arsip berupa bimbingan teknis, sosialisasi peraturan kearsipan, dan kunjungan (*Study Visit*) diantaranya ke Gedung Arsip Sekretariat Jenderal dan gedung

arsip Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya, untuk mengurangi beban penyimpanan arsip konvensional di gedung arsip Badan Kebijakan Fiskal, Unit Kearsipan II Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2024 telah melakukan penyusutan arsip dengan melakukan pemusnahan arsip kertas sebanyak 1.129 bundel arsip dengan cara dicacah atau dihancurkan, serta telah melakukan penyerahan arsip sebanyak 2 bundel arsip yang memiliki nilai guna statis (permanen) kepada Unit Kearsipan I Kementerian Keuangan.



BAB 4

KEGIATAN STRATEGIS

Titian perubahan besar, tetap harus ditapaki dari serangkaian langkah yang konsisten dan terarah. Dalam setiap peristiwa besar, inilah jejak sentuhan Badan Kebijakan Fiskal di berbagai kegiatan.

Januari

Mahasiswa Program Magister Bahas Pembiayaan Perubahan Iklim dengan Badan Kebijakan Fiskal

Jakarta, 15 Januari 2024



Mahasiswa Program *Master of Public Policy in Climate Change* dan Program *Master in Sustainable Finance* Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) melakukan kunjungan ke Badan Kebijakan Fiskal untuk berdiskusi mengenai hasil dan perkembangan kebijakan pembiayaan perubahan iklim yang dihasilkan dalam *Conference of the Parties (COP)* ke-28 UNFCCC di Dubai pada 29 November hingga 13 Desember 2023. Delegasi mahasiswa yang berasal dari berbagai negara ini diterima oleh perwakilan Badan Kebijakan Fiskal Perubahan, Noor Syaifudin dan Ayudya Rachman, serta dihadiri oleh analis kebijakan. Dalam kesempatan ini, PKPPIM memaparkan perkembangan kebijakan pembiayaan perubahan iklim, termasuk posisi Indonesia yang menyerukan recall atas belum tercapainya komitmen negara maju untuk menyediakan pendanaan sebesar USD100 miliar kepada negara berkembang, serta

berbagai inisiatif nasional seperti pendirian *Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform*, kerja sama dalam *Just Energy Transition Partnership (JETP)*, dan pengembangan kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dialog publik terkait peran Kementerian Keuangan dalam negosiasi teknis maupun kegiatan nonnegosiasi dalam kerangka COP-UNFCCC, mendiseminasi hasil negosiasi *climate finance* pada COP28, serta membahas arah dan agenda negosiasi *climate finance* menjelang COP29 di Baku, Azerbaijan, pada tahun 2024. Melalui dialog ini, diharapkan pemahaman terhadap dinamika global terkait pembiayaan perubahan iklim dapat semakin meningkat, sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam mendorong komitmen dan aksi nyata di tingkat internasional.

Diseminasi Kajian Prioritas Nasional Analisis Evaluasi Dampak Insentif Perpajakan atas Fasilitas Umum Terhadap Perekonomian Nasional

Surabaya, 20 Januari 2024



Pada tahun 2024, Badan Kebijakan Fiskal melaksanakan kajian berjudul Analisis Evaluasi Dampak Insentif Perpajakan atas Fasilitas Umum terhadap Perekonomian Nasional sebagai bagian dari kajian prioritas nasional. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pembangunan fasilitas umum di Indonesia, struktur biaya dan perlakuan insentif fiskal terhadap fasilitas tersebut, dampak insentif perpajakan yang diberikan, efektivitas insentif yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan insentif perpajakan yang lebih efektif dalam mendukung sektor pelayanan publik. Kajian ini melibatkan pemangku kepentingan internal Kementerian Keuangan, yaitu Badan Kebijakan Fiskal, DJP, DJA, DJPb, dan DJPK, serta pemangku kepentingan eksternal seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian

ESDM, Kementerian PUPR, Bappenas, BPS, PT PLN, PDAM, asosiasi pengusaha sektor transportasi, sumber daya air, dan kelistrikan, serta beberapa pemerintah daerah. Untuk penyempurnaan hasil kajian, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan kegiatan diseminasi pada Rabu, 20 Januari 2024, di Surabaya dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan regulator guna memperoleh masukan konstruktif.

Sosialisasi Undang Undang P2SK untuk Meningkatkan Kesiapan Industri Jasa Keuangan

Semarang, 31 Januari 2024



Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di Semarang dengan tema UU P2SK: Respon Kebijakan untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Kegiatan ini merupakan sosialisasi keempat setelah sebelumnya dilaksanakan di Jakarta, Lombok, dan Gowa, dengan tujuan meningkatkan pemahaman publik terkait tujuan penerbitan serta pokok-pokok utama UU P2SK. Acara dibuka oleh Fathan Subchi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, dan Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisiner LPS, yang menekankan bahwa UU P2SK merupakan tonggak reformasi sektor keuangan melalui pembaruan berbagai regulasi lama untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.

Sesi diskusi dipandu oleh Herman Sahaeruddin, Direktur Group Riset LPS, dengan menghadirkan beberapa narasumber dari instansi terkait. Arief Wibisono, Staf Ahli Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kemenkeu, mengangkat isu perlunya reformasi sektor keuangan, antara lain karena rendahnya literasi keuangan dan terbatasnya instrumen keuangan. Solikin M. Juhro, Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Makroprudensial BI,

memaparkan dampak UU P2SK terhadap kewenangan BI dan pentingnya sinergi melalui bauran kebijakan ekonomi nasional, meliputi koordinasi fiskal dan moneter, transformasi sektor keuangan dan riil, digitalisasi, serta penguatan ekonomi hijau. Selanjutnya, Henry Rialdi dari OJK menekankan penguatan kelembagaan OJK dalam menghadapi dinamika sektor keuangan, sementara Jarot Mahaendro dari LPS menjelaskan transformasi LPS menjadi risk minimizer dengan perluasan kewenangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab bersama peserta yang berasal dari BI, OJK, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, mahasiswa, serta wartawan di wilayah Jawa Tengah. Diharapkan melalui sosialisasi ini, kesiapan industri jasa keuangan dalam mengimplementasikan pengaturan yang diatur dalam UU P2SK dapat semakin meningkat, sekaligus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah tantangan ekonomi global.

Februari

Ultimate Talks Edisi Ke-12

Jakarta, 20 Februari 2024



Ultimate Talks merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan Badan Kebijakan Fiskal untuk memberikan informasi terbaru guna memperluas wawasan dan pendalaman substansi yang relevan, khususnya bagi pegawai Kementerian Keuangan, dengan penyajian yang ringan dan efektif. Ultimate Talks Edisi Ke-12 diselenggarakan pada 20 Februari

2024 dengan tema Menavigasi Posisi Indonesia dalam Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional, dipandu oleh Bapak Enrico David Tarigan (Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan, PKPPIM) sebagai moderator, serta menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu Bapak Bobby Wahyu Hernawan (Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral), Bapak Abdurrohman (Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro), dan Profesor Telisa Aulia Falianty (Guru Besar di Universitas Indonesia).

Dalam diskusi disampaikan bahwa perekonomian global masih diliputi ketidakpastian kompleks yang dipengaruhi oleh risiko perubahan iklim dan ketegangan geopolitik, sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi inflasi. Kondisi ini mendorong perlunya penyusunan APBN yang konservatif untuk menjaga ketahanan fiskal Indonesia terhadap gejolak global. Selain itu, perhatian Uni Eropa terhadap produk hijau mendorong penekanan pentingnya realisasi komitmen negara maju dalam penanganan perubahan iklim, mengingat kontribusi historis negara maju terhadap perubahan iklim jauh lebih besar dibandingkan negara berkembang.

Nyimak dan Bicara Kebijakan Fiskal (Nyibir Fiskal) di Universitas Sebelas Maret

Surakarta, 28 Februari 2024



Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan kegiatan Nyibir fiskal yang diikuti lebih dari 250 mahasiswa di Aula Gedung Suhardi FEB UNS. Dengan tema *Unlocking Creativity, Innovations for a Sustainable Future*, kegiatan ini meliputi penandatanganan kerja sama antara FEB UNS dan Kemenkeu, konferensi mengenai perekonomian terkini dan arah kebijakan fiskal, *talk*

show tentang ekonomi kreatif dan dukungan APBN, serta peresmian *Fiscal Corner*.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S., menyatakan pentingnya kolaborasi antara Kemenkeu dan UNS dalam pengembangan sumber daya manusia. Beliau juga menilai bahwa keberadaan *Fiscal Corner* mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di FEB UNS. Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Tengah, Tri Wahyuningsih, menegaskan bahwa Kemenkeu sebagai pengelola APBN mengemban amanah untuk sebesar-besarnya mensejahterakan rakyat Indonesia, serta mendorong mahasiswa untuk lebih dekat memahami peran dan fungsi Kemenkeu melalui keberadaan *Fiscal Corner*.

Pada sesi konferensi, Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal, Dewi Puspita, menyampaikan *overview* mengenai kondisi perekonomian terkini serta arah strategi pemerintah ke depan, dan berpesan agar generasi muda terus produktif, kreatif, dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada sesi *talk show*, Heru Mataya dari industri kreatif Solo, M. Olgiano dari Badan Kebijakan Fiskal, serta Bony Wirasmono dari Nussa Rarra menekankan pentingnya optimalisasi kekayaan budaya untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional dan mengapresiasi upaya pemerintah dalam mendukung pengembangannya.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilaksanakan pula penandatanganan kerja sama antara Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Tengah dan FEB UNS mengenai pengelolaan *Fiscal Corner*. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, S.H., M.Hum., dan Prof. Djoko Suhardjanto, M.Com. (Hons.), Ph.D., Ak., dengan tujuan mendukung penyelenggaraan pengkajian, penelitian, pelatihan, edukasi, dan publikasi terkait keuangan negara di lingkungan perguruan tinggi, serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi.

Maret

Kelas Skenario Fiskal APBN 2024 di UNESA

Surabaya, 1 Maret 2024



Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan kegiatan Kelas Simulasi Skenario Fiskal di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada 28 Februari 2024. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian Kelas Simulasi Skenario Fiskal tahun 2024 setelah sebelumnya diselenggarakan sebanyak 16 kali di berbagai kampus. Dengan tema Makin Dekat dengan Uang Kita, kegiatan ini diikuti lebih dari 150 mahasiswa program studi S1 Ekonomi dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan APBN, memberikan pengalaman praktis mengelola keuangan negara, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya isu-isu fiskal.

Acara dibuka oleh Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN), Wahyu Utomo, S.Sos., M.Si., yang juga memberikan paparan mengenai arah dan strategi kebijakan fiskal Indonesia. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa APBN bukan sekadar angka-angka, melainkan instrumen strategis untuk merespons dinamika perekonomian dan mendukung agenda pembangunan. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA, Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si., turut menyambut baik kegiatan ini dan mendorong mahasiswa UNESA untuk menjadi duta informasi yang dapat meluruskan simpang siur informasi anggaran di masyarakat.

Peserta mengikuti sesi kuliah umum dan dibagi dalam tiga kelas untuk melakukan simulasi

penyusunan kebijakan fiskal dengan bimbingan mentor dari PKAPBN. Dalam simulasi

tersebut, peserta berperan sebagai Menteri Keuangan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam merancang dan menjabarkan kebijakan fiskal untuk berbagai skenario ekonomi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan negara serta memberikan pemahaman praktis tentang dinamika penyusunan APBN dalam menjawab tantangan ekonomi nasional.

Program Pelatihan untuk Laos pada Persiapan Perhelatan Pertemuan Tahunan ASEAN

Vientiane, Laos, 25 Maret 2024



Kementerian Keuangan Indonesia dan Indonesian AID bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Laos menyelenggarakan program pelatihan bagi *liaison officers* (LO) dan *voluntary officers* (VO) pada 25 Maret 2024 di Vientiane, Laos. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan Laos dalam memperkuat agenda ASEAN serta sebagai persiapan menjelang penyelenggaraan *11th ASEAN Finance Ministers and Bank Governors' Meeting* (11th AFMGM) pada April 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Perjanjian Kerja Sama Hibah antara Pemerintah Indonesia dan Laos guna mendukung keberhasilan *ASEAN Finance Process* dalam masa keketuaan Laos.

Sesi pelatihan difasilitasi oleh diplomat senior dari Kementerian Luar Negeri Indonesia dan berfokus pada penyampaian keterampilan penting, seperti tanggung jawab LO, protokol dan etika diplomatik, serta strategi komunikasi efektif. Lebih dari 35 peserta mengikuti pelatihan ini, termasuk sesi berbagi pengalaman dari pegawai Kementerian Keuangan Indonesia yang pernah bertugas sebagai LO pada Presidensi G20 2022 dan Keketuaan

ASEAN Indonesia 2023. Kedutaan Besar RI di Vientiane turut memfasilitasi koordinasi delegasi Indonesia dan memastikan kelancaran pelaksanaan pelatihan.

Deputy Director General, External Finance Department, Kementerian Keuangan Laos, Angkhansada Mouangkham, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Laos dan Indonesia dalam program ini, serta menekankan pentingnya kesiapan LO dan VO untuk kesuksesan penyelenggaraan 11th AFMGM. Kementerian Keuangan Laos juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan Indonesia dan Indonesian AID atas dukungan yang diberikan, serta berharap dapat melanjutkan kolaborasi dalam penyelenggaraan ASEAN Treasury Forum (ATF) pada April dan ASEAN Finance and Health Ministers' Meeting (AFHMM) pada Juni 2024.

April

Shadaqah Project: Wujud Kepedulian Kecil yang Berdampak Besar **Jakarta, Ramadan 1446H**

Sejak pertama kali diinisiasi pada tahun 2019 oleh para pegawai Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Shadaqah Project (SP) telah menjadi agenda rutin yang merepresentasikan semangat berbagi dan kepedulian sosial di lingkungan Kementerian Keuangan. Melalui berbagai kegiatan amal seperti pembagian sembako, santunan, hingga pemberian takjil, SP terus hadir membawa manfaat bagi masyarakat sekitar.



Pada edisi ke-7 yang diselenggarakan selama periode Maret hingga April 2024, *Shadaqah Project* berhasil menghimpun dan menyalurkan dana sebesar puluhan juta Rupiah, seluruhnya berasal dari donasi sukarela para pegawai Badan Kebijakan Fiskal. Dana tersebut telah digunakan untuk berbagai kegiatan, antara lain:

- Takjil dan *Ifthar On The Road*

Menyediakan ifthar bagi pegawai setiap hari kerja selama bulan Ramadan serta membagikan makanan berbuka bagi warga dan pengguna jalan di sekitar Kompleks Kemenkeu.

- Pembagian Paket Sembako dan Uang Tunai

Disalurkan kepada 80 penerima manfaat dari kalangan duafa di sekitar kantor Badan Kebijakan Fiskal.

- Santunan ke Panti Asuhan Muslimin Kramat

Bantuan diberikan kepada anak-anak yatim, duafa, serta para pengasuh dan guru di panti asuhan.

- THR untuk Tenaga Pendukung Badan Kebijakan Fiskal

Sebagai bentuk apresiasi dan solidaritas, tambahan THR diberikan kepada 66 tenaga pendukung di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

Melalui *Shadaqah Project*, para pegawai Badan Kebijakan Fiskal terus meneguhkan komitmennya untuk berbagi, memperkuat empati, dan menebar manfaat secara berkelanjutan. Semoga langkah kecil ini menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang penuh kepedulian dan keberkahan.

Mei

Sosialisasi APBN kepada Mahasiswa Universitas Pelita Harapan Jakarta, 7 Mei 2024



Selain aktif memberikan pemahaman mengenai APBN dan kebijakan fiskal kepada masyarakat umum, Badan Kebijakan Fiskal juga secara konsisten menyosialisasikan pengelolaan APBN kepada generasi muda. Pada 7 Mei 2023, Badan Kebijakan Fiskal menerima kunjungan sekitar 120 mahasiswa Universitas Pelita Harapan (UPH) beserta dosen pembimbing di aula lantai dua. Dalam kegiatan ini, Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal, Febri Pasaribu, memaparkan materi terkait fungsi APBN, peran APBN dalam mendukung perekonomian saat krisis COVID-19, alasan defisit APBN tahunan, tantangan pengelolaan APBN, serta arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan, termasuk gambaran APBN tahun 2024.

Pertemuan antara Kementerian Keuangan dan kalangan akademisi, termasuk mahasiswa, rutin dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pemahaman publik mengenai pengelolaan keuangan negara. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan pemahaman generasi muda terhadap APBN semakin baik sehingga dapat mendorong dukungan masyarakat terhadap upaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal nasional.

Penyampaian Dokumen KEM-PPKF Tahun 2025

Jakarta, 20 Mei 2024



Pemerintah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2024. Disusun pada masa transisi pemerintahan, KEM PPKF 2025 mengangkat tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sebagai bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2025. Menteri Keuangan menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, dengan memperhatikan dinamika perekonomian, prospek, serta arah pembangunan nasional ke depan.

Selama satu dekade terakhir, Pemerintah mampu mengantisipasi berbagai tantangan global seperti eskalasi tensi geopolitik, disrupsi rantai pasok, pandemi COVID-19, perubahan iklim, volatilitas harga komoditas, dan dinamika sektor keuangan. Melalui instrumen fiskal dan strategi kebijakan yang adaptif, Indonesia berhasil mempertahankan ketahanan ekonomi, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,0% sebelum pandemi, pemulihan cepat pasca-kontraksi pada 2020, serta tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 5,0% dalam dua tahun terakhir. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,82% per Februari 2024, tingkat kemiskinan menurun ke 9,4% per Maret 2023, inflasi terkendali, dan kondisi fiskal membaik secara signifikan melalui pengelolaan fiskal yang *prudent* dan kredibel.

KEM PPKF 2025 dirumuskan untuk memperkuat kelanjutan penguatan ekonomi nasional dengan prinsip adaptif, fleksibel, responsif, kredibel dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga daya tarik investasi melalui stabilitas dan prediktabilitas, memperbaiki ekualitas dan inklusivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, percepatan reformasi struktural dan penguatan hilirisasi sumber daya alam.

Juni

Seminar Perkembangan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana

Palu, 5 Juni 2024



Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Universitas Tadulako menyelenggarakan Seminar Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) di Indonesia pada 5 Juni 2024 di Palu, Sulawesi Tengah. Seminar ini dihadiri oleh perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bank Dunia, mahasiswa Universitas Tadulako, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Badan Kebijakan Fiskal. Kegiatan ini bertujuan mendiseminasikan strategi pemerintah terkait pembiayaan dan asuransi risiko bencana, mengingat besarnya potensi risiko bencana di Palu seperti gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Pembukaan seminar dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Tadulako serta Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal.

Seminar terdiri atas sesi paparan dan diskusi panel. Dalam sesi paparan, Ketua Pokja Pendanaan Risiko Bencana PKRB-Badan Kebijakan Fiskal, Rita Helbra Tenrini, menyampaikan perkembangan strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana, sedangkan Ery Kurniawan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara membahas konsep dan implementasi pengasuransian Barang Milik Negara (BMN). Sesi diskusi panel dimoderatori oleh Indra Budi Sucahyo dari PKRB-Badan Kebijakan Fiskal dan menghadirkan lima panelis dari PKRB-Badan Kebijakan Fiskal, BPD LH, BPBD Kota Palu, Universitas Tadulako, serta Bank Dunia,

yang membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

Seminar ditutup oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu yang menekankan pentingnya tiga prinsip utama dalam penanggulangan bencana, yaitu ketepatan, kecukupan, dan kecepatan. Disampaikan bahwa untuk mencapai ketepatan penanganan, diperlukan data yang valid dan akurat serta sistem dan prosedur yang efektif agar respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Seminar ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya strategi pembiayaan risiko bencana untuk meningkatkan ketahanan daerah rawan bencana.

Ultimate Fest

Yogyakarta, 6 Juni 2024



Ultimate Fest merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal untuk membahas isu-isu terkini terkait kebijakan multilateral dan pembiayaan perubahan iklim, serta menjadi forum diskusi bersama akademisi dan pemangku kepentingan. *Ultimate Fest* edisi pertama mengangkat tema Menggali Potensi, Peran Strategis, dan Manfaat Indonesia sebagai Anggota *Islamic Development Bank* (IsDB) dan diselenggarakan secara luring pada 6 Juni 2024 di Hotel Royal Malioboro, Yogyakarta. Kegiatan ini terdiri atas dua sesi, yakni sesi *talk show* yang menghadirkan Kepala PKPPIM Boby Wahyu, *Country Economist* IsDB Mr. Ali Mansour, dan Sekretaris Eksekutif Universitas Islam Indonesia Hangga Fathana, serta sesi *sharing session* bersama Kunrat Wirasubrata, mantan Direktur IsDB Group di Asia Tenggara.

Sebagai hasil diskusi, disampaikan bahwa posisi Indonesia sebagai pemegang saham

terbesar ketiga di IsDB, latar belakang Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar kedua, serta status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas menjadi modal penting untuk mendorong peran, kepemimpinan, dan pengaruh Indonesia di kancah internasional. Melalui forum ini, diharapkan strategi Indonesia dalam memperkuat kontribusinya di lembaga multilateral seperti IsDB dapat semakin terarah dan optimal.

Diskusi RPP Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas

Jakarta, 14 Juni 2024



Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa, membuka ruang diskusi dengan publik, khususnya Penyandang Disabilitas, dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas. RPP ini disusun sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk memperkuat komitmen dukungan Pemerintah. Penyandang Disabilitas diketahui menghadapi hambatan lebih besar dalam akses pendidikan dan ketenagakerjaan, dengan tingkat pendidikan rendah dan partisipasi kerja yang masih terbatas. Dalam upaya meningkatkan kesetaraan, pemberian konsesi dan insentif diharapkan dapat memperluas akses terhadap layanan dasar sekaligus mendorong kontribusi ekonomi dari kalangan Penyandang Disabilitas.

Penyusunan RPP ini dilakukan melalui koordinasi Panitia Antar Kementerian (PAK) yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait. Selain itu, Pemerintah secara aktif mendengarkan aspirasi dari organisasi Penyandang Disabilitas, termasuk melalui audiensi dengan Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas, untuk memastikan kebutuhan dan pandangan mereka terakomodasi secara menyeluruh dalam RPP yang tengah disusun.

Juli

Kunjungan Studi dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan Kamboja Jakarta, 2 Juli 2024



Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Kebijakan Fiskal menerima kunjungan delegasi Kementerian Ekonomi dan Keuangan (*Ministry of Economic and Finance – MEF*) Kamboja di ruang rapat Analis lantai 1 Gedung R.M. Notohamiprodo, Badan Kebijakan Fiskal. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia, sekaligus menjadi sarana berbagi pengetahuan dalam rangka mendukung prinsip solidaritas ASEAN. Delegasi yang dipimpin oleh Mr. Tum Mongheng, *Director of Administrative and Finance* MEF Kamboja, diterima langsung oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya mempererat kerja sama antara kedua kementerian.

Kunjungan studi ini mengusung konsep *knowledge sharing*, di mana para narasumber dari Kemenkeu berdiskusi langsung dengan delegasi MEF Kamboja. Materi yang disampaikan mencakup jenis dan klasifikasi PNBP, tantangan dan solusi dalam pengelolaan PNBP, implementasi kebijakan PNBP meliputi aspek makroekonomi, pengumpulan, pencatatan, *monitoring* dan evaluasi, audit, serta legal *framework* dalam pemungutan PNBP. Narasumber berasal dari berbagai unit di lingkungan Kemenkeu, termasuk Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Kegiatan kunjungan berlangsung selama tiga hari, mulai 2-4 Juli 2024, dan diharapkan dapat memperkaya pemahaman kedua belah pihak mengenai pengelolaan penerimaan negara. Selain mempererat hubungan bilateral, kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung penguatan kapasitas fiskal di kawasan ASEAN melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antarnegara anggota.

Forum Kebijakan: Memajukan Aksi Iklim di Sektor Pertanian Indonesia

Jakarta, 11 Juli 2024



Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan PROSPERA menyelenggarakan Forum Kebijakan bertajuk Memajukan Aksi Iklim di Sektor Pertanian Indonesia pada 10–11 Juli 2024. Forum ini membahas lanskap kebijakan dekarbonisasi, ketahanan iklim, dan pembiayaan perubahan iklim di sektor pertanian, dengan tujuan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menghadapi risiko iklim serta mendukung pencapaian target Enhanced *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 40 pejabat dan pegawai lintas kementerian/lembaga terkait sektor pertanian, keuangan, dan pembangunan, serta merupakan langkah awal memperkuat kolaborasi dalam merumuskan kebijakan antisipatif terhadap kerentanan sektor pertanian akibat perubahan iklim.

Forum dimulai dengan paparan narasumber ahli dan diskusi studi kasus. Pada hari pertama, peserta menerima materi mengenai mitigasi gas rumah kaca (GRK) di subsektor tanaman pangan oleh Prof. Dr. Fahmuddin Agus dari BRIN, strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian oleh Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc., dari PROSPERA, serta mitigasi GRK di subsektor peternakan oleh Dr. Ir. RA Yeni Widiawati dari BRIN. Acara dibuka oleh Noor Syaifudin, Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal, mewakili Pusat

Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral.

Pada hari kedua, peserta mendapatkan materi tentang adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian oleh Andi Ikhwan dari Mercy Corps Indonesia dan mitigasi GRK di subsektor tanaman perkebunan oleh Joni Jupesta, Ph.D., dari PROSPERA. Selain sesi tanya jawab, peserta juga melakukan simulasi penyusunan kebijakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam kelompok kecil. Kegiatan ini mendapatkan sambutan positif dari peserta yang mengapresiasi pendekatan interaktif dan aplikatif dalam pembelajaran kebijakan perubahan iklim.

Dalam pidato penutupan, Noor Syaifudin menyampaikan bahwa sebagian solusi yang dihasilkan dari diskusi masih berupa *sunk cost*, sehingga ke depan diharapkan dapat dirancang mekanisme yang lebih berkelanjutan untuk mendorong sektor pertanian. Forum ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antarkementerian/lembaga dalam merumuskan kebijakan perubahan iklim yang lebih efektif di sektor pertanian.

Konferensi Internasional IRSA di Ambon

Ambon, 15 Juli 2024



Indonesian *Regional Science Association* (IRSA) kembali menyelenggarakan konferensi internasional ke-19 bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Universitas Pattimura (Unpatti). *19th IRSA International Conference* tahun ini diadakan di Kota Ambon, Maluku, dengan tema *Gender Inequality and Climate Change Impacts in Archipelagic Regions*. Konferensi ini bertujuan mempromosikan kemajuan penelitian di seluruh Indonesia serta mendorong penyelarasan pemikiran antara akademisi dan lembaga pemerintah untuk memberikan masukan strategis bagi Pemerintah Daerah Maluku.

Badan Kebijakan Fiskal turut berpartisipasi dalam konferensi ini dengan memaparkan beberapa hasil kajian. Di antaranya, kajian berjudul *Should Indonesia's Corporations Become Greener?* yang disampaikan oleh Lalu M. Azmi Prasetya dan Andi N.S. Kuncoro dari Badan Kebijakan Fiskal, yang menekankan pentingnya meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Kajian lain yang dipresentasikan meliputi *Analysis of the Technology Gap Impact on ICT and Export Relations* oleh Wignyo Parasian, *New Pathways Towards Inclusive and Equitable Development: Multidimensional Deprivation Measure for Indonesia* oleh Rina Karlina, serta *Did Eastern Indonesia Growth-Catch Up Inclusive* oleh Andi N.S. Kuncoro.

Konferensi ini dihadiri oleh sekitar 250 peneliti dan pakar ekonomi dari dalam dan luar negeri. IRSA telah berhasil membangun jaringan akademisi dan pembuat kebijakan yang berkontribusi tidak hanya di bidang penelitian dan publikasi akademis, tetapi juga dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis bukti di tingkat nasional, regional, dan lokal.

Agustus

Badan Kebijakan Fiskal Raih Penghargaan PPID Tingkat I Kategori Informatif Tahun 2024

Jakarta, 6 Agustus 2024



Badan Kebijakan Fiskal meraih penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Kategori Informatif Tahun 2024. Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil

Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2024 pada 6 Agustus 2024 di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan. Di tengah era disrupsi informasi dan digitalisasi, keterbukaan informasi publik menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh badan publik, sehingga Badan Kebijakan Fiskal terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasinya kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Wamenkeu menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Keuangan. Wamenkeu juga menyampaikan bahwa kemudahan akses informasi memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam berbagai tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Beliau berharap peran PPID semakin strategis, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan edukasi, menggali kebutuhan informasi masyarakat, dan menyajikannya dalam perspektif pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Knowledge Sharing Model Ekonomi Makro-Fiskal dengan Delegasi Kementerian Keuangan Nepal

Jakarta, 29 Agustus 2024



Badan Kebijakan Fiskal mewakili Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerima delegasi dari Kementerian Keuangan Nepal untuk berdiskusi mengenai penerapan model *Macroeconomic and Fiscal Model* (MFMMod) di Indonesia sebagai masukan dalam pengembangan MFMMod di Nepal. Delegasi Nepal, yang difasilitasi oleh perwakilan Bank Dunia di Indonesia, berdiskusi langsung dengan para analis kebijakan dari Badan Kebijakan Fiskal. MFMMod merupakan model ekonomi makro-fiskal yang dikembangkan Bank Dunia dan digunakan di 181 negara untuk menganalisis, memproyeksikan, dan mengevaluasi dampak

kebijakan ekonomi dan fiskal, dengan struktur model yang serupa namun parameter yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara.

Melalui kunjungan ini, diharapkan penerapan MFMod di Nepal dapat diperluas dan dioptimalkan guna mendukung pengambilan kebijakan ekonomi dan fiskal yang lebih efektif dan adaptif.

September

The 3rd Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) G20

Brasil, 9 September 2024



Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono, sebagai *Co-Chair* dari Kementerian Keuangan Indonesia, hadir pada pertemuan ketiga *Joint Finance and Health Task Force* (JFHTF) yang diselenggarakan secara hibrida dalam rangkaian Presidensi G20 Brasil pada 9 September 2024. Pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir sebelum *Joint Finance and Health Ministers Meeting* (JFHMM) dan membahas tiga agenda prioritas, yaitu *Social Determinants of Health* (SDH), *Debt-for-Health Swap Arrangements*, serta *Policy Responses on Global Health, and Social and Economic Vulnerabilities and Risks*. Dalam pertemuan ini juga disampaikan perkembangan terbaru wabah Mpox (cacar monyet), yang telah dinyatakan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat oleh Africa CDC dan WHO pada Agustus 2024.

Dalam paparannya, Parjiono menegaskan bahwa ancaman kesehatan global seperti cacar monyet dan flu burung memerlukan kewaspadaan serta langkah proaktif yang inovatif dan kolaboratif. Ia menekankan pentingnya penilaian realistis terhadap celah dan ancaman

yang ada, serta perlunya komitmen global untuk melindungi kesehatan masyarakat dunia. Penutupan pertemuan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa, yang juga memberikan pembaruan mengenai persiapan penyelenggaraan JFHMM yang akan dilaksanakan secara hibrida pada 31 Oktober 2024, bersamaan dengan sesi *Pledging Pandemic Fund* dan *WHO Investment Round*.

Selain itu, pertemuan turut dihadiri oleh Antonio Freitas dari Presidensi G20 Brasil, Sergio Lavicoli selaku *Co-Chair* dari Italia, dan *Executive Head* G20 JFHTF Sekretariat Serina Ng, serta para Deputi dan delegasi dari negara anggota G20, negara undangan, serta organisasi internasional dan regional. Pertemuan ini menjadi forum penting dalam memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menghadapi tantangan kesehatan global secara terkoordinasi.

Seminar Internasional: Strategi Keluar dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah

Jakarta, 23-24 September 2024



Badan Kebijakan Fiskal dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Dunia menyelenggarakan rangkaian acara yang terdiri dari tiga sesi yaitu seminar internasional dengan tema *Strategy for Escaping the Middle-income Trap*, *diseminasi Growth Academy ASEAN*, dan *diseminasi Knowledge for Change Program (KCP)*. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 23-24 September 2024 bertempat di Gedung Dhanapala dan Aula DJPPR, Kementerian Keuangan.

Pada sesi pertama, diselenggarakan seminar internasional dengan tujuan untuk mendiseminasikan *World Development Report (WDR) 2024* dan mendiskusikan strategi keluar dari jebakan pendapatan menengah. Selain itu, seminar bertujuan untuk membangun jaringan global para pembuat kebijakan, peneliti, akademisi, dan praktisi khususnya dari negara-negara ASEAN guna pertukaran ide dalam mengatasi tantangan pembangunan

bagi negara-negara berpendapatan menengah.

Pada sesi kedua, dilaksanakan diseminasi *Growth Academy ASEAN* yang merupakan kegiatan interaktif untuk berbagi pengalaman antara peneliti dan pembuat kebijakan, dengan fokus pada negara-negara berpendapatan menengah di kawasan ASEAN.

Pada hari kedua, diselenggarakan sesi diseminasi terkait *Knowledge for Change Umbrella Program* (KCP), sebuah inisiatif dari Grup Bank Dunia, untuk menghasilkan riset, data, dan produk analitis yang berdampak tinggi dan relevan terhadap kebijakan. KCP adalah salah satu program riset tertua di Bank Dunia dengan prioritas mencakup penguatan suara negara-negara berpendapatan menengah; menargetkan proyek-proyek yang berdampak tinggi; serta meningkatkan keterlibatan pemangku kebijakan dalam implementasi hasil-riset. KCP berfokus pada transformasi digital (termasuk AI), pembangunan yang sesuai dengan iklim, mobilisasi modal swasta, dan inovasi data.

Indonesia perlu mengeksplorasi potensi kerjasama dengan KCP, termasuk kontribusi pada KCP Trust Fund serta kemungkinan kolaborasi antar PT SMI dan Pemerintah Daerah bersama dengan Bank Dunia.



The 2nd International Tax Forum (ITF) Ke-2 Tahun 2024

Bali, 24-26 September 2024



The 2nd ITF adalah forum diskusi perpajakan yang melibatkan regulator, praktisi, akademisi, dan wajib pajak dari dalam dan luar negeri. Forum ini menjadi sarana pertukaran ide dan pengalaman, serta konsultasi publik (*meaningful participation*) dalam penyusunan kebijakan. *The 2nd ITF 2024* didukung oleh ADB, Prospera, Australian Treasury, OECD, dan IBFD.

Dengan tema *Adapting Tax Policies in a Dynamic World*, forum ini mendukung implementasi solusi dua pilar OECD: Pilar 1 terkait pemajakan ekonomi digital dan Pilar 2 mengenai pencegahan *profit shifting* dan kompetisi tarif pajak. Selain seminar dan konsultasi publik, diselenggarakan pula *workshop* tentang implementasi Pilar 2, pemajakan *artificial intelligence*, dan *tax expenditure*, serta *roundtable discussion* antarnegara ASEAN dan Sri Lanka terkait Pajak Minimum Global.

Rangkaian Kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT)

September - November 2024



Kegiatan Like IT merupakan kegiatan *flagship* kolaborasi dan sinergi empat lembaga yang terdiri atas Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya mahasiswa dan generasi muda untuk meningkatkan basis investor ritel Indonesia. Like it bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam bagaimana literasi keuangan berperan penting dalam berinvestasi dan pengelolaan keuangan yang berkualitas.

Tahun 2024 merupakan rangkaian kegiatan Like It keempat yang diselenggarakan secara bergantian oleh Kemenkeu, OJK, dan BI sebagai berikut:

- Kegiatan Like IT 2024 pertama diselenggarakan oleh Kemenkeu pada tanggal 30 September 2024 di Bogor dengan tema *Smart Investing for Better Tomorrow Youth and Sustainable Finance for SDG*.
- Kegiatan Like IT 2024 kedua diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 5 Oktober 2024 di Balikpapan dengan tema Gencarkan Investasi bagi Generasi Muda Menuju Indonesia Maju.
- Kegiatan Like IT 2024 ketiga, sekaligus penutup rangkaian kegiatan Like It 2024, diselenggarakan oleh BI pada tanggal 6-9 November 2024 di Jakarta dengan tema Generasi Muda Berinvestasi Menuju Masa Depan Cerah.

Oktober

Annual Islamic Finance Conference ke-8 Tahun 2024

Jakarta, 3-4 Oktober 2024



Pada 2024, Badan Kebijakan Fiskal kembali menggelar Konferensi Internasional Keuangan Islam Tahunan ke-8 (*The 8th Annual Islamic Finance Conference/AIFC ke-8*) secara hibrida pada 3–4 Oktober 2024 di Jakarta. Forum ini menjadi ajang penting bagi pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan praktisi untuk membahas perkembangan dan potensi keuangan publik syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. AIFC ke-8 mengangkat tema Peran dan Optimalisasi Keuangan Publik Syariah: Menggali dan Memanfaatkan Potensi dan Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan Publik Syariah untuk Pembangunan Ekonomi, sejalan dengan tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, ketidakpastian finansial, ketegangan geopolitik, dan fragmentasi perdagangan.

Melalui program *Call for Papers*, Badan Kebijakan Fiskal berhasil mengumpulkan lebih dari 337 makalah dari peserta nasional dan internasional. Dua puluh makalah terbaik dipresentasikan dalam sesi paralel, sementara 10 makalah terpilih akan dipublikasikan di jurnal terkemuka. Kontribusi riset ini diharapkan menjadi referensi penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik keuangan syariah di masa mendatang.

Sosialisasi *Pooling Fund Bencana* (PFB)

Banda Aceh, 8-10 Oktober 2024



Selama 8–10 Oktober 2024, peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nasional diselenggarakan di Banda Aceh oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan tema *Na Ingat, Seulamat!* (“Kalau kita ingat, kita selamat”) untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana. Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) turut berpartisipasi dengan mengadakan sosialisasi *Pooling Fund Bencana* (PFB) dan membuka *booth* edukasi publik.

Sosialisasi PFB pada 8 Oktober 2024 mengusung tema Inovasi Pembiayaan Risiko Bencana dalam Memperkuat Ketahanan Pemerintah Daerah terhadap Bencana. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal, Wahyu Utomo, menjelaskan bahwa PFB mengubah mekanisme pembiayaan risiko bencana dari reaktif menjadi proaktif dengan melibatkan berbagai sumber pendanaan, termasuk donor internasional. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, menegaskan bahwa PFB menawarkan solusi inovatif untuk memperkuat ketangguhan pemerintah daerah.

Booth edukasi publik dibuka selama tiga hari di Balai Meuseuraya Aceh untuk mengedukasi masyarakat mengenai latar belakang, tujuan, dan regulasi terkait PFB. Peringatan Bulan PRB ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan solidaritas seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

November

Seminar Perkembangan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana

Yogyakarta, 13 November 2024



Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan Seminar Perkembangan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) di Indonesia pada 13 November 2024 di Yogyakarta. Seminar ini dihadiri oleh perwakilan BPBD, Bappeda, BPKAD, serta dosen dan mahasiswa UGM. Kegiatan bertujuan membangun kesadaran mahasiswa dan aparatur pemerintah daerah terkait pembiayaan dan penanggulangan bencana, serta memperkenalkan perkembangan Strategi PARB. Seminar terdiri atas dua sesi, yaitu sesi pertama bertema Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana dan Perkembangannya dengan pembicara dari Badan Kebijakan Fiskal, BPD LH, dan Fakultas Geografi UGM, serta sesi kedua bertema Transfer Risiko Bencana Melalui Instrumen Asuransi dengan pembicara dari *World Bank*, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan BPKAD Provinsi D.I. Yogyakarta.

Melalui penyelenggaraan seminar ini, diharapkan akademisi dapat berperan aktif dalam mendukung riset kebencanaan, meningkatkan edukasi masyarakat, serta memperluas kesadaran terhadap pentingnya langkah-langkah penanggulangan risiko bencana di tingkat nasional dan daerah.

Diseminasi Kajian *Towards SDG 2030: A Commitment to Alleviate All Forms of Deprivation in Indonesia*

Jakarta, 21 November 2024



Dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan LPEM UI dan UNICEF Indonesia menyelenggarakan diseminasi kajian *Towards SDG 2030: A Commitment to Alleviate All Forms of Deprivation in Indonesia* di Auditorium MM-UI, Jakarta. Kajian ini menyoroti kemiskinan anak melalui penyusunan *Multidimensional Deprivation Index of Indonesia* (MDI-I) sebagai alat ukur kemiskinan multidimensi nasional. Kepala PKEM Badan Kebijakan Fiskal, Noor Faisal Achmad, menjelaskan bahwa studi ini diharapkan dapat menjadi evaluasi atas strategi dan kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yoshimi Nishino, Chief of Social Policy UNICEF Indonesia, menuturkan bahwa indikator dalam MDI-I mencakup kesehatan, makanan, pendidikan, perlindungan, perumahan, fasilitas, dan informasi. Kajian ini dikembangkan secara kolaboratif lintas kementerian dan disesuaikan dengan konteks regional. Pemerintah juga terus mengoptimalkan peran APBN untuk melindungi masyarakat, dengan tingkat kemiskinan yang berhasil turun ke 9,03% per Maret 2024. Namun, diperlukan pendekatan lebih holistik untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026.

Pendekatan multidimensi menjadi penting karena kemiskinan tidak hanya soal kekurangan finansial. Anak-anak yang mengalami kekurangan akses pendidikan atau layanan kesehatan tetap terjebak dalam kemiskinan struktural. Hal ini perlu diatasi untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi dan memastikan anak-anak dapat mencapai potensi maksimalnya sebagai penerus bangsa.

Lebih lanjut, Putu Geniki dari FEB UI menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan analisis peran indikator terhadap kemiskinan anak dan dewasa, sehingga kebijakan dapat disesuaikan lebih tepat sasaran. Rina Karlina, Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kebijakan Fiskal, menambahkan bahwa monitoring kemiskinan multidimensi serta penguraian indikator MDI-I berdasarkan anak, gender, dan daerah menjadi penting untuk meningkatkan kualitas modal manusia dan mengarahkan intervensi ke wilayah yang paling membutuhkan.

Peluncuran *OECD Economic Survey of Indonesia 2024*

Jakarta, 26 November 2024



Menteri Keuangan bersama Wakil Menteri Keuangan dan Sekretaris Jenderal OECD meluncurkan *OECD Economic Survey of Indonesia 2024* pada 26 November 2024. Survei ini merupakan bagian dari program kerja sama Indonesia-OECD *Joint Work Programme (JWP)* 2022–2025 dan telah dilaksanakan secara periodik tujuh kali sejak 2008. Survei Ekonomi OECD adalah publikasi rutin yang disusun melalui dialog kebijakan dengan berbagai negara, termasuk Indonesia, mencakup aspek makroekonomi, tenaga kerja, sosial, investasi, perdagangan, lingkungan hidup, dan isu kebijakan lainnya.

Secara khusus, *OECD Economic Survey of Indonesia 2024* mengkaji perkembangan perekonomian Indonesia pascapandemi, dinamika inflasi, peran dalam rantai nilai global, serta reformasi struktural. Survei ini juga membahas dua agenda tematik utama, yaitu digitalisasi dan transisi hijau, yang dijabarkan dalam empat bab: kebijakan makroekonomi, konvergensi sosial-ekonomi, digitalisasi, dan transisi hijau.

Desember

Annual International Economic Development and Public Policy (AIFED) Ke 13 Tahun 2024

Bali, 2-3 Desember 2024



Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) merupakan kegiatan tahunan Badan Kebijakan Fiskal yang menjadi *flagship* Kementerian Keuangan untuk menggali masukan dari akademisi, ekonom, profesional, dan pembuat kebijakan terkait solusi atas permasalahan ekonomi dan sosial Indonesia. Pada 2024, AIFED ke-13 diselenggarakan di Bali pada 2–3 Desember 2024 dengan tema *Growth Strategies in Navigating Geoeconomic Shifts*, membahas dampak geopolitik, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan ketahanan pangan terhadap ekonomi Indonesia dan negara emerging lainnya. Di tengah perubahan lanskap global pascapandemi, fleksibilitas dan inovasi menjadi kunci untuk bertahan dalam ketidakpastian dunia.

Acara dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menekankan pentingnya memahami dinamika global demi mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pemerataan. Menteri Keuangan berharap forum ini menjadi momen penting untuk merespons pergeseran geoekonomi secara efektif. Seminar AIFED juga menghadirkan para ahli nasional dan internasional, serta perwakilan lembaga development partners seperti ADB, DFAT Australia, GIZ Jerman, dan ADBI. Vice President ADB, Scott Morris, serta Duta Besar Australia, Penny Williams, turut menyampaikan sambutan secara daring.

AIFED 2024 dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang berasal dari Kementerian Keuangan, sektor perbankan, lembaga keuangan, K/L lain, pemerintah daerah, asosiasi, lembaga riset, akademisi, dan mitra pembangunan. Forum ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperluas wawasan dan bertukar pikiran mengenai strategi pembangunan ekonomi, pengelolaan tantangan global, serta mendorong sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Sesi 1: Revisiting Growth Strategy in a New Geo-economic Setting.

Jeffrey Sachs menyoroti perlunya kerangka pembangunan berkelanjutan menghadapi tantangan global. Arief Ansory Yousuf menekankan pentingnya inovasi dan tata kelola global. Sesi ditutup dengan ajakan untuk perencanaan holistik melalui pendidikan, teknologi, dan kerja sama regional.

Sesi 2: Future Skills for Accelerating Strong and Sustainable Growth.

Stella Christie menyoroti pentingnya penguatan ekosistem pendidikan dan penyelarasan riset dengan prioritas nasional. Fook Yen Chong menyoroti peran pemerintah dan sektor swasta dalam reformasi pendidikan dan pengembangan keterampilan. Yuhyun Park menyoroti konsep Kecerdasan Digital (DQ) untuk mendukung ekonomi digital hijau. Andreas Schleicher menyoroti tren pekerjaan masa depan dan perlunya investasi dalam pendidikan, peningkatan keterampilan, dan pelatihan ulang.

Sesi 3: Positioning Green Transition as New Opportunities.

Tetsushi Sonobe membahas strategi untuk pertumbuhan hijau dan pentingnya kebijakan industri yang mempromosikan produk hijau. Natasha Beschorner menyoroti komitmen Amazon terhadap keberlanjutan dan peran digitalisasi dalam transisi energi. Alexandre Hugo Laure menekankan manfaat aglomerasi industri hijau dan perlunya kebijakan pemerintah yang mendukung. Sesi ini menggarisbawahi pentingnya menempatkan transisi hijau sebagai peluang baru bagi negara-negara berkembang.

Sesi 4: Institutional Quality and Human Capital: Key Levers for Indonesia's Economic Goals.

James A. Robinson menekankan pentingnya kualitas kelembagaan dalam akumulasi modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. Febrio Kacaribu membahas perjalanan reformasi struktural Indonesia dan pentingnya pengurutan dalam implementasi kebijakan. Sesi ini menyoroti perlunya lembaga yang inklusif dan berkualitas tinggi untuk menciptakan insentif bagi inovasi, kewirausahaan, dan akumulasi modal manusia.

Sesi 5: Leveling Up National Industrial Policies.

Cesar A. Hidalgo menjelaskan konsep kompleksitas ekonomi dan perannya dalam mendorong kebijakan industri. Rachel McCrirk membahas kebijakan "Masa Depan Buatan Australia" dan pentingnya kebijakan industri berbasis bukti. Rachmat Kaimuddin menyoroti pentingnya meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam

dan beralih ke energi terbarukan. Sesi ini menekankan perlunya inovasi berkelanjutan, keterlibatan masyarakat, dan kebijakan adaptif untuk menavigasi lanskap ekonomi global yang terus berkembang.

Sesi 6: *Fueling New Economic Growth through Resilient Food Security.*

Tigor Pangaribuan membahas Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan perannya dalam mengatasi masalah terhambatnya pertumbuhan dan kekurangan gizi. Jiangfeng Zhang menekankan perlunya adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Jacob Maina menyoroti potensi transformatif AI dalam pertanian. Dirgayuza Setiawan membahas pentingnya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan regional. Sesi ini menggarisbawahi pentingnya ketahanan pangan yang tangguh sebagai landasan bagi pertumbuhan ekonomi baru.

Seminar Dana Pensiun

Jakarta, 11 Desember 2024



Salah satu agenda rutin tahunan Badan Kebijakan Fiskal adalah penyelenggaraan Seminar Pensiun. Pada 2024, Seminar Pensiun keempat mengusung tema Optimalisasi Manfaat Pensiun Skema Iuran Pasti: Kebijakan Perpajakan dan Metode Penarikan, yang dilaksanakan pada 11 Desember 2024 di Jakarta. Seminar ini terbagi dalam dua sesi panel dengan menghadirkan pakar industri dana pensiun. Sesi pertama membahas kebijakan perpajakan dana pensiun bersama Rubino Sugana dari Prospera, sementara sesi kedua membahas metode penarikan optimal bagi peserta PPIP bersama Steven Tanner dari KKA Steven & Mourits. Panelis dari Badan Kebijakan Fiskal, OJK, DPLK, ADPI, dan Asuransi Manulife juga turut hadir. Seminar ini menjadi forum diskusi dan berbagi perspektif untuk memperkaya kebijakan dan praktik pengelolaan dana pensiun di Indonesia. Peluncuran Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2023

Peluncuran Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2023

Jakarta, 16 Desember 2024



Pemerintah berkomitmen menjaga perekonomian melalui optimalisasi penerimaan perpajakan, pengelolaan belanja negara, serta pemberian insentif melalui belanja perpajakan. Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi, Kementerian Keuangan menyusun Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2023 yang diluncurkan pada 16 Desember 2024 di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan. Acara peluncuran ini menjadi forum diskusi publik terkait laporan tersebut dan dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan I, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, akademisi, *Tax Centre*, konsultan pajak, serta mitra strategis seperti GIZ dan Prospera.



BAB 5

PUBLIKASI

“Ilmu tanpa penyebaran ibarat cahaya yang terhalang tirai.” Dalam semangat itu, para pegawai Badan Kebijakan Fiskal aktif berkontribusi melalui berbagai publikasi, memperkaya ruang diskusi publik serta memperkuat transparansi kebijakan fiskal.

KEM & PPKF 2025



Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (KEM & PPKF 2025) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (RAPBN 2025). Dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan hasil pembicaraan pendahuluan, dokumen KEM & PPKF 2025 dimutakhirkan untuk menjadi bahan utama penyusunan RAPBN 2025.

KEM & PPKF 2025 disusun dalam situasi ekonomi global yang belum stabil dan masa transisi pemerintahan domestik. Masa transisi ini menjadi momentum strategis untuk memastikan kesinambungan agenda pembangunan, memperkuat fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga reformasi struktural menuju transformasi ekonomi. KEM & PPKF 2025 juga menjadi referensi utama bagi kebijakan fiskal jangka menengah dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 dan meletakkan dasar bagi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045. Kondisi ini menjadikan penyusunan APBN 2025 sangat strategis.

Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2023 (Buku 1 dan Buku 2)



Sebagai wujud komitmen terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan dan kredibel, kualitas belanja perpajakan terus ditingkatkan agar lebih terarah dan terukur dalam mendorong perekonomian. Pada 2023, nilai belanja perpajakan tercatat Rp362,5 triliun atau 1,73% dari PDB, meningkat 6,3% dibandingkan 2022. Belanja perpajakan PPN dan PPnBM menyumbang Rp210,2 triliun (58,0%), sedangkan belanja PPh mencapai Rp129,8 triliun (35,81%) dari total estimasi belanja perpajakan.

Peningkatan kualitas transparansi fiskal terus dilakukan dengan memperhatikan prinsip nasional dan standar internasional, seperti *Fiscal Transparency Code* dari IMF. Hal ini tercermin dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023, yang memberikan predikat *Advanced* untuk Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2022. Selain itu, berdasarkan *Global Tax Expenditure Transparency Index* (GTETI) 2024, Indonesia berhasil meraih peringkat kedua dunia dari 105 negara.

Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2023 diharapkan menjadi media diseminasi luas bagi publik, serta sarana evaluasi atas efektivitas insentif perpajakan yang telah diberikan. Laporan ini juga menjadi bukti pentingnya peran belanja perpajakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.



Bulanan

Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal

Sebagai komitmen untuk memberikan informasi sekaligus menjalin komunikasi dengan masyarakat, Badan Kebijakan Fiskal menerbitkan publikasi Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Kebijakan Fiskal (TEKF) serta melakukan diseminasi TEKF. TEKF merupakan tinjauan yang berisi perkembangan ekonomi, sektor keuangan, dan kebijakan fiskal yang

dipublikasikan secara triwulanan. Sepanjang tahun 2024, TEKF telah diterbitkan sebanyak empat kali sebagaimana berikut:



Warta Fiskal

Majalah terbitan per kuartal Badan Kebijakan Fiskal yang menghadirkan berbagai tulisan semi populer terkait isu ekonomi, fiskal, sektor keuangan, dll. yang mudah dipahami seluruh kalangan. Rubrik-rubrik ringan dan kuis juga selalu melengkapi di setiap edisi. Sepanjang tahun 2024, Warta Fiskal telah diterbitkan sebanyak empat kali sebagaimana berikut:



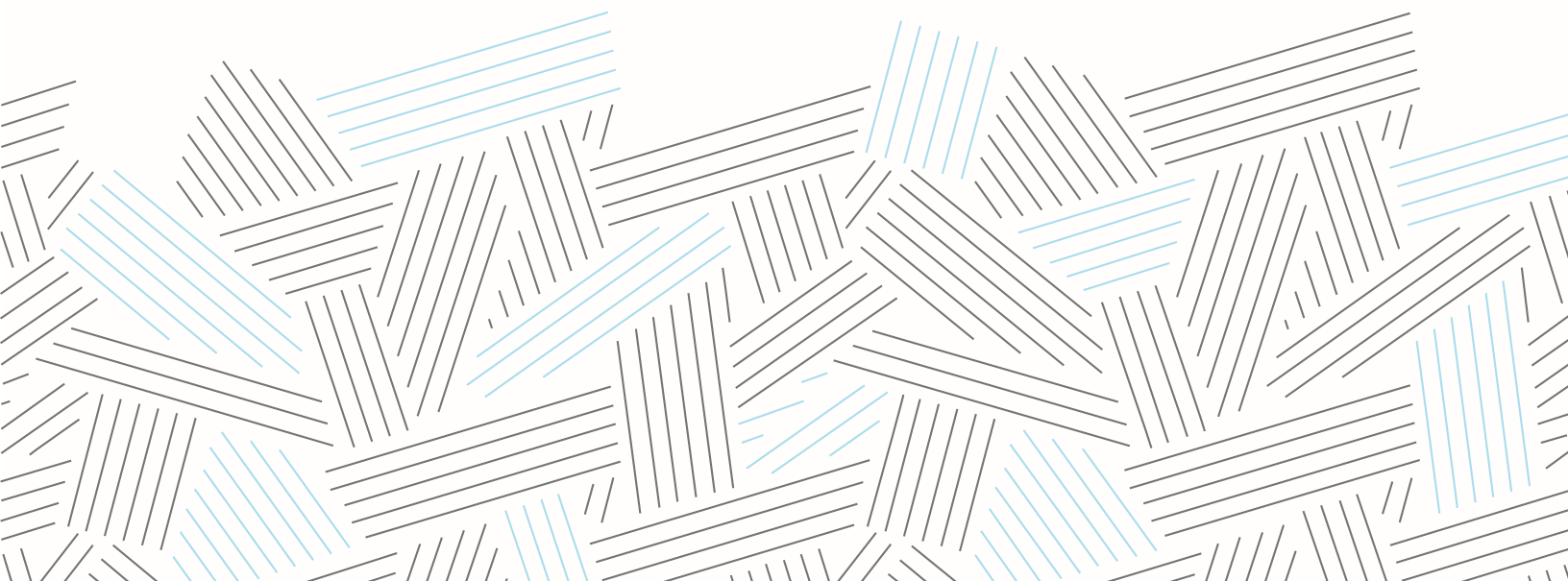
Tulisan Pegawai

Selama tahun 2024, tulisan pegawai Badan Kebijakan Fiskal yang telah terbit di jurnal, media massa atau publikasi lainnya tercatat sebanyak 38 artikel yang ditulis oleh 32 orang penulis.

No	Tanggal	Nama Penulis	Nama Media	Judul Artikel
1	5 Januari 2024	Abdurohman	The Jakarta Post	The Economics of Indonesia's Election and Democracy
2	8 Januari 2024	Wahyu Utomo	Bisnis Indonesia	Kinerja Solid APBN 2023
3	9 Januari 2024	Rizki Zul Arfandi	The Jakarta Post	Expanding Indonesia's Fiscal Space as Potential Growth Booster
4	10 Januari 2024	Chandra Kusuma	Investor Daily	Sukses Dana Pandemi dan Tantangan di Masa Depan
5	11 Januari 2024	Sriyanto	Jurnal Natapraja	The Impact of Triple Crises of Fuel, Food, and Finance on Household Consumption in Indonesia
6	18 Januari 2024	Mahpud Sujai	Investor Daily	Potensi Ekonomi Pengembangan EBT
7	20 Januari 2024	Bagus Handoko	Kompas	Indonesia di Tengah Bangkitnya Negara Kekuatan Menengah Asia
8	31 Januari 2024	Pipin Prasetyono	Harian Kontan	Indonesia Emas 2045 dan Nasib Lansia
9	05 Februari 2024	Mahpud Sujai Andi Nugroho Suryo Kuncoro	The Jakarta Post	Compliance With ESG Principles Means Profits
10	19 Februari 2024	Mohammad Yoga Pratama	Harian Kontan	Kolaborasi Merespon Tantangan Global

No	Tanggal	Nama Penulis	Nama Media	Judul Artikel
11	1 April 2024	Melani Dewi Astuti	Tax Analysis	The Implementation of Global Minimum Tax in ASEAN Countries
12	22 Mei 2024	Wahyu Utomo	Bisnis Indonesia	Kebijakan Fiskal 2025 Titik Tolak Menuju Indonesia Emas
13	29 Mei 2024	Chandra Kusuma	The Jakarta Post	Pandemic Fund A Shot in the Arm for Global Health Security
14	07 Juni 2024	Abdurohman	The Jakarta Post	The Economic Dimension of Haj and Umrah Pilgrimage
15	18 Juni 2024	Chandra Kusuma	The Jakarta Post	A Call to Immediate Action Integrating Health into Climate Change
16	26 Juni 2024	Dwika Darinda	Info Risiko Fiskal	Menimbang Risiko dan Manfaat Program Food Estate, Contract Farming dan sistem Resi Gudang
17	12 Juli 2024	Adi Budiarto Risya Fahrez	Investor Daily	Reformasi Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Masa Depan
18	22 Juli 2024	Wahyu Utomo	Bisnis Indonesia	Kinerja APBN 2024 Terjaga, Membuka Jalan Lapang 2025
19	13 Agustus 2024	Chandra Kusuma	The Jakarta Post	The Jakarta Post - Global Economic Challenges and The G20s Role
20	23 Agustus 2024	Wahyu Utomo Widiyanto	Investor Daily	Arsitektur RAPBN 2025 Transisi Solid dan APBN Sustainable
24	2 September 2024	Chandra Kusuma	The Jakarta Post	Pivoting Toward Human Capital Development
25	5 September 2024	Chandra Kusuma Abrian Duta Firmansyah	The Jakarta Post	Masa Depan Indonesia Sehat dan Rencana Strategis Dana Pandemi

No	Tanggal	Nama Penulis	Nama Media	Judul Artikel
26	9 September 2024	Nopriyanto Hady Suhanda	The Jakarta Post	The Misguided Plan to Scrap Public Transportation Subsidies
27	24 September 2024	Rosyid Bagus Ginanjari Habibi	kompas.com	Peluang Emas Sektor Properti di Era Pemerintahan Prabowo
28	25 September 2024	Chintya Pramasanti Marhaeny Masye Tualai	Investor Daily	Perpajakan Global yang Adil dan Regulasi Anti Penghindaran Pajak
29	25 September 2024	Melani Dewi Astuti Zainul Arifin	jakartaglobe.id	Indonesia and The Global Tax Agreement
30	27 September 2024	Wahyu Utomo	Bisnis Indonesia	APBN 2025, Kado Masa Transisi
31	7 Oktober 2024	Muhammad Aresto Ascary Hekmatyrt	The Jakarta Post	Closing The Gap in VAT in Self- build Projects
32	12 Oktober 2024	Boby Wahyu Hermawan	eastasiaforum. org	Asia's path to climate-resilient infrastructure





BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Gd. R.M. Notohamiprodjo Jl. Dr. Wahidin Raya
No.1 Jakarta Pusat - 10710



fiskal.kemenkeu.go.id



humas.bkf@kemenkeu.go.id



[bkfkemenkeu](#)



[bkfkemenkeu](#)



[@BKFKemenkeu](#)



[@BKFKemenkeu](#)



[bkfkemenkeuRI](#)